

**HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT DALAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  
(STUDI DI KOTA SURAKARTA)**

**Tesis**

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Pada Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana**



**Disusun oleh :**

**EDI PURWANTO, S.H.  
B4A 003 012**

**Bidang Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi**

**Pembimbing : Prof. H. Abdullah Kelib, S.H.**

**MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
S E M A R A N G  
2005**

Halaman Pengesahan

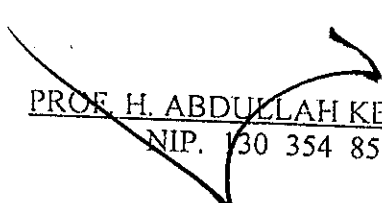
HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN  
EKONOMI MASYARAKAT  
(STUDI DI KOTA SURAKARTA)

Tesis

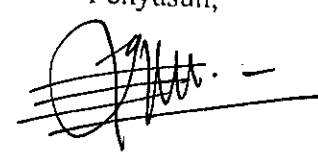
Telah Diujikan Dihadapan Dewan Penguji Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang  
Hari Kamis  
Tanggal 13 Januari 2005

Semarang, 13 Januari 2005

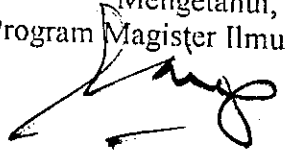
Pembimbing,

  
PROF. H. ABDULLAH KELIB, S.H.  
NIP. 130 354 857

Penyusun,

  
EDI PURWANTO, S.H.  
B4A 003 012

Mengetahui,  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum UNDIP

  
PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H.  
NIP. 130 350 519

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

**IF YOU EVER THINK THE PROBLEMS IS TOO MUCH, YOU CAN  
MAKE COMPROMISES THAT NOTHING IS PERFECT**

**(Penulis)**

**SEGALA NILAI YANG DIEMBAN DALAM DUNIA PERGURUAN  
TIDAK AKAN PERNAH MEMPERKENANKAN UNTUK BERBOHONG.  
NILAI-NILAI ITU TIDAK MEMPUNYAI KODRAT UNTUK  
BERBOHONG. YANG BERBOHONG HANYALAH TANGAN-TANGAN  
YANG MENGGENGAMNYA**

**(Emha Ainun Nadjib)**

### **PERSEMBAHAN :**

**Orang tuaku terkasih : P. Toto Sutikno, B.A. dan Sri Wahyuni  
Istriku tercinta : Nani Sri Handayani, S.Si, M.Sc.  
Anakku tersayang : Muhammad Imam Anugrahadi Athaailah**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini pada waktunya. Tesis berjudul: Hukum Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi masyarakat (Studi Di Kota Surakarta) ini disusun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi pada Universitas Diponegoro Semarang.

Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan pengetahuan, waktu, biaya, dan literatur.

Namun dengan tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu, maka penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu penulis sangat berterima kasih bila ada kritikan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan tesis ini. Penulis menyadari hanya dengan bantuan dari berbagai pihak penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis menyampaikan dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. H. Abdullah Kelib, SH. selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan, masukan dan kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini. Integritas beliau sebagai akademisi yang selama ini dirasakan oleh penulis telah memberikan kesan yang berarti bagi penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung proses penyelesaian studi dan penelitian untuk tesis ini antara lain:

1. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

2. Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang secara institusional telah mengizinkan dan memfasilitasi penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi.
3. Staf Administrasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
4. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terima kasih atas buku-bukunya.
5. Kepala Departemen Agama Kota Surakarta beserta staf yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data yang penulis butuhkan dalam menulis tesis.
6. Rekan-rekan angkatan 2003 yang telah memberi motivasi untuk menyelesaikan tesis ini dan setia menjadi mitra diskusi selama mengikuti pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum.
7. Saudara Agung Nidiacom yang telah banyak membantu penulis dalam pengetikan tesis ini.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Atas kebaikan yang telah diberikan itu semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua, amin. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan setitik manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 28 Desember 2004

Penulis

## ABSTRAK

Penyelenggaraan Zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Pengelolaan Zakat diharapkan efektif dan prospektif dalam pelaksanaannya.

Dalam tesis ini diangkat dua permasalahan, pertama bagaimanakah Hukum Pengelolaan Zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kedua bagaimanakah reinterpretasi zakat dan distribusinya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Jika dilihat Hukum Pengelolaan Zakat dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Surakarta, dalam pelaksanaannya belum efektif. Ada beberapa kendala yang menyebabkan Undang-Undang tersebut belum bisa dikatakan efektif. Kendalanya berasal dari wajib zakat itu sendiri dan dari interpretasi zakat yang cenderung dogmatis-formalistis. Namun jika dilihat dari prospektifitasnya mempunyai prospek yang baik. Hal ini dapat dilihat dari potensi zakat yang begitu besar dan juga potensi reinterpretasi zakat dan pendistribusiannya.

Hukum pengelolaan Zakat sangat berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di kota Surakarta. Dengan aturan ini secara lebih baik meningkatkan kualitas teknis dari organisasi pengelola zakat.

Melalui kajian yuridis normatif dan yuridis sosiologis, studi ini tidak hanya melihat kerangka hukum pemberdayaan ekonomi sebagai persoalan positifis-normatif saja, akan tetapi juga terkait dengan bidang-bidang lain yang saling mengisi dan mempengaruhi, seperti politik-hukum, politik-ekonomi, social-politik, dan budaya masyarakat.

Melalui kajian yang mendalam, hukum pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan sinergis manakala ia memegang prinsip-prinsip: (i) memacu pertumbuhan dan sekaligus pemerataan ekonomi; (ii) berdimensi langsung dengan kepentingan masyarakat; (iii) memegang teguh prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi; dan (iv) memanfaatkan sumber daya secara adil, transparan, dan produktif.

Kata-kata kunci: zakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

## ABSTRACT

The implementation of zakat in Indonesian is ruled by the Act Number 38 1999 about Management Zakat. The Management Zakat Act is expected to be effective and prospective in protection.

Two matters are discussed in this thesis; first, how to The Management Zakat Act in community economic empowerment. Second, how to reinterpretation of zakat and distribution in community economic empowerment.

If viewed of the effective The Management Zakat Act in community economic empowerment in Surakarta, it is not effective yet. There are some problems that cause the Act can't prevail effectively. The problems are from muzakki and zakat interpretations are dogmatic-formalistic. But if viewed of the prospective have good prospect. This is can view from big potential of zakat and potential to reinterpretation of zakat and distribution.

The Management Zakat Act can empowerments the community economic in Surakarta. With The Act can growth technical quality management zakat organization.

Through normatif-legal study and sosio-legal study, it does not only sees the legal framework of economic-empowerment as positivist-normative, but also related with other fields which fill and influence each other, such as politic-law, politis-economic, social-politic, and community culture.

Through a deeper study, The Management Zakat Act in community economic empowerment can run in harmony if it holds the principles of: (i) economic growth and equal distribution; (ii) direct dimension with community interest; (iii) holding justice and economic democracy; (iv) utilizing resources properly, transparent, and productive.

Key words: zakat and community economic empowerment

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman judul.....	i
Halaman pengesahan .....	ii
Motto dan persembahan .....	iii
Kata pengantar.....	iv
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Daftar isi.....	viii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian .....	13
F.1. Obyek Penelitian .....	14
F.2. Metode Pendekatan.....	15
F.3. Paradigma.....	15
F.4. Jenis Penelitian.....	16
F.5. Jenis dan Sumber Data.....	17
F.6. Teknik Pengumpulan Data .....	18



F.7. Alat-Alat Pengumpulan Data.....	19
F.8. Teknik Analisis Data.....	20
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	22

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Mengenai Zakat**

1. Sejarah Perkembangan Zakat di Indonesia .....	24
2. Pengaturan Pengelolaan Zakat.....	30
3. Pengertian Zakat .....	31
a. Prinsip-Prinsip Zakat.....	34
b. Falsafah Zakat .....	35
c. Dali-Dalil Zakat .....	37
d. Asas dan Tujuan Zakat.....	39
e. Hikmah Zakat .....	40
f. Syarat-Syarat Zakat.....	40
4. Macam-Macam Zakat dan Penerima Zakat.....	41
a. Macam-macam Zakat .....	41
1) Zakat Harta .....	41
2) Zakat Fitrah.....	45
b. Penerima Zakat .....	46
5. Organisasi Pengelola Zakat .....	48
6. Beberapa Permasalahan Zakat di Indonesia.....	49
a. Zakat dan Pajak.....	49

b. Zakat dan Negara.....	52
B. Pemberdayaan Masyarakat.....	53
1. Pemberdayaan Sistem Ekonomi Masyarakat.....	59
2. Pemberdayaan Hukum dan Ekonomi Masyarakat .....	62
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	65
1. Pelaksanaan Hukum Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Surakarta.....	65
a. Manajemen BAZ dan LAZ Yayasan Solo Peduli di Kota Surakarta .....	65
1) Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Surakarta.....	66
2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli Surakarta .....	68
b. Karakteristik BAZ Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta.....	69
c. Konsep Manajemen Dan Pelaporan Keuangan BAZ Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta.....	70
d. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan BAZ Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta .....	72
e. Perencanaan Keuangan BAZ Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta.....	73

<b>f. Pengelolaan Keuangan BAZ Surakarta dan LAZ</b>	
Yayasan Solo Peduli Surakarta .....	76
1) Penghimpunan Dana .....	76
2) Dana Pengelola .....	78
3) Bunga Bank .....	79
<b>g. Ruang Lingkup Bidang Sasaran .....</b>	<b>79</b>
<b>h. Bentuk dan sifat penyaluran .....</b>	<b>80</b>
<b>i. Prosedur Pengeluaran Dana .....</b>	<b>82</b>
<b>j. Pertanggungjawaban Pengeluaran Dana .....</b>	<b>82</b>
<b>k. Pengendalian Keuangan .....</b>	<b>83</b>
<b>2. Reinterpretasi Zakat dan Distribusinya dalam Pemberdayaan</b>	
Ekonomi Masyarakat .....	83
a. Fakir .....	85
b. Miskin .....	85
c. Amil .....	88
d. Mu'allaf .....	88
e. Riqap .....	89
f. Garimin .....	89
g. Sabilillah .....	90
h. Ibnu Sabil .....	91

<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>95</b>
<b>1. Pelaksanaan Hukum Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan</b>	
<b>Ekonomi Masyarakat di Surakarta.....</b>	<b>95</b>
<b>a. Tinjauan Manajemen BAZ dan LAZ Yayasan Solo Peduli</b>	
<b>di Kota Surakarta.....</b>	<b>95</b>
<b>1) Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Surakarta.....</b>	<b>96</b>
<b>2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli</b>	
<b>Kota Surakarta .....</b>	<b>98</b>
<b>b. Karakteristik BAZ Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli</b>	
<b>Kota Surakarta .....</b>	<b>100</b>
<b>c. Konsep Manajemen dan Pelaporan Keuangan BAZ</b>	
<b>Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta.....</b>	<b>100</b>
<b>d. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan BAZ Surakarta</b>	
<b>dan LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta .....</b>	<b>103</b>
<b>e. Perencanaan Keuangan BAZ Surakarta dan LAZ</b>	
<b>Yayasan Solo Peduli Surakarta.....</b>	<b>104</b>
<b>f. Pengelolaan Keuangan BAZ Surakarta dan LAZ</b>	
<b>Yayasan Solo Peduli Surakarta.....</b>	<b>107</b>
<b>1) Penghimpunan Dana .....</b>	<b>107</b>
<b>2) Dana Pengelola .....</b>	<b>109</b>
<b>3) Bunga Bank.....</b>	<b>110</b>
<b>g. Ruang Lingkup Bidang Sasaran.....</b>	<b>110</b>
<b>h. Bentuk dan sifat penyaluran.....</b>	<b>111</b>

i. Prosedur Pengeluaran Dana.....	112
j. Pertanggungjawaban Pengeluaran Dana.....	113
k. Pengendalian Keuangan.....	115
2. Reinterpretasi Zakat dan Distribusi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	117
a. Fakir Miskin .....	119
b. Amil.....	122
c. Mu'allaf.....	125
d. Riqap.....	127
e. Garimin.....	130
f. Sabilillah.....	133
g. Ibnu Sabil.....	137
 BAB IV PENUTUP.....	152
A. Kesimpulan.....	152
B. Saran-Saran.....	152
 DAFTAR PUSTAKA	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia seperti yang termuat dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusun kerangka untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata tersebut berdasarkan Pancasila, yang berada di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disinilah diperlukan adanya proses pembangunan nasional.

Pembangunan Nasional tersebut selama ini telah kita laksanakan secara bertahap yaitu dengan serangkaian tahapan kegiatan melalui Repelita-Repelita yang sekarang disebut dengan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) TAP MPR TAHUN 1999. PROPENAS tersebut harus dapat dirasakan semua warga negara Indonesia dan hasil-hasilnya harus dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia dan tiap-tiap warga negara.

Asas yang telah ditetapkan itu perlu direalisasikan dan dalam wujud pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya dana pembangunan yang ada. Berawal dari hal itu, pembiayaan pembangunan memerlukan uang yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil. Dari mana uang tersebut dapat diperoleh? Uang yang digunakan untuk itu didapat dari

sumber-sumber penghasilan negara. Pada dasarnya negara mempunyai sumber-sumber penghasilan yang terdiri :<sup>1</sup>

1. Bumi, air dan kekayaan alam.
2. Pajak-pajak, Bea dan Cukai.
3. Retribusi.
4. Sumbangan.
5. Hasil Perusahaan Negara.
6. Pinjaman.
7. Lain-lain sumber, seperti : denda-denda, sitaan dan percetakan uang.

Dari berbagai sumber pendapatan diatas, kiranya perlu dikemukakan disini adalah sumber lain-lain, yaitu zakat. Mengapa zakat? Karena bila potensi zakat dikembangkan secara profesional dan optimal maka ia menjadi sumber alternatif untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Juga zakat dapat berpotensi mengurangi masalah pengangguran yang kian membengkak. Berawal dari sinilah penulis tertarik untuk mengangkat tema pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui potensi zakat.

Zakat merupakan rukun Islam yang memiliki dimensi sosial ekonomi. Zakat juga merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan menurut peraturan tertentu. Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara. Walaupun bukan pajak, namun zakat dapat memberikan dampak pada masyarakat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Hal tersebut dapat dicapai jika dana zakat dikelola secara profesional, amanah dan transparan oleh amil zakat yang berhimpun dalam wadah yang disebut Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

---

<sup>1</sup> Bohari, 1993, *Pengantar Hukum Pajak*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 9.

Salah satu wujud dari profesional dan transparannya organisasi pengelola zakat adalah dengan dimilikinya sistem akuntansi yang baik. Baik dalam arti dapat menghasilkan laporan keuangan yang benar dan tepat waktu.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat tersebut, maka telah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan serta dibina oleh pemerintah.

Dengan terbitnya undang-undang tentang pengelolaan zakat diharapkan potensi zakat yang ada dapat dikembangkan dan dioptimalkan sehingga menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena selama ini dapat dikatakan bahwa sesungguhnya praktek zakat ini masih relatif jauh dari yang diharapkan. Misalnya dalam sisi kolektibilitas, dari masyarakat Indonesia dapat ditargetkan potensi zakat senilai Rp. 6,3 trilyun per tahun. Angka ini dihitung berdasarkan asumsi jumlah wajib pajak. Tapi kenyataannya baru dapat terkumpul sebesar Rp. 217 milyar. Bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti malaysia misalnya, mereka berhasil mengumpulkan sekitar Rp. 650 milyar. Padahal kita tahu bahwa hanya sekitar 55% (sekitar 12 juta jiwa) saja penduduk Malaysia beragama Islam, sedangkan di Indonesia terdapat (dalam hitungan konservatif) 183 juta jiwa Muslim.<sup>2</sup> Kelahiran Undang-Undang No. 38 tahun 1999, salah satunya bertujuan agar pengumpulan Zakat dari orang yang berkewajiban

---

<sup>2</sup> Hafiddudin, *Kedaulatan Rakyat*, 9 September 2001, hal. 2



menunaikannya semakin optimal dilakukan. UU ini juga bertujuan agar pengelolaan Zakat melalui badan-badan atau organisasi yang berwenang berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan zakat yang terkumpul dapat dioptimalkan untuk memberdayakan orang-orang yang berhak menerimanya.

Berdasarkan UU Zakat ini, pengelolaan zakat adalah kegiatan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Persoalan penting tidak hanya pada organisasi pengelola zakat, tetapi bagaimana organisasi yang mendapat amanah untuk mengelola ini betul-betul dipercaya oleh muzakki atau orang yang menunaikan zakat bahwa zakatnya dikelola secara baik sesuai dengan ketentuan syariah dan sampai kepada mustahiq atau orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu institusi pengelola zakat ini diakui keamanahannya oleh masyarakat sehingga institusi/lembaga ini benar-benar berwibawa dan mempunyai arti penting dimata masyarakat. Dalam konteks inilah bagi institusi/lembaga pengelola zakat perlu menerapkan akuntansi dan manajemen zakat yang profesional layaknya sebuah organisasi modern yang bergerak dibidang bisnis.

Selain akuntansi, diperlukan manajemen yang baik bagi organisasi pengelola zakat. Manajemen pada dasarnya meliputi dua hal penting, yaitu perencanaan dan implementasi proses manajemen. Dalam kaitannya dengan organisasi pengelola zakat, manajemen harus mengandung sejumlah prinsip-prinsip.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Widodo, Hertanto dan Kustiawan, Teten, 2001, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Institut Manajemen Zakat, Jakarta, hal. Kata Sambutan

Pertama, prinsip kesadaran umum, dengan dikelolanya zakat oleh organisasi yang menggunakan manajemen yang baik berdampak lahirnya kesadaran bagi para muzakki, munfik dan musaddiq. Kedua, prinsip manfaat, dana zakat yang terhimpun diupayakan semaksimal mungkin memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Ketiga, prinsip koordinasi, dalam pengelolaan zakat haruslah terjalin koordinasi yang harmonis antar berbagai instansi yang terkait agar tercipta efisiensi efektifitas yang optimal. Keempat, prinsip keterpaduan, dalam pengelolaan zakat diharapkan adanya keterpaduan antara organisasi pengelola zakat dengan instansi terkait, keterpaduan antara ulama dan umara. Kelima, prinsip produktif rasional, organisasi pengelola zakat harus berupaya menyalurkan zakat pada usaha produktif dan rasional untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Adanya penafsiran dogmatis-formalistis menyangkut obyek zakat dan distribusinya menjadikan daya guna zakat yang belum bisa mengangkat perekonomian rakyat dan negara. Untuk itulah perlu adanya upaya dari pihak yang kompeten untuk membuka cakrawala sehingga zakat dan distribusinya dapat di reinterpretasikan sesuai dengan kondisi aktual saat ini

Ajaran Islam mengenal dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh para pemeluknya. Keduanya disebut dengan dua kalimat : *hablum minallah wa hablum minan nas* (Q.S. 3 : 112). Terjemahan harfiahnya adalah 'tali Allah dan tali manusia'. Hubungan itu dilambangkan dengan tali, karena ia menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia. Yang disebut terakhir ini meliputi juga hubungan

antara manusia dengan lingkungannya, termasuk dirinya sendiri. Kedua hubungan itu harus berjalan serentak dan stimultan. Kalau dilukiskan, garis ke atas (vertikal) menunjukkan hubungan manusia yang bersifat langsung dan tetap dengan Tuhan. Garis mendatar, horizontal, menunjukkan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, lingkungan dan dirinya sendiri, selama ia hidup di dunia ini. Yang dituju adalah keselarasan dan kemandapan hubungan dengan Allah dan sesama manusia, termasuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Inilah aqidah dan ini pulalah wasilah (jalan) yang dibentangkan ajaran Islam kepada manusia, terutama yang memeluk ajaran agama itu. Dengan berpegang teguh pada aqidah dan keyakinan itu, terbuka jalan untuk mencapai kehidupan didunia ini dan kehidupan di akherat kelak, setelah manusia meninggalkan dunia yang fana ini.

Untuk mencapai tujuan itulah, disamping syahadat, shalat, puasa dan haji, diadakan lembaga zakat. Lembaga inilah, disamping membina hubungan dengan Allah, akan menjembatani dan mempererat hubungan, kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa umat Islam itu bersaudara, saling bantu-membantu dan tolong-menolong : yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Dengan zakat hendak digambarkan citra Islam dan diwujudkan cita-cita kemasyarakatan Islam. Cita-cita kemasyarakatan Islam itu oleh kalangan Islam sering disebut dengan kata-kata *baladun tayyibatun wa rabbun ghafur*, yaitu suatu masyarakat baik atau tempat sejahtera di dunia ini di bawah naungan keampunan dan keridhaan Tuhan (Q.s. 34 : 15).

Cita-cita kemasyarakatan ini hendak dicapai antara lain dengan lembaga zakat. Oleh karena zakat mempunyai arti dan fungsi tertentu dalam pelaksanaannya. Secara langsung ia diperuntukkan bagi manusia yang berada dalam kekurangan. Akan tetapi, secara tidak langsung zakat mempunyai kebaikan bagi si pembayar zakat sendiri yang disebut muzakki (pembayar atau penunai zakat). Dalam salah satu ayat di dalam Al Quran (2 : 261). Tuhan menyatakan bahwa setiap benda yang baik yang dinafkahkan seseorang (diberikan untuk tujuan-tujuan halal dan sah menurut hukum) akan diberi gantinya berlipat ganda oleh Allah, Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Kuasa. Dengan perkataan lain, setiap pengeluaran yang dilakukan dengan tujuan-tujuan yang baik, akan dibalas Tuhan dengan kebaikan pula, melebihi jumlah yang dikeluarkan itu.

Balasan Tuhan atas pembayaran zakat, misalnya, akan diperoleh manusia secara tidak langsung di dunia ini. Bentuknya bermacam-macam. Salah satunya adalah perasaan bahagia karena dengan mengeluarkan zakat itu, ia telah ikut membahagiakan orang lain yang menderita. Disamping itu, seorang yang mengeluarkan zakat akan terdidik pula dengan sifat-sifat yang baik, diantaranya tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga mengingat nasib dan kepentingan orang lain yang hidup bersama dia dalam suatu masyarakat. Disinilah pemberdayaan ekonomi melalui potensi zakat dapat terjadi dan dinikmati bangsa Indonesia.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dalam penelitian ilmiah, perumusan masalah sangat penting karena akan memberi arah dalam membahas permasalahan yang sedang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan lebih mendalam dan sesuai dengan sasaran yang ditentukan.

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hukum Pengelolaan Zakat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kota Surakarta?
2. Bagaimanakah reinterpretasi zakat dan distribusinya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kota Surakarta?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian adalah usaha-usaha atau pekerjaan untuk memperoleh pemecahan terhadap segala permasalahan. Demikian juga dengan yang dilakukan penulis dalam hal ini, penelitian yang dilakukan bertujuan :

1. Memahami, menganalisis dan menjelaskan Hukum Pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Memahami, menganalisis dan menjelaskan reinterpretasi zakat dan distribusinya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adanya penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi kepentingan akademis atau teoritis dan juga untuk kepentingan praktis, yaitu guna pengembangan pengelolaan zakat pada khususnya dan Hukum Ekonomi pada umumnya. Demikian pula dengan kegunaannya :

1. Memberikan suatu pemikiran atau suatu informasi ilmiah terutama bagi dunia akademis, tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi melalui Hukum Pengelolaan Zakat.
2. Secara praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan pengelola zakat dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi melalui Hukum Pengelolaan Zakat.

#### **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern akan selalu menuntut diadakannya pembaharuan, agar ketentuan hukum yang berlaku senantiasa berdaya guna. Untuk itulah Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disahkan.

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat diartikan apakah Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut berdaya guna dalam mengakomodasi kegiatan

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat pada saat ini dan masa yang akan datang.

Suatu ketentuan dikatakan berdaya guna dengan ketentuan yang menjadi dasar pembentukannya berarti apa yang diatur di dalam peraturan tersebut mengacu pada peraturan yang menjadi dasarnya tersebut. Bila kita mengkaji Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat maka kita lihat dalam pasal-pasal apakah telah akomodatif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Suatu peraturan perundang-undangan akan menjadi berdaya guna apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Oleh karena itu kita tidak cukup hanya memahami hukum dalam wujud rumusan-rumusan yang tertulis melainkan hukum sebagai gejala empirik yang tampak dan berlaku dalam masyarakat.

Ukuran suatu hasil perbuatan dikatakan berdaya guna apabila menimbulkan akibat hasil dan mencapai maksud sebagaimana yang diinginkan jitu atau tepat mengenai sasaran yang dituju. Berdaya guna atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah yang timbul selama waktu pengimplementasiannya. Keadaan ini disebabkan karena proses implementasi selalu mengakibatkan lingkungan dan kondisi yang berbeda.

Tujuan zakat adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam merealisasikan memerlukan kelembagaan (syari'at) yang bisa dirancang sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan duruf (waktu, tempat dan keadaan) yang melengkapi. Dalam pada itu, syari'at yang pernah diterapkan oleh Nabi pada situasi dan kondisi sosial tertentu di Madinah dan sekitarnya 14 abad yang lalu, sudah barang tentu bisa tidak diambil begitu saja dan diterapkan persis sebagaimana adanya. Perlu penafsiran sesuai dengan konteks sosial era globalisasi sekarang ini. Disinilah perlu adanya reinterpretasi zakat dan distribusinya guna pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Hukum diperlukan untuk mengatur tata kehidupan dan hubungan kepentingan antar individu, melalui peraturan dan undang-undang (dalam arti hukum positif). Undang-undang harus memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang ada di dalam masyarakat pada hakekatnya merupakan rangkaian pelbagai perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut tentu saja dapat menimbulkan hubungan hukum yang akhirnya muncul pelbagai akibat hukum.

Kegiatan-kegiatan dalam masyarakat itu memerlukan "seperangkat aturan hukum untuk mengatur hubungan-hubungan kegiatan tersebut agar terjamin kepastian hukum dan keadilan. Hukum yang dimaksud disini dalam arti hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu. Sedangkan yang dimaksud hubungan hukum adalah hubungan-



hubungan yang mempunyai akibat hukum. Jadi di sini kita akan melihat adanya hubungan hukum yang terjadi antara pengelola zakat dengan pembayar zakat.

Menurut Lawrence M. Friedman, menegaskan bahwa untuk kepentingan analisis, maka sistem hukum yang beroperasi dapat di anggap sebagai suatu sistem yang terdiri atas tiga komponen, yaitu :<sup>4</sup>

1. Komponen struktural, bagian-bagian ini adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum, bagian-bagiannya bergerak dalam suatu mekanisme, seperti pengadilan, badan pembuat Undang-undang, konstitusi tertulis. Komponen ini memungkinkan memberikan pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur;
2. Substansi, yaitu hasil sebenarnya yang dikeluarkan oleh sistem hukum. Setiap keputusan yang dikeluarkan merupakan produk substansif dari suatu sistem hukum. Yang kesemuanya dipergunakan oleh para penegak hukum dan oleh mereka yang diatur;
3. Sistem hukum yang bersifat kultural, di mana terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum. Komponen yang dinamakan dengan kultural hukum ini dibedakan antara internal legal culture yaitu kulturenya lawyer dan judged's, dan eksternal legal culture yang merupakan kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Dalam rangka membicarakan Undang-Undang Pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka dari segi struktur hukum kita

<sup>4</sup> Lawrence M. Friedman, dalam Esmi Warrassih, 1995, *Peranan Kultur Hukum Dalam Penegakan Hukum*, (Masalah-masalah Hukum) Semarang, Undip. hal. 1

bisa melihat bagaimana pengelola zakat menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pengelolaan zakat yang langsung berhadapan dengan masyarakat baik sebagai pembayar maupun penerima zakat apakah berpedoman pada Undang-Undang Pengelolaan zakat atau tidak. Dari segi substansi hukum kita bisa melihat apakah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat telah mengakomodasi kepentingan pembayar dan penerima zakat, seperti bagaimana sanksi-sanksi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut apakah terlalu berat atau ringan, apakah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut efektif dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dari segi kultur hukum maka kita akan melihat jika sewaktu-waktu terjadi sengketa hukum dalam badan pengelola zakat atau pihak pembayar ataupun penerima zakat, maka jalur apakah yang akan digunakan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa hukum tersebut, apakah melalui lembaga pengadilan atau lembaga di luar pengadilan.

#### **F. METODE PENELITIAN**

Setelah memperoleh gambaran tentang kerangka berpikir ilmiah, kita memasuki pemahaman lebih lanjut mengenai metode penelitian ilmiah. Suatu metode adalah merupakan suatu cara kerja atau tata kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian hukum ada dua metode yang dapat dipakai yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum

normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder.

Sedangkan penelitian hukum sosiologis menggunakan data primer.

Dalam penelitian hukum normatif ada enam jenis atau bentuk penelitian, yaitu:<sup>5</sup>

1. Penelitian inventarisasi hukum positif.
2. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
3. Penelitian untuk menemukan hukum in concreto
4. Penelitian terhadap sistematik hukum
5. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
6. Perbandingan penelitian hukum positif

Dalam tesis ini penulis menggabungkan kedua metode tersebut diatas. Dan khusus untuk metode penelitian hukum normatif penulis melakukan inventarisasi hukum positif dan penelitian untuk menemukan hukum in concreto.

Jadi suatu metode dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan kesesuaian, keserasian dengan obyek, sejalan dengan tujuan, sasaran, jenis penelitian dan masalah yang diteliti, beberapa hal yang menyangkut metode penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

### **F.1. Obyek Penelitian**

Yang menjadi obyek dalam penelitian tentang perberdayaan ekonomi masyarakat melalui potensi zakat adalah kota Surakarta dan dokumen-dokumen yang mengatur tentang zakat. Kota Surakarta dipilih

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, hal. 12-13

sebagai lokasi penelitian berdasarkan teknik pengambilan sampel secara *purpose sampling*, dimana peneliti menggunakan pertimbangan sendiri secara sengaja dalam memilih anggota populasi yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan.<sup>6</sup> Lokasi penelitian ini adalah dilakukan di wilayah kota Surakarta. Hal ini adalah sehubungan dengan pengembangan pemberdayaan ekonominya.

## **F.2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Oleh karena permasalahan yang diteliti adalah masalah hubungan antara faktor yuridis Normatif dan faktor yuridis Sosiologis.

Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian yang diperoleh dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan melihat kehidupan yang senyatanya di masyarakat. Pusat penelitian diarahkan pada aspek-aspek operasional, yaitu pemberdayaan ekonomi melalui potensi zakat di kota Surakarta, sebagai sarana sosial seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound ataupun sebagai sarana pendistribusian dan pengintegrasian seperti dikembangkan oleh Talcott Parson.

## **F.3. Paradigma**

Dalam sebuah karya ilmiah, paradigma merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Paradigma adalah suatu pandangan yang mendasar

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 51

tentang hal yang menjadi pokok persoalan.<sup>7</sup> Dalam suatu kajian ilmu-ilmu sosial yang didalamnya termasuk hukum, aspek-aspek dan gejala-gejala sosiologis tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Dengan pemakaian paradigma ini, dapat diungkapkan aspek sosiologis dari bekerjanya sebuah hukum. Bagaimanapun hukum sebagai aturan dan konsep normatif tapi dalam bekerjanya tidak dapat steril dari aspek sosiologis. Dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa hukum normatif adalah *law in the book* dan aspek sosiologisnya adalah *law in action*. Disinilah dinamisasi hukum, terus berkembang dan berusaha menemukan formulanya di dalam masyarakat.

Dalam penelitian ilmiah ini penulis menggunakan paradigma fenomenologi, yaitu suatu paradigma yang mengedepankan faktor manusia sebagai aksinya dan menghasilkan suatu kreativitas manusia.

#### **F.4. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.<sup>8</sup> Di dalamnya ada upaya-upaya untuk mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel

<sup>7</sup> Rosyidi, Lily, 1992, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 71.

<sup>8</sup> Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 5

yang ada. Dalam penelitian ini tidak menguji hipotesa atau menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendiskripsikan, menginformasikan apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

Penelitian diskriptif ini biasanya menggunakan metode survei.<sup>9</sup> Dikatakan diskriptif karena penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui potensi zakat. Sedangkan secara analitis juga dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pemberdayaan ekonomi rakyat melalui potensi zakat.

#### **F.5. Jenis Dan Sumber Data**

Dalam suatu penelitian sering digunakan dua jenis data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan data adalah :<sup>10</sup>

“Lazimnya di dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (*Primary Data Basic*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*Secondary Data*). Data primer diperoleh langsung dari sumber data pertama yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya”.

Berdasarkan uraian jenis data diatas maka dapat ditentukan sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

<sup>9</sup> Alherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 63

<sup>10</sup> Soekanto, Soerjono, Op. Cit., hal. 12

1. Sumber data Primer adalah para pihak yang terpilih dengan menggunakan pertimbangan data dan juga pengamatan lapangan oleh peneliti secara langsung. Disini adalah para pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan zakat di Kota Surakarta.
2. Sumber Data Sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan juga Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, bahan-bahan kepustakaan, buku-buku dokumen, laporan-laporan, hasil-hasil penelitian yang terpercaya dan memiliki nilai ilmiah dari kalangan akademisi terdahulu, media massa, dan lainnya yang relevan dengan obyek penelitian.

#### **F.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dari sumber diatas dilakukan dengan cara atau teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan sebagai upaya dalam mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi secara langsung. Wawancara ini dilakukan dengan memakai daftar pertanyaan dan dari wawancara diharapkan bisa mendapatkan suatu gambaran atau data yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dalam penelitian.

## 2. Pengamatan Langsung dan Observasi Lapangan

Kegiatan pengamatan langsung dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, termasuk didalamnya saat pengamatan awal, pengumpulan data sekunder yang dilakukan pada obyek terkait dan studi dokumentasi khususnya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.<sup>11</sup>

## 3. Studi Kepustakaan

Penelitian ini melakukan studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian yang merupakan data sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami hukum sebagaimana dimaksudkan dalam penelitian ini.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, sementara data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, seperti buku-buku, laporan-laporan dan media massa.

### F.6. Alat-Alat Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti memerlukan alat-alat pengumpul data. Adapun alat-alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Catatan di lapangan.
2. Tape Recorder
3. Alat-alat tulis

---

<sup>11</sup> Nasir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.



### F.7. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder yang berbentuk kuantitatif dan kualitatif disusun dalam bentuk data yang kemudian akan dianalisis dengan metode analisa data kuantitatif dan kualitatif. Analisis ini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis dan konsisten. Sesuai dengan teknik yang dipakai dan sifat data yang diperoleh. Hasil pengumpulan data ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis taksonomis.<sup>12</sup> Artinya penelaahan yang lebih rinci dan mendalam, yang difokuskan pada masalah-masalah.

Pada analisis ini fokus penelitian diterapkan terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena atau fokus yang menjadi sasaran penelitian. Domain-domain yang dipilih untuk diteliti secara lebih mendalam lagi merupakan fokus studi yang perlu dilacak secara lebih rinci dan mendalam terhadap struktur internal masing-masing domain.<sup>13</sup>

Adanya anggapan sementara bahwa metode kuantitatif dan data kualitatif merupakan suatu ciri utama penelitian dan tanpa kedua hal tersebut suatu penelitian akan kehilangan sifat ilmiahnya. Menurut hemat penulis, anggapan seperti itu perlu dicermati, karena dalam ilmu-ilmu sosial terdapat gejala-gejala atau hambatan-hambatan yang tidak dapat dipelajari secara menyeluruh dan perlu diadakan pencarian data

<sup>12</sup> Sanafiah, Faisal, 1990, *Penelitian kualitatif*, Dasar-Dasar dan Aplikasi; Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, Cet I, hal. 98

<sup>13</sup> Koentjoroningrat, Tanpa Tahun, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta

awal, ditambah rumitnya struktur sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui potensi zakat, bahwa data kuantitatif merupakan data pelengkap.

Data yang diutamakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan hasil pengolahan atau analisis kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Dengan analisis interaktif, maka data yang akan diproses melalui tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>14</sup>

Analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Selama di lapangan analisis data sudah dilakukan. Setelah data terkumpul dilakukan penyajian data untuk melihat dan mengklasifikasikan data yang ada sesuai dengan kebutuhan. Data yang tidak relevan direduksi atau dibuang. Setelah proses ini selesai, dapat dilakukan verifikasi, apabila proses verifikasi belum mantap, peneliti terjun kembali ke lapangan untuk menggali data tersebut. Proses berikutnya dapat langsung ke verifikasi tanpa melalui reduksi data dan penyajian data.<sup>15</sup> Walaupun demikian, seringkali proses analisis yang dilakukan tetap berkisar dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi dan verifikasi.

---

<sup>14</sup> Hadi, Sutrisno, 1973, *Metodologi Riset*, Yayasan penerbit Psikologi UGM, Yogyakarta.

<sup>15</sup> Hadi, Sutrisno, 2000, *Metodologi Research*, Penerbit Andi, Yogyakarta, Jilid 1.

Adapun setelah analisis data selesai, maka hasil penelitian akan disajikan secara deskriptif, yaitu menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan dan data yang diperoleh.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Tesis ini seluruhnya terdiri atas 4 (empat) bab dan disusun dalam sistematika berikut :

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Merupakan suatu bab yang berisi pengantar dan pedoman untuk pembahasan tentang: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Juga berisi metode penelitian yang menguraikan tentang obyek penelitian, metode pendekatan, paradigma, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, alat-alat pengumpulan data serta teknik analisis data.

### **BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA**

Kerangka teori yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat dan hukum pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Akan dikemukakan Hukum Pengelolaan Zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Surakarta dan reinterpretasi zakat dan distribusinya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan. Dalam bab ini pula disertakan saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh di dalam penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Zakat

##### 1. Sejarah Perkembangan Zakat di Indonesia

Sejak Islam datang ke tanah air kita, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa menentang penjajah barat dahulu, zakat terutama bagian *sabilillahnya*, merupakan sumber dana perjuangan. Ketika satu persatu tanah air kita dikuasai oleh penjajah Belanda, pemerintah kolonial itu mengeluarkan *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan pemerintah kolonial mengenai zakat. Yang menjadi pendorong pengeluaran peraturan tentang zakat itu adalah alasan klasik rezim kolonial yakni mencegah terjadinya penyelewengan zakat oleh para pengulu atau *naib* bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan Pemerintah Belanda, tapi tidak diberi gaji atau tunjangan untuk membiayai hidup dan kehidupan mereka beserta keluarganya. Dan untuk melemahkan (dana) kekuatan yang bersumber dari zakat itu Pemerintah Hindia Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat. Larangan ini dituangkan dalam *Bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Tahun pengeluaran *Bijblad* ini hampir bersamaan dengan dinyatakan berakhir (1904) perang Aceh

yang berlangsung puluhan tahun itu. Maksudnya adalah agar para priyayi pribumi di daerah itu terutama, tidak lagi membantu pemungutan dan pengelolaan zakat yang terjadi sebelumnya, sesuai dengan ajaran Islam.

Kendatipun Negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara kita dan pasal undang-undang dasar negara Republik Indonesia memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pemungutan zakat dan pendaayagunaannya. Menurut Prof. Hazairin (almarhum), makna "Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 antara lain adalah bahwa "Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari'at Islam bagi orang Islam, syari'at Nasrani bagi orang Nasrani dan syari'at Hindu Bali bagi orang Bali, sekedar menjalankan syari'at (norma hukum agama) itu memerlukan perantara kekuasaan Negara. Kekuasaan negara yang wajib menjalankan syariat masing-masing agama yang diakui dalam negara Republik Indonesia ini, adalah kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bukan kekuasaan negara berdasarkan *Regerings Reglement* (RR) tahun 1884, (yang kemudian diubah menjadi I (*Indische*) S (*Staatsrgeling*) pada tahun 1925, serta diubah pada tahun 1929), yang menjadi landasan *Bijblad* Nomor 6200 tahun 1905 tersebut diatas. Sebabnya adalah karena syariat yang berasal dari agama yang dianut warga negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan para pemeluknya.

Dalam negara Republik Indonesia ini, syariat Islam yang merupakan kebutuhan hidup para pemeluk agama Islam, dan merupakan norma abadi dari Allah itu, dapat dibagi menjadi tiga kategori. Kategori *pertama* adalah syariat yang mengandung hukum dunia, misalnya hukum perkawinan, hukum waris, hukum zakat, dan hukum pidana. Hukum-hukum itu memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya agar dapat berjalan dengan sempurna. Untuk kepentingan warganya yang beragama Islam (berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945), Negara Republik Indonesia wajib membantu pelaksanaan hukum-hukum yang dimaksud. Kategori *kedua* adalah norma abadi yang memuat syariat hubungan manusia dengan Tuhannya seperti salat dan puasa. Pelaksanaan syariat ini tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara, karena ia merupakan kewajiban pribadi pemeluk agama yang bersangkutan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa antara kategori pertama dan kategori kedua ada syari'at yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan yang memerlukan bantuan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya karena menyangkut berbagai segi dan kepentingan yakni syari'at yang berkenaan dengan ibadah haji. Syari'at yang berkenaan dengan ibadah haji memang merupakan kewajiban pribadi yang dapat dan harus dilakukan oleh umat Islam yang mampu dan mau menunaikannya, namun sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk menunaikan ibadah haji itu, harus dibantu oleh kekuasaan negara. Kategori *ketiga* adalah syari'at yang mengandung

tuntunan hidup kerohanian (iman) dan kesusilaan (akhlak) yang seperti syari'at dalam kategori diatas, tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya. Contoh-contoh tersebut diambil dari syari'at Islam yang ternyata sebagian memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya. Demikian juga dengan syari'at agama Nasrani dan Hindu. Hanya agama Budha yang tidak memerlukan bantuan penguasa untuk menjalankannya, karena menurut beliau, agama Budha Mahayana (di Indonesia) tidak memuat hukum dunia. Menurut Hazairin, jika negara tidak bersedia memikul kewajiban menjalankan sebagian syari'at agama yang berupa hukum dunia itu, maka terjadilah sabotase yang dilakukan oleh pihak negara terhadap kemauan Allah, pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa "Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Kendatipun UUD 1945 tidak berlaku sejak akhir bulan Desember 1949 sampai dengan permulaan Juli 1959, namun jiwanya terus hidup dalam masyarakat. Demikian misalnya, untuk menyebut contoh, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Mr. Jusuf Wibisono (1950) menulis sebuah makalah yang dimuat dalam majalah *Hikmah Jakarta* (1950) mengemukakan gagasannya untuk memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian keuangan Indonesia. Terdapat juga suara-suara di kalangan anggota parlemen (DPRS) pada waktu itu yang menginginkan agar masalah zakat ini diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah atau negara.



Menurut Profesor Hazairin, dalam penyusunan ekonomi Indonesia, disamping komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat kita yaitu gotong royong dan tolong menolong, pengertian zakat seperti yang terdapat dalam Al Qur'an besar sekali manfaatnya kalau dipahami dengan seksama. Mengenai cara pelaksanaannya, kata beliau memang diperlukan perubahan sehingga memenuhi keperluan masa kini dan keadaan di Indonesia. Seharusnya banyak sekali manfaat dari zakat ini, yang antara lain dapat disalurkan pinjaman-pinjaman jangka panjang yang tidak berbunga kepada rakyat miskin guna membangun lapangan hidupnya yang produktif. Bank semacam itu akan dapat memberi solusi dan sekaligus pula menjadi sarana bagi orang-orang miskin yang tidak dapat memperoleh jasa dari bank-bank biasa dengan syarat yang berat serta prosedur yang sukar dilaksanakan rakyat kecil. Zakat yang diorganisasikan dan diselenggarakan dengan baik, akan sangat bermanfaat bukan hanya pada umat Islam, tetapi juga mereka yang bukan muslim.

Sejak Indonesia merdeka, di beberapa daerah di tanah air kita, pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi penyelenggara negara telah ikut serta membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat. Kenyataan ini dapat dihubungkan pula dengan pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata-kata "fakir-miskin" yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan pada para *mustahiq* yaitu mereka yang berhak menerima zakat.

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini, secara kualitatif, mulai meningkat pada tahun 1968. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968, masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan *Baitul Mal* (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya. Setahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1967, pemerintah telah menyiapkan RUU Zakat yang akan diajukan pada DPR dan disahkan menjadi undang-undang. Rancangan Undang-Undang tentang Zakat yang telah disiapkan oleh Menteri Agama ini, diharapkan akan didukung oleh Menteri Sosial (sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945) dan Menteri Keuangan (karena berhubungan dengan pajak). Menteri Keuangan, pada waktu itu, dalam jawabannya kepada Menteri Agama, menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, cukup dengan Peraturan Menteri (Agama) saja.

Beberapa hari setelah Peraturan Menteri Agama itu keluar, Presiden Soeharto, dalam pidatonya pada malam Peringatan *Isra Mi'raj* di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Anjuran presiden itulah yang menjadi pendorong terbentuknya Badan Amil Zakat di berbagai propinsi yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya. Empat belas tahun kemudian, yaitu pada tahun 1982, Presiden Soeharto

melenbagakan anjuran itu dengan membentuk Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila.

Dengan dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, berdirilah Badan *Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah* (disingkat Bazis) pada tahun 1968. Di berbagai daerah tingkat propinsi, setelah itu berdiri pula badan serupa yang dipelopori oleh pejabat atau unsur pemerintah setempat dengan dukungan para ulama dan pemimpin Islam. Dengan demikian terbentuknya Badan Amil Zakat yang bersifat semi pemerintah, umumnya melalui Surat Keputusan Gubernur. Selanjutnya dikenal Bazis atau Baz di Aceh (1975), Sumatera Barat (1973), Sumatera Selatan, Lampung (1975), DKI Jaya (1968), JawaBarat (1974), Kalimantan Selatan (1977), Kalimantan Timur (1972), Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan (1985) dan Nusa Tenggara Barat. Badan ini tampil dengan nama yang berbeda-beda, namun pada umumnya mengambil nama Baz, Bazis, Bazi (dengan infaq), Bakat atau Bazid (ditambah derma) dan nama-nama lain seperti Badan Harta Agama (aceh), Lembaga Harta agama Islam (Sumut), atau Yayasan Dana Sosial Islam (Sumbar). Di berbagai daerah lain, perkembangan zakat itu berbeda-beda.

## 2. Pengaturan Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat dan juga Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

### 3. Pengertian Zakat

Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga ini disebut dalam Al Quran di 28 ayat atau tempat, di dalam kitab-kitab hadist, yang kemudian dikembangkan oleh ijtihad manusia yang memenuhi syarat dalam berbagai aliran (*mazhab*) hukum Islam. Karena itu meskipun istilahnya sama seringkali rumusan dan pengertiannya berbeda (di antara aliran-aliran hukum tersebut).

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata *zaka*, sebagaimana digunakan dalam Al Quran adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab Hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah *nisab*, *haul* dan *kadar*-nya. Menurut hadist, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman

untuk mewakili beliau menjadi gubernur di sana, antara lain Nabi Muhammad menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu.<sup>16</sup> Perkataan zakat disebutkan di dalam Al Qur'an 28 kali banyaknya dan selalu dirangkaikan dengan shalat (sembahyang) yang merupakan rukun Islam kedua. Ini menunjukkan pentingnya lembaga zakat itu, setelah lembaga shalat yang merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan Tuhan. Zakat yang disebut Al Qur'an setelah shalat, adalah sarana komunikasi utama manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Karena itu lembaga zakat ini sangat penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis.<sup>17</sup>

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* = kesuburan, *thaharah* = kesucian, *barakali* = keberkatan dan berarti juga *tazkiyah*, *tathhier* = mensucian. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini.

Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendapatkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu", dengan zakat.

Kedua, zakat, itu merupakan kenyataan suatu jiwa suci dari kikir dan dosa. Al Imam An Nawawi mengatakan, bahwa zakat mengandung

<sup>16</sup> Daud Ali, Muhammad, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 9

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal. 10

makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti : subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafkah, kebaikan dan kebenaran. Demikianlah Ibnul' Arabi menjelaskan pengertian kata zakat.<sup>18</sup>

Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan, bahwa : “lafadh zakat diambil dari kata zakah – yang berarti nama' kesuburan dan penambahan. Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan harta.

Abul Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.

Dan perlu pula diperhatikan bahwa kata sedekah kerap kali digunakan Al Quran dan Al Sunah dalam arti zakat, sebagai yang telah ditegaskan oleh Al Mawardi. Maknanya adalah bahwa kata sedekah itu melambangkan kebenaran iman dan melambangkan pula bahwa orang yang memberi sedekah itu membenarkan adanya pembalasan hari akhir.<sup>19</sup>

Kata zakat dalam Al Qur'an disebutkan secara ma'rifah sebanyak 28 kali. 8 kali diantaranya terdapat dalam surat Makiyah dan selainnya terdapat dalam surat-surat Madaniyah.

---

<sup>18</sup> Hasbi ash Shiddieqy, Tengku Muhammad, 1999, *Pedoman Zakat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, hal. 3

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal. 4

Menurut Al Mawardi dalam kitab Al Hawi adalah : “ Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu”.

Menurut Asy Syaukani bahwa Zakat adalah “ memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan suatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.

Sedangkan menurut Az Zarkani dalam Syarah Al Muwaththa' menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlash dan syaratnya adalah sebab, cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akherat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.<sup>20</sup>

#### **a. Prinsip-Prinsip Zakat**

Menurut M.A. Mannan dalam bukunya Islamic Economic:<sup>21</sup> Theory and practice (Lahore, 1970 : 285), zakat mempunyai enam prinsip, yaitu (1) prinsip keyakinan agama (faith), (2) prinsip pemerataan (equity) dan keadilan, (3) prinsip Produktifitas (productivity) dan kematangan, (4) prinsip nalar (reason), (5) prinsip kebebasan (freedom), (6) prinsip etik (ethic) dan kewajaran.

Pada prinsip pertama, yaitu keyakinan keagamaan, menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal. 5

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal 39

merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya. Prinsip kedua, pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membuat lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia. Prinsip ketiga, produktifitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil (produksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu. Prinsip keempat nalar dan prinsip kelima kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas yang sehat jasmani dan rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang sedang menderita sakit jiwa. Prinsip yang keenam adalah etik dan kewajaran, yang menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita (Mubyarto, 1986: 33).

#### **b. Falsafah Zakat**

Menurut Ahmad M. Saefuddin (A.M. Saefuddin, 1984: 19, lihat juga Monzer Kahf Hal. 18), ada tiga asas filsafat ekonomi Islam,



yaitu : <sup>22</sup> (1) semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam yang ada padanya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai manusia adalah milik Allah, karena Dia-lah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-ketentuannya. Manusia sebagai khalifah-Nya (wakil Allah untuk mengelola bumi ini) berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya. Ini berarti hak manusia atas sumber-sumber alam dan harta kekayaan yang ada padanya adalah terbatas pada hak pengurusan dan pemanfaatannya saja, sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah sebagai pencipta dan pemilik alam semesta ini. Ajaran yang menyatakan bahwa Allahlah yang merupakan pemilik dan pencipta alam semesta, langit dan bumi, serta sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya merupakan landasan nilai-nilai sistem ekonomi Islam, (2) Allah itu Maha Esa, Dialah pencipta makhluk yang ada di alam semesta dan salah satu ciptaannya adalah manusia yang diberi alat kelengkapan sempurna melebihi makhluk ciptaan-ciptaan yang lain, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya sebagai khalifah Allah di bumi. Semua makhluk lain terutama flora dan fauna ditundukkan Allah kepada manusia, agar semua itu dapat dimanfaatkan oleh manusia bagi kepentingan hidup dan kehidupannya. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia

---

<sup>22</sup> Daud Ali, Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 5

yang berasal dari substansi yang sama, wajib saling bantu-membantu dan bekerja sama terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan persamaan dan persaudaraan, (3) Beriman pada hari akhir dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari akhir atau hari kiamat merupakan asas yang penting dalam Sistem Ekonomi Islam karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia di muka bumi ini akan dapat terkendali, karena ia sadar bahwa semua tindakannya, termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah, Tuhan yang maha kuasa. Pertanggungjawabannya tidak hanya mengenai tingkah laku ekonominya saja, tetapi juga mengenai harta kekayaan yang 'diamanatkan' Allah kepada manusia. Dari ketiga asas pokok filsafat ekonomi Islam inilah melahirkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam, termasuk didalamnya adalah dalam pengelolaan zakat.

#### c. Dalil-Dalil Zakat

Yang dimaksud dengan dalil-dalil dalam hubungan ini adalah dasar-dasar hukum zakat, baik yang terdapat dalam Al Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadist. Dalil-dalil yang terdapat dalam kedua sumber hukum Islam itu disebut dengan dalil-dalil *naqli*, sedang dalil-dalil yang lahir dari ijtihad manusia dinamakan dalil *aqli*. Berikut ini adalah contoh dalam dalil *naqli* dan keutamaan zakat yang terdapat di dalam Al Qur'an, yaitu:

- 1) Hendaklah manusia mencari rejeki yang halal dan baik (Q.s. 2:168);

- 2) Harta kekayaan hendaklah menjadi sarana menuju kebaikan hidup di akhirat (Q.s. 28:77);
- 3) Allah melarang orang menimbun emas dan perak tanpa mempergunakannya untuk kepentingan agama dan masyarakat (Q.s. 9:34);
- 4) Allah melarang memakan hak orang lain secara tidak sah (Q.s. 2:188) dan melarang riba berlipat ganda (Q.s. 3:130);
- 5) Di dalam harta kekayaan seseorang terdapat hak orang yang meminta-minta dan hak orang (miskin) (Q.s. 51:19);
- 6) Allah memerintahkan manusia agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (Q.s. 4:58). Dalam Islam, harta adalah amanat Allah.
- 7) Allah menggembirakan (hati) orang yang suka mendermakan hartanya di jalan Allah dan memberikan pahala berlipat ganda di dunia dan akhirat (Q.s. 2:245);
- 8) Orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah 'adalah seperti menanam benih yang kemudian tumbuh menjadi tujuh tangkai dan pada setiap tangkai melahirkan seratus biji atau buah (Q.s. 2:261);
- 9) Menampakkan sedekah dengan tujuan untuk dicontoh orang lain adalah baik. Tetapi menyembunyikan adalah lebih baik lagi, supaya tidak menimbulkan riya/pamer pada pemberi dan sakit hati pada penerima (Q.s. 2:271);
- 10) Dalam membelanjakan harta, janganlah manusia terlalu kikir dan janganlah terlalu pemurah (Q.s. 17:29);
- 11) Tuhan menjadikan kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat agar manusia saling tolong-menolong (Q.s. 43:32);
- 12) Adalah sama dengan mendustakan agama, bila orang melantarkan dan tidak memberi makan anak yatim (Q.s. 107:1-2);
- 13) Allah memerintahkan orang-orang beriman mengeluarkan sebagian dari harta bendanya untuk kebajikan (zakat). Yang dikeluarkan itu hendaknya yang berkualitas baik, bukan yang buruk-buruk (Q.s. 2:267);
- 14) Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, riqap, gharim, sabilillah* dan orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnussabil*) (Q.s. 9:60);
- 15) Dilihat dari segi pengabdian kepada Allah, menunaikan zakat bukanlah memberikan sesuatu pada Tuhan, melainkan mempersembahkan ketakwaan dengan melaksanakan perintah Tuhan (Q.s. 22:37);

Di samping yang terdapat di dalam Al quran itu, dapat juga diajukan beberapa dalil *naqli* yang terdapat di dalam kitab-kitab hadist, yaitu antara lain:

- 1) Orang kaya yang bersyukur lebih baik dari pada orang yang miskin tetapi kufur;
- 2) Kemiskinan mendorong orang pada kekufuran yaitu sifat mengingkari dan lupa pada kebenaran;
- 3) Menolong janda miskin sama nilainya dengan melakukan jihad di jalan Allah;
- 4) Senyum yang kamu berikan pada saudaramu, menganjurkan berbuat baik dan mencegah kejahatan, menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat, menyingkirkan duri dari jalan, menuntun orang lemah adalah sedekah;
- 5) Ketika seorang menanyakan pendapat Muhammad mengenai cara membelanjakan hartanya, Nabi menjawab: keluarkan zakat dari hartamu, sebab zakat adalah suci dan akan mensucikan kamu. Dengan zakat kamu akan dapat menyambung tali silaturahmi dengan kerabat, tetangga, peminta-minta dan menghormati hak orang miskin.

#### d. Asas dan Tujuan Zakat

Yang dimaksud dengan asas zakat adalah berlandaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang dimaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut selain yang telah disinggung diatas, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup dan penderitaan;
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnussabil* dan *mustahiq* lainnya;
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan loba pada para pemilik harta;
- 5) Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin;
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta;
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya;
- 9) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

#### e. Hikmah Zakat

Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohaniyah dan filosofis. Hikmah itu digambarkan dalam berbagai ayat Al quran (2 : 261, 2 : 267, 9 : 103, 30 : 39) dan Hadist. Diantara hikmah-hikmah itu adalah:

- 1) Mensyukuri karunia Illahi, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan dengki;
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan;
- 3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia;
- 4) Manifestasi kegotong-royongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa;
- 5) Mengurangi kefakir-miskin yang merupakan masalah sosial
- 6) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial;
- 7) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

#### f. Syarat-Syarat Zakat

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai seorang muslim. Syarat-syarat itu adalah:

- 1) Pemilikan yang pasti. Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya;
- 2) Berkembang. Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunatullah (hukum alam) maupun karena ikhtiar dan usaha manusia;
- 3) Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia;
- 4) Bersih dari hutang. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia;
- 5) Mencapai *nisab*. Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya; Mencapai *haul*. Artinya harus mencapai

waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.

#### **4. Macam-Macam Zakat dan Penerima Zakat**

##### **a. Macam-macam Zakat**

Sebagaimana telah disebut juga diatas, zakat terdiri dari :

- 1) zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu, dalam jumlah minimal tertentu;
- 2) zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam hari dan hari raya Idul Fitri.

##### **1) Zakat Harta**

Pada umumnya di dalam kitab-kitab hukum fikih Islam harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam kategori (1) emas, perak dan uang (simpanan), (2) barang yang diperdagangkan, (3) hasil peternakan, (4) hasil bumi, (5) hasil tambang dan barang temuan. Masing-masing kelompok itu berbeda nisab *haul* dan *kadar* zakatnya.

##### **a) Emas, Perak dan Uang**

Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak dan uang adalah Al Qur'an Surat 9 ayat (35). Dimiliki secara pasti selama satu tahun penuh dan telah

sampai pada *nishabnya* (timbangannya). *Nishab* emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni. Setelah dimiliki selama satu tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar dua setengah persen. Nisab perak adalah 200 dirham, beratnya sama dengan lebih kurang 672 gram. Berdasarkan beberapa hadist, emas dan perak yang menjadi perhiasan wanita yang cukup senisab dan dimiliki cukup setahun pula, hendaklah dikeluarkan zakatnya dua setengah persen. Nisab uang baik *giral* maupun *chartal*, adalah sama dengan nilai emas. Bila disimpan cukup setahun, zakatnya adalah dua setengah persen.

b) Barang yang Diperdagangkan

Yang menjadi dasar hukum wajib zakat bagi barang dagangan adalah Al Qur'an Surat 2 ayat (267) dan hadist nabi. Setiap tutup buku dan perdagangan berjalan satu tahun, uang yang ada dan semua barang yang ada dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya dua setengah persen, nisabnya sama dengan nilai harga emas 96 gram. Kini zakat perdagangan ini diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.

c) Hasil Peternakan

Dasar hukum wajib zakat bagi binatang ternak adalah hadist nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan

sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, dan sampai nisabnya. Kadar zakatnya berbeda-beda menurut table tertentu. Ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing atau biri-biri, sapi dan kerbau. Nisab kambing adalah 40 ekor. 40 sampai 120, zakatnya 1 ekor kambing, 121 sampai dengan 200 zakatnya 2 ekor, 201 sampai dengan 300 zakatnya 3 ekor. Selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor. Nisab sapi adalah 30 ekor. 30 sampai 39 zakatnya 1 ekor sapi berumur setahun lebih, 40 sampai 59 zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih. 60 sampai 69 zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 70 sampai 79 zakatnya 2 ekor sapi, 1 ekor berumur setahun dan 1 ekor lagi berumur dua tahun lebih. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur setahun lebih dan seterusnya. Patokannya adalah 30 dan 40. Nisab kerbau sama dengan sapi, demikian juga dengan kadar zakatnya. Mengenai nisab unta, berhubung tidak ada peternakan unta di Indonesia, maka tidak penulis sebutkan disini.

#### d) Hasil Bumi

Dasar hukum bagi zakat hasil bumi adalah Al Qur'an Surat 2 ayat (267) dan Surat 6 ayat (141), serta hadist Nabi Muhammad dari Abi Burdah. Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar zakatnya lima persen untuk hasil



bumi yang diairi atas usaha penanam sendiri dan sepuluh persen untuk penanaman tadah hujan tanpa usaha yang menanan. Menurut para ahli dalam Mazhab Syafii, hasil bumi yang dizakati adalah hasil bumi yang berupa makanan pokok manusia saja seperti gandum, jelai, kurma dan anggur kering, seperti yang disebutkan dalam hadist dari Abi Burdah diatas. Keempat jenis hasil bumi itu tidak terdapat di Indonesia, dan karena itu “apa yang kami keluarkan di bumi itu, untuk kamu” seperti yang disebut dalam Al Qur’an Surat 2 ayat (276) itu oleh ahli hukum Islam Indonesia dirinci sesuai dengan keadaan di Indonesia. Di tanah air kita selain hasil bumi, juga hasil laut perlu dikeluarkan zakatnya.

e) Hasil Tambang dan Barang Temuan ( Makdim dan Rikaz)

Dalam kitab-kitab hukum (fikih) Islam, barang tambang yang wajib dizakati adalah hanyalah emas dan perak saja. Demikian juga dengan barang temuan; yang dizakati terbatas pada emas dan perak saja. Dasar hukumnya berasal dari Al Qur’an Surat 9 ayat (935) tersebut diatas. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang-barang tambang adalah setiap kali barang itu selesai dibersihkan (diolah). Nisab barang tambang adalah sama dengan nisab emas (96 gram) dan perak (672), kadarnya pun sama, yaitu dua setengah persen. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. Nisab barang temuan sama

dengan nisab emas dan perak. Demikian juga kadarnya, di Indonesia temuan atas benda-benda kuno dan harta karun adalah menjadi milik negara. Penemunya biasanya mendapat hadiah dari pemerintah.

Mengenai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya ini perlu dicatat bahwa barang yang menjadi zakat harta itu, seperti ternak, padi misalnya, harus baik walaupun bukan yang terbaik dalam jenisnya. Sekurang-kurangnya sama kualitasnya.

## **2) Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah usai menunaikan ibadah puasa. Zakat fitrah ini selain untuk menggembirakan fakir-miskin, juga untuk mensucikan dosa-dosa kecil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan ibadah puasa, agar orang-orang itu benar-benar kembali dalam keadaan fitrah, suci seperti ketika lahir ke dunia ini. Orang Islam yang mempunyai bahan makanan pokok lebih dari dua setengah kilo pada waktu itu, wajib membayar zakat fitrah sebagai upaya pendidikan agar orang gemar membelanjakan hartanya untuk kepentingan orang lain, kendatipun setelah mengeluarkan zakat fitrah itu ia berhak menerima bagian yang mungkin lebih besar dari yang ia keluarkan.

### **b. Penerima Zakat**

## b. Penerima Zakat

Yang berhak menerima zakat menurut ketentuan Al Qur'an Surat 9 (at-Taubah) ayat (60), adalah (1) *fakir*, (2) *miskin*, (3) *'amil*, (4) *muallaf*, (5) *riqab*, (6) *gharim*, (7) *sabilillah*, dan (8) *ihnussabil*. Penjabaran rumusan kedelapan golongan tersebut dilakukan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad dalam berbagai aliran hukum Islam. Oleh karena itu kadangkala rumusannya berbeda. Di Indonesia, tidak ada *riqab* dalam pengertian semula, oleh karena itu diisi dengan pengertian baru yaitu pembebasan manusia dari perbudakan lintah darat, pengijon dan rentenir. Perumusan tentang penerima zakat yang lain juga disesuaikan dengan keadaan di Indonesia dan perkembangan masa kini. Ayat Al Qur'an tersebut diatas hanya menyebutkan kelompok-kelompok masyarakat yang berhak menerima, yang dalam hukum fikih Islam dikenal dengan *ashnafisamaniyyah* atau kelompok delapan. Perumusan dan pengaturan pembagiannya lebih lanjut diserahkan kepada ijtihad manusia, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta kemaslahatan masyarakat

Jika delapan golongan atau kelompok tersebut dalam Surat At-Taubah ayat (60) itu dikelompokkan lagi, akan terdapat tiga hak dalam zakat. Hak-hak itu adalah: (1) hak fakir-miskin, (2) hak masyarakat, dan (3) hak Allah. Penjelasan adalah bahwa hak fakir-miskin merupakan hak yang essensial dalam zakat karena Tuhan telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang sesungguhnya ada hak orang-orang miskin (Q.s. 70 : 24,25), baik yang

meminta-minta maupun yang diam saja; (2) Hak masyarakat juga terdapat dalam zakat, karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang sesungguhnya berasal dari masyarakat juga, terutama kekayaan yang diperoleh melalui perdagangan dan badan-badan usaha. Hak masyarakat itu harus dikembalikan kepada masyarakat terutama melalui saluran *fisabilillah*. Dalam harta kekayaan seseorang terdapat hak masyarakat.(Q.s. 51 : 19); Hak Allah, karena sesungguhnya harta kekayaan seseorang itu adalah hak milik mutlak Allah, yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati, dimanfaatkan dan diurus sebaik-baiknya. Menyebutkan zakat sebagai hak Allah adalah mendudukkan zakat sebagai ibadah *Khassah* (ibadah Khusus) yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dalam rangka melaksanakan perintah Allah.

Yang tidak boleh menerima zakat adalah kelompok orang-orang berikut:

- 1) keturunan Nabi Muhammad, berdasarkan hadist;
- 2) Kelompok orang kaya;
- 3) Keluarga *muzakki*, yaitu keluarga orang-orang yang mengeluarkan zakat, keluarga dari garis lurus keturunan ke atas dan ke bawah;
- 4) Orang yang sibuk beribadah sunnat untuk kepentingan diri sendiri, tetapi melupakan kewajibannya mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya;

- 5) Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak kehadiran ajaran agama. Mereka disebut *mulhid* atau *atheis*.

## 5. Organisasi Pengelola Zakat

Pada zaman Nabi Muhammad, dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Maal. Baitul Maal ini memiliki tugas dan mengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, kharaq, jizya, ghanimah, fai dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk asnaf mustahik yang telah ditentukan, untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Selama masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, lembaga baitul maal mengalami perubahan yang cukup besar dengan dioperasikannya sistem administrasi yang dikenal dengan "Ad Diwaan".

Namun saat ini pengertian baitul maal tidak lagi seperti di zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Tetapi mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang mengelola dana-dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf atau lebih dikenal dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Kenyataan di Indonesia menunjukan organisasi pengelola zakat telah ada sejak dulu. Entah dalam bentuk pesantren, yayasan-yayasan sosial maupun bentuk-bentuk lainnya. Lembaga-lembaga ini biasanya menerima dana zakat, infaq, shadaqah, maupun dana wakaf dari

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal.40

masyarakat yang kemudian disalurkan melalui berbagai program sosial, seperti pembangunan masjid dan pesantren, program dakwah, bantuan kepada anak yatim, serta berbagai program sosial lainnya.

## **6. Beberapa Permasalahan Zakat di Indonesia**

Makin hari makin besar harapan umat Islam di Indonesia agar pelaksanaan pemungutan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Harapan ini diungkapkan dalam berbagai kesempatan oleh para pemimpin Islam, baik yang mempunyai kedudukan formal maupun informal. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya, baik oleh badan-badan resmi seperti Departemen Agama, Pemerintah Daerah maupun oleh organisasi-organisasi Islam swasta.

### **a. Zakat dan Pajak**

Dari definisi-definisi yang dirumuskan oleh para ahli dalam kitab-kitab hukum fikih Islam tentang zakat dapat disimpulkan bahwa zakat pada hakekatnya adalah bagian tertentu yang ada pada harta orang Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang ditentukanNya. Pengeluaran itu diwajibkan sebagai tanda syukur manusia atas nikmat dan karunia Tuhan, mendekatkan diri kepadanya dan juga sebagai pembersih harta itu sendiri serta diri muslim yang melaksanakannya. Pajak, pada hakekatnya adalah kewajiban material seorang warga negara pada negaranya untuk dibayar menurut ukuran yang telah

ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seseorang, dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dengan demikian zakat dan pajak mempunyai persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Persamaannya terlihat antara lain pada pembebanan kewajiban itu atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang dan pada pribadi orang yang bersangkutan. Perbedaannya nyata antara lain pada:

- 1) zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan oleh Tuhan, sedangkan pajak adalah kewajiban warga negara yang ditentukan pemerintah,
- 2) yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang-orang Islam, sedang yang wajib membayar pajak tidak hanya orang-orang Islam saja, tetapi semua warga negara dan orang asing tanpa memandang agama yang dipeluknya,
- 3) yang berhak menerima zakat sudah tertentu kelompoknya, sedang yang berhak menikmati pajak adalah semua penduduk dalam suatu negara,
- 4) sanksi tidak membayar zakat adalah dosa, karena tidak memenuhi perintah Tuhan dan rasulnya, sedang sanksi tidak membayar pajak adalah denda atau hukuman,
- 5) zakat tidak mungkin dihapuskan karena merupakan rukun Islam yang ketiga, sedang pajak mungkin saja diganti atau dihapuskan tergantung pada pertimbangan pemerintah dan keuangan negara.

Dari uraian tersebut diatas, jelas perbedaan zakat dengan pajak. Karena itu, dalam Islam, tidaklah mungkin menggantikan zakat dengan pajak. Yang mungkin adalah memadukannya antara lain dengan memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayar seseorang. Untuk mereka yang wajib menunaikan zakat dan sekaligus menjadi wajib pajak, cara ini akan dapat diterima karena menurut keyakinan mereka kewajiban agama telah mereka penuhi bersamaan dengan pemenuhan kewajiban terhadap negara. Namun cara ini hanya mungkin dapat dilaksanakan apabila orang jujur membayar pajaknya. Artinya orang tidak menyembunyikan jumlah harta kekayaan dengan berbagai upaya, supaya tidak dikenakan pajak. Zakat yang wajib dizakati tidak mungkin disembunyikan karena orang yakin perhitungannya diketahui oleh Allah. Jumlah zakat yang dihitung secara benar itu, dikhawatirkan akan digunakan oleh petugas pajak sebagai alat menelusuri kekayaan seseorang yang sesungguhnya. Oleh karena itu, masalah zakat dan pajak ini masih memerlukan pemecahan, terutama bila dihubungkan dengan kehidupan bernegara di zaman sekarang ini. Namun demikian perlu dicatat bahwa sejak 15 Agustus 1976, pengeluaran-pengeluaran wajib pajak kepada badan-badan yang mengurus zakat, infaq dan shadaqah, seperti Baziz DKI Jaya misalnya, dibebaskan dari pajak pendapatan dan pajak perseroan. Sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada Badan Amil Zakat itu



dapat dimasukkan dalam komponen biaya, tetapi jumlahnya hanya tiga persen saja.

#### **b. Zakat dan Negara**

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir-miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Ajaran ini berasal dari perintah Allah kepada Nabi Muhammad, agar Nabi memungut zakat dari harta orang-orang kaya (Q.s. 9 : 103), juga berdasarkan perintah Nabi Muhammad kepada Muaz yang menjadi gubernur di Yaman agar ia memungut zakat dari orang-orang kaya dan kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin.

Cara pemindahan atau pemerataan kekayaan seperti ini dimaksudkan agar orang kaya tidak merasa zakat yang dikeluarkannya sebagai kebaikan hati, bukan kewajiban dan fakir-miskin tidak berhutang budi pada orang kaya karena menerima zakat. Zakat pada hakekatnya adalah distribusi kekayaan dikalangan umat Islam, untuk mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dan menghindari penumpukan kekayaan di tangan seseorang. Dan apabila zakat dipungut oleh negara, keuntungannya adalah sebagai berikut:

- 1) Para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir-miskin lebih terjamin haknya;
- 2) Perasaan fakir-miskin lebih dapat dijaga, tidak merasa seperti orang yang meminta-minta;

- 3) Pembagian zakat akan menjadi lebih tertib;
- 4) Zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti sabilillah misalnya, dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.

## B. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dikenal dengan sebutan *empowerment* berasal dari kata *empower* (*em+power*), yang berarti: (i) “to give (someone) the power or legal right to do something”,<sup>24</sup> dan (ii) “to invest with legal power; authorize or to enable or permit”. Hampir mirip dengan itu, Salim memberikan arti *empower* sebagai: (i) memberi kuasa; dan (ii) mengizinkan atau membolehkan.<sup>25</sup> Tampaknya Salim memaksudkan *empower* sebagai memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan sebagaimana dikehendaki, sehingga penerima kuasa merasa bertindak seperti pemberi kuasa.

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya, mendapat awalan “ber” menjadi bentuk dasar berdaya, kemudian berubah menjadi kata benda pemberdayaan setelah mendapat imbuhan “per-an”. Menurut arti kamus, daya setidaknya mempunyai 3 (tiga) arti, yaitu: (i) kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak; (ii) kekuatan, tenaga; dan (iii) akal.<sup>26</sup> Berdaya berarti (i) berkekuatan, berkemampuan, bertenaga; dan (ii)

<sup>24</sup> Longman, *Longman Dictionary of English Language and culture*, Longman Group UKlimited, Harlow, hal.419.

<sup>25</sup> Peter Salim, 1996, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, Hal.1445.

<sup>26</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 131.

menempatkan akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu.<sup>27</sup> Pemberdayaan dengan demikian adalah tindakan untuk menjadikan suatu keadaan sehingga menjadi lebih berdaya daripada sebelumnya.

Merriem Webster's memberikan arti *empower(ment)* (n) sebagai: *to give official authority or legal power to*; dan (ii) *to promote the self - actualization or influence of*.<sup>28</sup>

Pemberdayaan tidak mesti harus diberikan oleh orang/institusi yang memiliki kekuasaan atau (*power*), namun berdasarkan pengertian ini ia dapat mengembangkan serta mempergunakan pengaruhnya untuk membuka dirinya sendiri menjadi berdaya, berkemampuan serta bertenaga dalam menyelesaikan sesuatu hal. Agak berbeda dengan pengertian sebelumnya, campur tangan langsung dari pemerintah (pemilik *power*) tidak begitu diperlukan disini, akan tetapi pemerintah lebih cenderung bertindak dengan membuat kebijaksanaan yang berpihak dan dapat diakses oleh kalangan masyarakat lemah (*powerless*).

Clarence L. Barnhart dan Robert K. Barnhart (Ed.) memberikan pengertian *empowerment* sebagai *the act of empowering* atau *state of being empowered*.<sup>29</sup> Pengertian ini didasarkan pada kenyataan bahwa tindakan *empower* sebenarnya adalah *to give power* atau *authority to*<sup>30</sup> (*authorize*), yaitu memberikan kekuatan atau kewenangan kepada pihak lain. Kekuasaan diberikan oleh orang atau badan yang memiliki *power*, baik di bidang sosial,

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hal. 214.

<sup>28</sup> Merriam Webster's, 1998, *Merriam webster's collegiate dictionary*, Merriam webster's Incorporated, Springfield-Massachussetts, hal.378.

<sup>29</sup> Clarence L. Barnhart dan Robert K. Barnhart (ed), 1988, *The world Book Dictionary Volume Two L-Z*, World Book Inc, Chicago, Hal.1683.

<sup>30</sup> *Ibid.*

politik, ekonomi maupun hukum. Sementara pihak lain menerima pelimpahan kekuasaan dan kewenangan untuk menjalankan aktifitas-aktifitasnya agar semakin lebih berdaya.

Pemberdayaan dengan demikian dapat dimaksudkan sebagai upaya seseorang atau lembaga untuk menyerahkan sebagian kekuasaan (kewenangan) kepada orang (lembaga) lain sesuai dengan maksud dan tujuan pemberi kuasa dan penerima kekuasaan itu. Inisiatif tidak mesti berasal dari orang (lembaga) yang memiliki kekuasaan (kewenangan), akan tetapi dapat juga berasal dari orang (lembaga) yang tidak memiliki kekuasaan (kewenangan), dengan kata lain ia dapat mengembangkan dirinya sendiri (*to promote self-actualization*).

Pemberdayaan ekonomi harus memiliki peranan sentral sebagai sebuah sistem yang bekerja secara teratur dan berkesinambungan dalam membentuk totalitas yang padu antara maksud dan kehendak pemerintah (negara) dengan masyarakatnya. Dalam konteks ke-Indonesiaan, pemberdayaan yang demikian itu tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi yang selama ini bekerja dan varian-varian yang terjadi terhadap sistem perekonomian Indonesia. Untuk mengkajinya diperlukan pemahaman yang utuh tentang apa sebenarnya sistem itu sendiri dan bagaimana sistem perekonomian Indonesia selama ini berjalan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, terdapat 3 (tiga) pengertian sistem, yaitu: (i) seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk satu totalitas; (ii) susunan yang teratur dari pandangan,

teori, asas dan sebagainya, misalnya sistem parlementer, sistem ekonomi dan sistem demokrasi; dan (iii) metode (misalnya sistem pendidikan).<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Poerwadarminta, sistem juga memiliki 3 (tiga) pengertian sebagai berikut: (i) sekelompok bagian-bagian (alat, dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud (misalnya sistem pemerintahan); (ii) sekelompok dari pendapat, peristiwa, kepercayaan dan sebagainya yang disusun dan diatur baik-baik (misalnya sistem filsafat); dan (iii) cara (metode) yang teratur untuk melakukan sesuatu (misalnya sistem pengajaran bahasa).<sup>32</sup>

Chester A. Bernard (dalam Nicholson) yang menyatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistic yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Masing-masing bagian itu memiliki keterkaitan yang saling mendukung dalam sistem yang holistic tersebut.<sup>33</sup>

Clarence L. Barnhart dan Robert K. Barnhart (Ed) sejalan dengan pendapat Salim yang menyatakan bahwasanya sistem apabila dikaitkan dengan sesuatu negara maka ia akan memiliki pengertian sebagai "jaringan lembaga politik, ekonomi dan sosial yang mengendalikan suatu negara atau struktur kekuasaan."<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Tim penyusun Kamus Pembinaan dan pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Depdikbud, Op. Cit., Hal. 950-951.

<sup>32</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 955

<sup>33</sup> Henry Niholson, 1993, Sistem Administrasi Negara Baru, LP3ES, Jakarta, Hal. 47

<sup>34</sup> Peter, Salim, Op.cit., Hal. 1445.

Longman mengatakan sistem diartikan sebagai *an ordered set of ideas, methods, or ways of working dan the use of orderly methods*.<sup>35</sup>

Pengertian dasar yang terkandung di dalam kata sistem, sebagaimana dirangkum oleh William A. Schrode dan Dan Voich (dalam Satjipto) adalah sebagai berikut :

- (i) sistem berorientasi kepada tujuan;
- (ii) keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism*);
- (iii) suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (*keterbukaan sistem*);
- (iv) bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (*transformasi*);
- (v) masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (*keterhubungan*); serta
- (vi) ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (*mekanisme control*).<sup>36</sup>

Dasar pengertian yang tercakup didalamnya meliputi juga serangkaian fakta-fakta, kepercayaan-kepercayaan, bagian-bagian objek, asas-asas, yang membentuk suatu keseluruhan yang koheren, yang tersusun secara teratur yang bekerja sama menurut tujuan tertentu, yang terikat dalam satu kesatuan, yang satu sama lain saling mengkait dan fungsional.<sup>37</sup>

Lebih jauh, sistem (*system*) merupakan kata serapan bahasa Latin Kuno (*Late Latin*) *systema*, bahasa Yunani (*Greek*) *sustema* (*systema*) yang *berate a composite whole*, berasal dari kata *sunistanai* (*synistanai*) yang

<sup>35</sup> Longman, Op. Cit., Hal. 1345.

<sup>36</sup> Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 48-49.

<sup>37</sup> Tom Gunadi, Tanpa Tahun, Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945, Angkasa, Bandung, Hal. 27.

berarti *to bring together*, yaitu kombinasi dari kata *sun (syn)* + *histanai*. *Sun* berarti *together* dan *histanai* berarti *to cause to stand*<sup>38</sup>, *place*<sup>39</sup>, dan *to set*.<sup>40</sup>

Dengan beberapa pengertian tersebut di atas, sistem menunjuk pada seperangkat unsur yang berlandaskan tata nilai tertentu secara utuh (*holistic*) yang terdiri atas berbagai struktur, jaringan dan metode dimana masing-masing bagian tersebut saling berhubungan, bekerjasama dan mempengaruhi berdasarkan batasan dan ciri tertentu. Dengan kata lain sistem merupakan suatu totalitas terpadu yang terdiri atas unsur-unsur yang saling terkait menuju suatu tujuan tertentu.

Sistem memiliki 2 (dua) pengertian penting untuk dikenali. *Pertama*, pengertian sistem sebagai jenis satuan (tatanan) tertentu yang menunjuk pada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. *Kedua*, sistem sebagai suatu rencana, metoda atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Pemberdayaan melalui sistem dapat berjalan efektif manakala ia: (i) menghasilkan sesuatu yang rasional dan memuaskan bagi pihak-pihak yang berkepentingan; (ii) dapat memberikan keyakinan bahwa masyarakat mempunyai kepentingan terhadap sistem tersebut; dan (iii) berguna dalam arti dapat diterapkan serta mempunyai kekuasaan pelaksanaannya.

<sup>38</sup> William Morris (Ed), 1981, *The American Heritage Dictionary of the English Language*, Houghton Mifflin Company, Boston, Hal. 1306.

<sup>39</sup> Clarence L. Barnhart dan Robert K. Barnhart (Ed), *Op. Cit.*, Hal 2131.

<sup>40</sup> David B. Guralnik, (Gen. Ed), 1975, *Webster's New World Dictionary*, Oxford and IBH Publishing Co, New Delhi, Hal. 760.

## 1. Pemberdayaan Sistem Ekonomi Masyarakat

Pemerintahan memiliki ciri (kekhasan) mengenai sistem-sistem ekonomi yang dianut dan dipergunakan sebagai landasan dalam membangun bangsa dan negaranya. Ciri ini ditandai dengan adanya lembaga-lembaga (pranata-pranata) sosial dan bagaimana ia berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk suatu pranata-pranata ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lainnya dalam membangun suatu sistem ekonominya.

Pembangunan sistem dipengaruhi oleh sejumlah kekuatan (*set of moulding forces*) yang saling berinteraksi, diantaranya adalah: (i) falsafah dan ideology negara, termasuk cara masyarakatnya berteori untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan nasionalnya; (ii) nilai-nilai moral dan adat kebiasaan; (iii) ilmu pengetahuan; (iv) karakteristik demografi; (v) norma-norma estetik dan kebudayaan; (vi) sistem hukum; (vii) sistem politik; dan (viii) sub-sistem sosial (pengalaman sejarah).<sup>41</sup>

Suranyi-Unger (dalam Gunawan) mengatakan sistem ekonomi adalah “keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa atau negeri dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan”.<sup>42</sup>

Pengertian lembaga atau institusi ekonomi sendiri menurut Louck (dalam Gunawan) adalah “pedoman, aturan atau kaidah yang

<sup>41</sup> Bachrawi Sanusi, 2000, *Sistem Ekonomi (Suatu Pengantar)*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 11.

<sup>42</sup> Gunawan Sumodiningrat, 1999, *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif*, Impac Wahana Cipta, Jakarta, Hal. 8.



dipergunakan seseorang atau masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha ekonominya, yaitu dalam melakukan produksi, distribusi dan atau konsumsi terhadap barang-barang dan jasa".<sup>43</sup>

Institusi itu sendiri dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) macam pengertian, yaitu sebagai: (i) produk hukum tertulis, seperti Tap MPR, UU, PP, Keppres, Peraturan Daerah (Perda), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) suatu organisasi, perjanjian dagang, dan lain-lain; serta (ii) produk hukum tidak tertulis, seperti: kebiasaan, adat istiadat, cara-cara yang biasa dilakukan masyarakat dalam melaksanakan produksinya, distribusi dan konsumsi.<sup>44</sup> Dengan kata lain, lembaga adalah entitas (entity) dimana suatu perekonomian sosial menggantungkan dirinya pada sekumpulan norma, perangkat, rule, pedoman tingkah laku atau cara berpikir yang sudah mapan.

Winardi, merangkum pendapat John F. Due, Theodore Morgan, Henry Pratt Fairchild dan H.M.H.A. van der Valk, sistem ekonomi adalah

Sebuah organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau pranata (ekonomi, sosial-politik, ide-ide) yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya yang ditujukan kearah pemecahan masalah-masalah produksi-distribusi-konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian.<sup>45</sup>

Dari definisi ini, nampak jelas bahwa sistem perekonomian, meskipun merujuk pada pengertian ekonomi, tidak dapat dilepaskan dari

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Soetrisno P.H., 1994, "Sekelumit tentang Sistem Ekonomi Pancasila Ditinjau dari Segi Sosio-Kultural" dalam Mubyarto dan Boediono (Ed), Ekonomi Pancasila, BPFE, Yogyakarta, Hal. 99.

<sup>45</sup> Winardi, 1984, *Pengantar Sistem-Sistem Ekonomi*, Alumni, Bandung, Hal.24.

sejumlah lembaga atau pranata politik, hukum (misalnya) dimana satu sama lain saling mempengaruhi (*interdependensi*). Masing-masing lembaga mengikatkan dirinya dengan lembaga atau pranata yang lain membentuk suatu pola sistemik untuk memecahkan persoalan dasar perekonomian.

Dapat dikatakan bahwasanya problem-problem mendasar kehidupan manusia bukanlah semata-mata persoalan ekonomi saja, namun lebih dari itu sebagai persoalan sosial yang meliputi seluruh bidang kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, upaya untuk menyelesaikan juga terkait dengan keseluruhan bidang kehidupan dimaksud.

Pada dasarnya sistem ekonomi mencakup keseluruhan proses dan kegiatan perikehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam upayanya memperoleh kemakmuran, diperlukan seperangkat nilai (*set of value*) yang disepakati oleh individu maupun kelompok sebagai pedoman yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk memperoleh apa saja yang menjadi tujuan bersama, yang oleh Gunadi, dimaksudkan sebagai suatu "sistem sosial atau kemasyarakatan dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial itu untuk mencapai kemakmuran".<sup>46</sup> Unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah :

---

<sup>46</sup> Tom Gunadi. *Op. Cit.*, Hal.26.

- (i) tujuan bersama yang melahirkan berbagai kebiasaan, tradisi, kaidah dan aturan yang melembaga;
- (ii) seperangkat nilai yang melekat pada tujuan bersama yang mengikat anggota masyarakat berdasarkan aturan tertentu;
- (iii) sikap dasar dan pengertian hak dan kewajiban yang membentuk pola tingkah laku dan tindakan individu maupun kelompok;
- (iv) otoritas, kepemimpinan, struktur kekuasaan untuk mengarahkan usaha bersama, memilih atau menetapkan alternatif-alternatif bagi alat-alat yang dipergunakan dan mempersatukan seluruh anggota masyarakat.<sup>47</sup>

Apabila difokuskan pada sistem ekonomi Indonesia, maka ia dapat diproyeksikan sebagai sebuah titik sentral antar 2 (dua) macam arus, yaitu arus yang berada (i) di dalam batas sistem; dan arus (ii) di luar batas sistem, yang oleh Winardi disebut arus *input* dan *output*.

## 2. Pemberdayaan Hukum dan Ekonomi Masyarakat

Meskipun secara spesifik pemberdayaan hukum dan ekonomi masyarakat dijadikan kerangka teoritik dalam studi penelitian ini sebagai acuan dasar dalam mengkaji, mengungkap dan memberikan penilaian (*explanation*) atas kebijaksanaan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, materi dalam sub-sub bab ini tidak lebih sebagai

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

penegasan kembali akan arti penting pemberdayaan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional.

Dengan merujuk pengertian di atas, pemberdayaan kurang lebih dapat dipahami sebagai upaya untuk membangun daya dan kemampuan (masyarakat), baik melalui hukum maupun ekonomi, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan potensi diri dalam mencapai kemajuan. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu (*powerless*) melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan berubah menjadi kondisi yang mampu dan berdaya (*power*). Yaitu memampukan dan memandirikan masyarakat agar terjadi peningkatan dalam taraf kehidupannya (*kuantitatif*) disertai pula peningkatan dalam kualitas kehidupannya.

Oleh karena pemberdayaan tidak serta terjadi begitu saja dengan sendirinya, maka dari itu diperlukan langkah-langkah (upaya-upaya) dalam pemberdayaan masyarakat, yang dimulai dari identifikasi masalah sampai jalan pemecahannya, yaitu dilakukan dengan jalan:

- (i) mengidentifikasi masalah, yaitu mengenal problem yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, termasuk mengenali dengan

seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari program kebijakan tersebut;

- (ii) memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat;
- (iii) membuat hipotesa atau memilih mana yang paling layak untuk dilaksanakan; dan
- (iv) mengikuti jalannya penerapan hukum serta mengukur dampak pengaruhnya.

Pemberdayaan hukum dan ekonomi masyarakat, tidak mesti dimaksudkan sebagai upaya turut campurnya pemerintah ataupun pranata-pranata lain yang memiliki *power* secara langsung (dalam arti fisik) memberdayakan masyarakat lemah (*powerless*). Lebih dari itu pemberdayaan dapat dilakukan melalui pembuatan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang kondusif dalam menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga menumbuhkan jiwa kemampuan dari masyarakat yang lemah menjadi berdaya dan berkemampuan. Pranata-pranata hukum diperlukan sebagai *rule of the game* dan *guidance* kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat pemerintah.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Setelah dilakukan penelitian mengenai Hukum Pengelolaan Zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kota Surakarta, dimana penulis mengadakan penelitian di kantor Departemen Agama Kota Surakarta tempat Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Surakarta dan juga para pihak yang terkait dengan tesis yang penulis susun, maka penulis membagi menjadi dua permasalahan. Permasalahan pertama mengenai hukum pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Surakarta dan permasalahan yang kedua mengenai reinterpretasi zakat dan distribusinya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil penelitiannya sebagai berikut:

#### **1. Hukum Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Surakarta**

##### **a. Manajemen BAZ Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli di Kota Surakarta**

Bahwa (BAZ) Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli merupakan Organisasi pengelola zakat dan institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun

1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka fokus penelitian penulis adalah:

- Badan Amil Zakat (BAZ) Departemen Agama Kota Surakarta yang merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- Para pihak yang terkait dengan tesis yang penulis susun.

#### **1) Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Surakarta**

Badan Amil Zakat Kota Surakarta berdiri berdasarkan SK Walikota Surakarta No. 451/1.05/67/I/2002 Tanggal September 2002. Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut:

- a) Nasional, dibentuk oleh presiden atas usul Menteri Agama.
- b) Daerah Propinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
- c) Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota.

d) Kecamatan, dibentuk oleh camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Struktur organisasi BAZ Kota Surakarta terdiri dari tiga bagian, yaitu : Dewan Pertimbangan, Komisi pengawas dan Badan Pelaksana. Kepengurusan BAZ tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut:

- Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, lembaga swadaya masyarakat terkait dan pemerintah.
- Menyusun kriteria calon pengurus.
- Mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat.
- Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya.
- Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.

Kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus BAZ antara lain: memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi, mempunyai program kerja dan tentu saja paham fikih zakat.



## 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli Surakarta

Sebagaimana keberadaan BAZ, Keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki berbagai tingkatan yaitu:

- a) Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama.
- b) Daerah propinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
- c) Daerah Kabupaten atau kota, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau kota.
- d) Kecamatan, dikukuhkan oleh camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk dapat dikukuhkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, LAZ Yayasan Solo Peduli harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- Akte pendirian (berbadan hukum)
- Data muzakki dan mustahik
- Daftar susunan pengurus
- Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
- Neraca atau laporan posisi keuangan
- Surat pernyataan untuk bersedia diaudit.

Hanya LAZ yang telah dikukuhkan oleh pemerintah saja yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari muzakki yang membayarkan dananya.

Bentuk badan hukum diatas tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun disini berupa yayasan, karena disini LAZ termasuk organisasi nirlaba dan badan hukum yayasan dalam melakukan kegiatannya tidak berorientasi memupuk laba.

#### **b. Karakteristik BAZ Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta**

Badan Amil Zakat (BAZ) Surakarta dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli sebagai organisasi nirlaba, memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu :<sup>48</sup>

- Sumber dana (baik dana maupun barang) berasal dari para donatur yang mempercayakan kepada lembaga. Para donatur tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).
- Menghasilkan berbagai jasa dalam berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba.
- Kepemilikan OPZ tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat

---

<sup>48</sup> Widodo, Hertanto dan Kustiawan, Op. Cit., Hal. 4

untuk mendirikan OPZ tersebut pada awalnya. Pada hakekatnya, OPZ bukanlah milik pendiri, tetapi milik masyarakat. Hal itu dikarenakan sumber daya organisasi terutama berasal dari masyarakat. Termasuk jika OPZ tersebut dilikuidasi, kekayaan yang ada pada lembaga itu tidak boleh dibagikan kepada pendiri.

**c. Konsep Manajemen Dan Pelaporan Keuangan BAZ Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta**

Pembuatan laporan keuangan dan diaudit adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Organisasi Pengelola Zakat, yaitu BAZ Surakarta maupun LAZ Solo Peduli Surakarta. Karena inilah salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi yang mesti dilakukan.

Konsep akuntansi yang berlaku bagi organisasi nirlaba, termasuk Organisasi Pengelola Zakat, berbeda dengan perusahaan. Organisasi nirlaba menggunakan akuntansi dana (fund accounting), bukan akuntansi komersial (commercial accounting) sebagaimana yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang berorientasi mencari laba. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik dari kedua jenis lembaga itu.

Terdapatnya perbedaan-perbedaan diantara kedua jenis akuntansi tersebut antara lain mengakibatkan berbedanya perlakuan

dan pengakuan dari transaksi yang terjadi serta format laporan keuangan yang harus dibuat.

Seiring dengan itu Organisasi Pengelola Zakat juga memerlukan manajemen keuangan yang baik. Diharapkan dengan penerapan manajemen keuangan yang baik maka efisiensi, efektifitas, serta kemungkinan kebocoran keuangan dapat diminimalisir.

Akuntansi dan manajemen keuangan untuk organisasi pengelola zakat mengupas konsep akuntansi dan pelaporan keuangan yang harus digunakan oleh setiap Organisasi Pengelola Zakat dengan mengacu kepada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi nirlaba, karakteristik yang dimiliki oleh Organisasi Pengelola Zakat, serta prinsip-prinsip syari'ah Islam. Selain itu juga dibahas konsep manajemen keuangan yang dapat digunakan, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pengendalian keuangan.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki dua "jiwa" sekaligus, jiwa lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan jiwa lembaga keuangan syari'ah (LKS). Sebagai lembaga swadaya masyarakat, organisasi pengelola zakat adalah lembaga pemberdayaan yang mempunyai tujuan besar yaitu merubah keadaan sebagai mustahiq menjadi muzakki. Dalam peranan ini, organisasi pengelola zakat harus paham, peka, serta menyatu dengan masyarakat dan lingkungannya, terutama yang berada di wilayah kerjanya. Organisasi pengelola zakat

harus tahu persis kondisi religius, sosial, budaya maupun ekonomi masyarakatnya. Pemahaman yang menyeluruh dan mendalam akan membantu organisasi pengelola zakat dalam mengembangkan program-program yang dapat menyelesaikan problematikasecara menyeluruh pula.

Di sisi lain, organisasi pengelola zakat adalah lembaga keuangan syari'ah karena menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infaq dan shodaqoh, atau dana lainnya. Pada umumnya dana yang diterima organisasi pengelola zakat tidak terlepas dari realisasi keimanan seseorang terhadap syari'ah Islam. Oleh karena itu organisasi pengelola zakat harus dapat mengelola zakat yang dihimpun sesuai ketentuan syar'i dan mengoptimalkan. Organisasi Pengelola Zakat harus dapat membuktikan bahwa dana berupa zakat, infaq, atau shodaqoh apabila dikelola dengan benar dan baik dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat bahkan negara sebagaimana yang terjadi masa khulafaurrasyidin.

**d. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan BAZ Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta**

Ditinjau dari aliran dana, tugas pokok BAZ Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli adalah penghimpun dan penyalur zakat. Penghimpun artinya menerima (Belum memunggut sebagaimana asholahnya) dana dari muzakki atau donatur atau penyalur artinya

menyalurkan dana kepada mustahiq. Dalam praktek, perhimpunan tidak disertai langsung dengan penyaluran. Ada tenggang waktu antara perhimpunan dengan penyaluran walaupun mungkin tidak lama. Oleh karena itu proses yang dilalui tidak hanya perhimpunan dan penyaluran melainkan juga pengendapan. Untuk pengendapan dana, istilah yang digunakan adalah saldo dana.

Dari tugas pokok dan dikaitkan dengan pengertian diatas, maka ruang lingkup manajemen keuangan dalam organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas perhimpunan, penyaluran, dan saldo dana.

**e. Perencanaan Keuangan BAZ Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta**

Planing, organizing, actuating, controlling (POAC) adalah empat fungsi manajemen yang paling umum dikenal. Empat fungsi ini dapat dipahami sebagai suatu urutan atau prioritas serta adanya keterkaitan yang kuat antara satu fungsi dengan fungsi yang lainnya. Dengan demikian, perencanaan (planning) sebagai fungsi pertama merupakan prioritas utama untuk dijalankan dan akan mempengaruhi fungsi-fungsi yang lainnya. Bahkan ada ungkapan bahwa sukses diawali dengan perencanaan yang baik. Pemahaman seperti ini berlaku dalam manajemen apapun termasuk manajemen keuangan. Oleh

karena itu, perencanaan keuangan akan dibahas terlebih dahulu sebelum membahas fungsi lainnya.

Perencanaan keuangan pada umumnya diwujudkan dalam bentuk anggaran (*budget*). Pemerintah Republik Indonesia menyusun rencana tahunannya dalam bentuk rencana anggaran penerimaan dan belanja negara (RAPBN). Perusahaan-perusahaan membuat rencana tahunannya dalam bentuk Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) atau rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT). Demikian pentingnya anggaran, maka RAPBN harus mendapat pengesahan lebih dahulu Dewan Perwakilan Rakyat dan RKAP/RKAT harus mendapat persetujuan dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham (RUPS).

Di Indonesia membuat anggaran belum umum dilakukan oleh organisasi pengelola zakat. Namun di Malaysia, Baitulmaal Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, misalnya biasa menyusun perencanaan tahunannya dengan nama anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Tahun XXXX. Memahami demikian pentingnya anggaran bagi suatu organisasi, apapun nama dan bentuknya, maka sudah seharusnya organisasi pengelola zakat pun membiasakan membuat perencanaan keuangan dalam bentuk anggaran. Pembiasaan ini sejalan peraturan pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat yang mengharuskan setiap organisasi pengelola

zakat menyusun rencana program kerja. Selanjutnya akan dibahas apa dan bagaimana menyusun anggaran.

Anggaran (budget) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Anggaran berbeda dengan ramalan. Anggaran merupakan rencana manajemen dengan asumsi-asumsi langkah positif akan diambil oleh pelaksana anggaran demi terrealisasinya rencana yang telah disusun. Adapun ramalan semata-mata merupakan prediksi tentang apa yang akan terjadi tanpa usaha untuk mempengaruhi apa yang akan terjadi agar sesuai dengan prediksinya.

Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dinyatakan dalam satuan uang/moneter.
- 2) Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun.
- 3) Mengandung komitmen manajemen, artinya bahwa dengan adanya anggaran manajemen setuju untuk menerima tanggung jawab mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.
- 4) Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran.
- 5) Anggaran yang telah disetujui hanya dapat diubah dalam keadaan-keadaan khusus.



- 6) Secara berkala dilakukan perbandingan antara realisasi dengan anggaran. Perbandingan ini untuk mengetahui apakah ada varian/penyimpangan. Apabila ada, maka varian/penyimpangan tersebut dianalisis dan dijelaskan.

Dalam perusahaan, manajemen keuangan mencakup antara lain pengelolaan modal, kas, dan piutang. Salah satu wujud pengelolaan adalah disusunnya anggaran untuk masing-masing pos tersebut. Sehingga kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan *capital budgeting*, anggaran kas, atau anggaran pengumpulan piutang.

#### **f. Pengelolaan Keuangan BAZ Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta**

Yang dimaksud pengelolaan mencakup makna pengorganisasian (*organizing*) dan pelaksanaan (*actuating*) dalam empat fungsi manajemen diatas. Sedangkan keuangan mencakup makna seluruh dana yang dikelola baik itu berupa kas maupun non kas.

##### **1) Penghimpunan Dana**

Panduan dalam penghimpunan dana mencakup tentang jenis dana dan cara dana diterima. BAZ Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat.

Jenis dana yang dapat dihimpun organisasi pengelola zakat tidak terbatas hanya zakat. Selain zakat, dana yang dapat dihimpun menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan realitas di masyarakat adalah sebagai berikut:

- infaq/shodaqoh,
- wasiat,
- kafarat,
- wakaf,
- waris,
- hibah lembaga lain,
- hibah dari pemerintah, dan
- hibah dari luar negeri.

Masing-masing jenis dana ini mempunyai karakteristik sumber dan pembatasan-pembatasan yang berbeda dalam penyalurannya. Karakteristik sumber dan pembatasan dapat berupa ketentuan syari'ah, ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pembatasan yang berasal dari muzakki/dermawan.

Adapun jumlah zakat yang telah terkumpul pada BAZ surakarta sampai bulan Oktober 2004 adalah Rp. 60.000.000,- dari target sebesar Rp. 100.000.000,- per bulan Nopember..

Sedangkan LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta jumlah total penerimaan terhitung sampai tanggal 15 Oktober 2004 sebesar Rp. 1.102.585.944,- (Solopos, 27 Nopember 2004).

## 2) Dana Pengelola

Dalam organisasi pengelola zakat di Surakarta sering muncul pertanyaan berapa dana yang dapat dialokasikan untuk operasional (pengelola). Untuk menetapkan besar dana yang menjadi hak pengelola, perlu dipahami terlebih dahulu yang dimaksud dana pengelola.

Dana pengelola adalah dana yang menjadi hak pengelola yang berasal dari bagian amil dalam zakat, bagian tertentu dari dana selain zakat, hasil mengusahakan dana yang menjadi hak pengelola, serta hibah dan atau pinjaman dari pihak lain yang digunakan untuk operasi/kegiatan organisasi. Dari definisi ini, maka sumber dana pengelola adalah:

- a) Bagian amil dalam zakat.
- b) Bagian tertentu dari dana selain zakat.
- c) Hasil usaha dari mengusahakan dananya sendiri.
- d) Hibah langsung dari orang dan atau organisasi lain.
- e) Pinjaman dari orang dan atau organisasi lain.

Untuk menentukan jumlah yang menjadi hak pengelola dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari dua dasar perhitungan berikut:

- a) Prosentase tertentu
- b) Secukupnya.

Prosentase tertentu digunakan apabila bagian amil dari zakat ditetapkan  $\frac{1}{8}$  bagian atau 12,5%. Atas dasar ini, maka

bagian atau prosentase bagian dari dana selain zakat harus ditetapkan juga. Penetapan ini harus dilakukan pada saat penyusunan anggaran dan berlaku minimal untuk satu tahun. Konsekuensi lain dari penggunaan dasar perhitungan ini adalah pengelola dapat mengalami kekurangan atau kelebihan dana.

### **3) Bunga Bank**

Pengelolaan keuangan organisasi pengelola zakat belum sepenuhnya dapat terbebas dari penggunaan fasilitas yang ada pada bank-bank konvensional. Akibat penggunaan fasilitas ini, maka pada umumnya ada bagian bunga yang diperoleh organisasi. Atas bunga bank ini, organisasi harus membuat kebijakan khusus mengenai penggunaan dan pencatatan.

### **g. Ruang Lingkup Bidang Sasaran**

Aspek dalam kehidupan dunia manusia semakin hari semakin beragam. Aspek kehidupan ini dapat kita lihat dalam banyak bentuk, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dakwah, pendidikan, kesehatan, lingkungan, sampai hak asasi manusia (HAM). Dalam setiap aspek tersebut akan kita dapati orang-orang yang tergolong dalam golongan mustahiq atau kalau kita lihat dari sisi mustahiq akan kita temukan permasalahan-permasalahan dalam aspek-aspek tersebut dalam diri mereka. Aspek-aspek kehidupan ini merupakan bidang sasaran yang dapat dipilih dalam penyaluran oleh organisasi pengelola zakat.

Idealnya, setiap organisasi pengelola zakat dapat berkiprah dalam seluruh aspek yang ada. Namun dengan keterbatasan sumber dana dan sumber daya manusia yang dimiliki harus ada pilihan yang diambil. Selain keterbatasan sumber dana dan sumber daya yang dimiliki pilihan ruang lingkup bidang sasaran ini juga untuk efektifitas dana dan fokus kerja, sehingga peran zakat dalam kehidupan umat akan dapat dirasakan masyarakat.

Pemilihan ruang lingkup bidang sasaran harus dituangkan dalam panduan agar dana yang dihimpun tidak dialokasikan secara sporadis dan hanya bertumpu pada satu aspek saja. Dilihat dari latar belakang pendidikan atau keahlian pengelola zakat yang ada sekarang, kita dapatkan keberagaman yang luar biasa. Oleh karena itu, pemilihan ruang lingkup besar kemungkinan berbeda antara satu organisasi dengan organisasi pengelola zakat lainnya. Hal ini berarti sangat memungkinkan tergarapnya setiap aspek kehidupan yang ada. Tentu saja semua akan efektif apabila ada sinergi atau aliansi strategis antara para pengelola.

#### **h. Bentuk dan sifat penyaluran**

Salah satu pertanyaan yang masih sering muncul dalam pengelolaan zakat di Surakarta adalah apakah zakat dan dana lainnya dapat diberikan dalam bentuk dana produktif? Pertanyaan ini lebih sering muncul dalam konteks pemahaman bahwa produktif artinya

dana yang ada dipinjamkan oleh amil kepada mustahiq yang lain untuk suatu usaha bisnis. Pemahaman seperti ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang berujung pada batasan melanggar atau tidak melanggar syar'i.

Kalau kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat kita bedakan dalam dua bentuk, yaitu bantuan sesaat dan pemberdayaan. Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Bantuan sesaat dalam hal ini berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri si mustahiq. Hal ini dilakukan karena karena mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri seperti pada diri para orang tua yang sudah jompo, orang dewasa yang cacat yang tidak memungkinkan ia mandiri, atau orang gila.

Adapun pemberdayaan adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada golongan fakir miskin) dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori golongan muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahan adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab

kemiskinan tersebut sehingga kita dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.

**i. Prosedur Pengeluaran Dana**

Pengeluaran dana, baik untuk pihak di luar pengelola maupun untuk pengelola sendiri, harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian ini tidak berarti mempersulit. Untuk membedakan antara kehati-hatian dengan mempersulit maka perlu adanya suatu panduan berupa prosedur baku. Prosedur baku akan sangat membantu bagian keuangan sebagai pemegang dana dalam memenuhi atau menolak permintaan. Di pihak lain, prosedur baku juga akan membuat pihak yang mengajukan permintaan akan menerima apabila permintaannya dipenuhi dalam waktu tertentu atau bahkan ditolak sekalipun.

**j. Pertanggungjawaban Pengeluaran Dana**

Setiap pengeluaran dana harus ada pertanggungjawaban secara tertulis, lengkap dan sah. Sekecil apapun dana yang dikeluarkan. Dalam pertanggungjawaban harus dapat dinilai baik dari kesesuaian syari'ah maupun kebijakan lembaga. Pertanggungjawaban harus diberikan dalam batasan waktu tertentu. Pertanggungjawaban secara keseluruhan akan diakui oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi manakala dilakukan audit oleh eksternal auditor baik menyangkut audit umum maupun audit syari'ah.

Disini dapat dikatakan bahwa ruang gerak ijtihad meliputi (a) sesuatu masalah yang status hukumnya pasti, hanya menerima kemungkinan ijtihad pada operasionalnya saja, (b) sesuatu masalah yang status hukumnya berdasarkan dalil zanni, dan (c) sesuatu masalah yang hukumnya sama sekali belum disinggung baik oleh Al Quran, Sunnah maupun Ijma'.

#### **k. Pengendalian Keuangan**

Fungsi keempat dari empat fungsi manajemen diatas adalah pengendalian kontrol (*control*). Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional organisasi secara sistematis guna tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian pengendalian keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi mengatur keuangannya secara sistematis dalam mewujudkan tujuan manajemen keuangan secara keseluruhan.

## **2. Reinterpretasi Zakat dan Distribusinya dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Dari penelitian yang penulis lakukan di Kota Surakarta, banyak kelemahan dan kurang efektifnya zakat. Hal ini salah satunya adanya pemahaman yang masih dogmatis-formalistis di lingkungan pengelola zakat itu sendiri maupun di masyarakat.

Penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan penghimpunan dana. Hal ini mengingat perlunya diperhatikan beberapa aspek. Untuk itu menyangkut penafsiran obyek



zakat dan distribusinya penulis pisahkan dalam permasalahan tersendiri mengingat sangat strategisnya permasalahan tersebut.

Perlunya penafsiran kembali atas zakat dan distribusinya merupakan kebutuhan mendesak, mengingat daya guna zakat yang belum bisa mengangkat perekonomian rakyat dan negara.

Allah SWT telah menetapkan delapan golongan mustahiq (asnaf mustahiq) zakat dalam QS At-Taubah ayat 60. Kedelapan golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorimiin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Permasalahan akan muncul manakala kita mentransfer apa yang ada dalam bahasa fikih (tekstual) ke dalam bahasa praktis (kontekstual).

Secara formal, distribusi zakat langsung diatur oleh Allah sendiri, tidak memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad dan Ijtihad para mujtahid untuk mendistribusikannya. Abu Daud ra, dalam kitab sunnahnya dengan sanad yang bagus, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi seraya berkata; 'berilah aku zakat!'. Rasulullah menjawab: Allah tidak rela atas hukum dari Nabi dan lainnya dalam masalah zakat. Allah sendiri lah yang menetapkan hukumnya dengan membagikan kepada delapan golongan. Jika kamu termasuk salah satu golongan itu akan aku berikan hakmu, kedelapan golongan tersebut dalam surat Al-Taubah : 60 :

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.*

Melalui ayat ini ulama ahli tafsir sepakat, bahwa distribusi zakat hanya diberikan kepada delapan golongan. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, ketika mengartikan, siapa yang dimaksudkan delapan golongan itu.

Berikut ini akan penulis uraikan satu persatu delapan golongan itu, dari beberapa kitab tafsir.

a. Fakir

Fakir adalah mereka yang mempunyai harta sedikit, kurang dari satu nisab, atau mereka yang terdesak kebutuhan ekonominya, tetapi tetap menjaga diri tidak mau meminta-minta, atau Rasyid Rida, Fakir adalah kebalikan dari kaya. Disebutkannya fakir bertentangan dengan kaya menunjukkan bahwa orang fakir adalah orang yang sangat memerlukan bantuan keluasaan mata pencahariannya, bukan hanya sekedar orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya.

Fakir adalah orang yang mengadukan akan kefakirannya, yang berarti memerlukan bantuan untuk melapangkan mata pencahariannya. Menurut At-Tabari, yang penting adalah pendapat Ibnu Abas, Jabr Ibn Zaib, Az-Zuhry, Mujahid dan Ibn Sabit, yang mengatakan Fakir adalah orang yang sangat memerlukan bantuan perekonomiannya, tetapi mereka tetap menjaga diri tidak mau meminta-minta.

b. Miskin

Miskin adalah kelompok orang yang meminta-minta karena memang mereka tidak mempunyai apa-apa, ia telah lemah dibanding

dengan orang-orang Fakir. Tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya, artinya mereka adalah kelompok orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari yang dipunyai orang fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilannya hanya bisa mencukupi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya.

Bila kita telusuri lebih lanjut, ditemui fakir dan miskin ini banyak sekali. Oleh at-Tabari disimpulkan ada sembilan fakir miskin :

- 1) Orang miskin adalah orang yang mempunyai sebagian harta untuk menutupi kebutuhannya, sedangkan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu.
- 2) Fakir dan miskin adalah sama saja, tidak ada perbedaan antara keduanya dalam tingkat kepemilikannya, meskipun mereka berbeda dalam simbolnya.
- 3) Secara lahiriyah kata miskin memang bukan dimaksudkan untuk menyebut fakir, keduanya memang dua kelompok yang berbeda, dan perbedaan keduanya nyata, bahwa kelompok yang satu (fakir) lebih memerlukan daripada orang miskin.
- 4) Orang miskin adalah orang yang memerlukan bantuan, tetapi tetap menjaga diri dari meminta-minta, sedangkan fakir adalah orang yang meminta-minta.
- 5) Orang miskin adalah orang yang mempunyai tempat tinggal dan mempunyai pelayan yang tingkatan ekonominya lebih tinggi daripada fakir, sedangkan orang fakir tidak punya apa-apa.

- 6) Fakir adalah sebagian orang yang berhijrah, sementara miskin adalah sebagian orang arab yang tidak ikut berhijrah.
- 7) Orang-orang miskin adalah yang cukup kenyang dan mempunyai tempat tinggal, ia tidak meminta-minta, sedangkan orang-orang fakir adalah sebaliknya.
- 8) Orang-orang miskin adalah orang yang meminta-minta, sedangkan fakir adalah orang-orang miskin yang tidak punya.
- 9) Fakir adalah bagian orang-orang miskin yang tidak punya, sedangkan miskin adalah bagian orang-orang ahli kitab yang tidak punya.

Dengan adanya beberapa pengertian fakir miskin yang berkisar antara tidak punya, dan mempunyai tetapi tidak cukup, maka al-Maragi mengatakan:

Meskipun mereka berbeda simbolnya, tetapi dari segi keadaan keperluan untuk mencukupi kebutuhannya, semuanya sama saja, tidak ada perbedaan antara keduanya.<sup>49</sup> Demikian juga Muhammad Jawad al-Mugniyah, mengatakan meskipun perbedaan antara fakir dan miskin terletak antara meminta dan tidak meminta, namun apabila yang menjadi pegangan soal memenuhi kehendaknya, maka keduanya tidak ada perbedaannya.<sup>50</sup> Dengan kata lain mereka hanya berbeda sifatnya, tetapi tidak berbeda dari segi jenisnya, yaitu jenis kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

<sup>49</sup> Mustafa al-Maragi, 1970, *Tafsir al-Maragi*, jilid 4, Mesir: mustofa bab al-Halabi. Hal. 143

<sup>50</sup> Muhammad Jawad Muhgiah, 1969, *al-Tafsir al-Kasif*, Jilid 4 Mesir: Dar al-Qolam li al-Malayin, Hal. 59-90.

Dengan demikian dapat dianggap satu kata yang menunjukkan pada orang yang tidak mampu secara ekonomi, perbedaannya tidak prinsipal, melainkan hanya bersifat gradual. Fakir merujuk pada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah sementara yang kedua, miskin menunjuk pada orang yang secara ekonomi tidak beruntung (cukup), meskipun sebenarnya secara keseluruhan masih termasuk orang yang kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya. Karena fakir berada pada papan paling bawah, maka Al-Quran meletakkan pada rangking pertama, mengingat merekalah yang sangat membutuhkan bantuan zakat.

c. Amil

Amilin, orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Artinya orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan, mengurus dan menyimpan harta zakat, baik yang bertugas mengumpulkan harta zakat sebagai bendahara maupun selaku pengatur administrasi pembukuan, baik mengenai penerimaan maupun pembagian.

d. Mu'allaf

Orang yang perlu diberi pengertian lebih baik tentang Islam dan mantap di dalam Islam dan orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslim atau orang yang diharapkan memberi bantuan kepada kaum muslim. Dalam hal ini diklasifikasikan menjadi tiga macam :

- 1) Golongan orang kafir yang berpengaruh dan diharapkan memeluk agama Islam.

- 2) Golongan orang kafir yang tidak mampu kemudian memeluk agama Islam, untuk memantapkan dan meneguhkan keimanan mereka, maka diberi sebagian zakat.
- 3) Golongan muslim yang berdomisili di daerah perbatasan dengan orang-orang yang memerangi mereka, mereka diberi zakat karena diharapkan kewaspadaan mereka dalam menghadapi musuh.

e. Riqap

Riqap menurut jumhur ahli tafsir, mereka adalah budak yang berstatus sebagai mukatab, mereka diberi bagian zakat untuk mengentaskan mereka dari sistem perbudakan. Dengan kata lain, dana zakat yang diberikan kepada golongan ini adalah usaha untuk membebaskan budak (mukatab) baik untuk membeli budak dan mengentaskannya, atau diberikan kepada seorang budak yang telah mendapatkan jaminan dari tuannya untuk melepaskan dirinya dengan membayar harta yang telah ditentukan.

f. Garimin

Garimin, yaitu orang-orang yang berhutang bukan untuk maksiat, yang kemudian tidak punya sesuatu untuk dibayarkannya. Mujahid memasukkan asnaf garimin bagi orang yang terbakar rumahnya atau terkena musibah yang menghabiskan harta bendanya. Klasifikasi garimin ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Orang berhutang untuk kepentingan dirinya pada jalan bukan maksiat,

- 2) Orang yang berhutang untuk kepentingan umum. Dengan demikian bagi garimin cukup diberikan bagian zakat sekedar untuk membayar hutangnya, apabila ia mempunyai sebagian uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya.

g. Sabilillah

Sabilillah, yaitu segala jalan yang mengarah pada pendekatan diri kepada Allah adalah termasuk amal kebaikan, dan segala amal kebaikan adalah masuk term Sabilillah. Dengan demikian menurut Al-Razy, kata Sabilillah bukan hanya terbatas pada peperangan, melainkan berarti segala jalan kebaikan, itulah sebabnya, boleh saja zakat diberikan untuk mengkafani jenazah, mendirikan sekolah, membangun masjid dan lain-lain. Ungkapan lain, Sabilillah adalah segala jalan untuk menegakkan agama Allah. Bahkan al-Maragi, Sabilillah adalah kemaslahatan kaum muslim seluruhnya menuju tegaknya agama dan negara, seperti untuk jaminan keamanan perjalanan haji, untuk penyediaan air dan makanan dan hal-hal lain yang menjadikan terjaminnya kesehatan jama'ah haji. Dengan demikian arti sabilillah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam :

- 1) Arti khusus, yaitu membela dan menegakkan agama yang diserang oleh musuh.
- 2) Arti umum, yaitu segala perbuatan yang bersifat kemasyarakatan yang ditujukan untuk mendapat keridhaan Allah, misalnya membuat jembatan, rumah sakit, sekolah, masjid dan lain-lain.

Dalam hal ini Ulama Imam Mazhab Empat cenderung mengartikan sabilillah terbatas arti khusus, sedangkan ulama mutaakhirin, mengartikan Sabilillah mencakup arti khusus dan arti umum, berdasarkan kaidah:

Yang menjadi pegangan adalah arti umumnya kata-kata, bukan karena sebab yang khusus.

#### h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, bukan bepergian untuk maksiat. Ia diberi zakat sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksud, atau sampai ke tempat di mana ia menyimpan harta benda.<sup>51</sup> Ibnu Sabil bisa ia termasuk orang kaya maupun termasuk orang yang tidak punya, yang jelas ketika dalam perjalanan ia kehabisan bekal sebelum sampai ke tempat tujuannya.<sup>52</sup> Dengan demikian, termasuk ibnu sabil bagi musafir yang memerlukan pertolongan meskipun ia mempunyai kekayaan di negerinya, seperti turis, selama tidak bertujuan maksiat.<sup>53</sup>

Dari delapan golongan yang menerima zakat itu, para mufassir mempersoalkan, apakah bagian yang diterima oleh masing-masing golongan itu menjadi haknya, sehingga mereka bebas untuk membelanjakannya, ataukah bagian yang diterima itu bukan menjadi miliknya, sehingga mereka hanya diberikan sesuai dengan kedudukan

<sup>51</sup> Imam At-Tabari, 1978, *Tafsir At-Tabari*, Beirut, Dar al Fikri. Hal. 112.

<sup>52</sup> Ibnu Yahya Muhammad Ibn Sumadih at-Tajuby, Muhtasar, 1970, *Tafsir at-Tabari*, Mesir: Al-Hai'ah al-Muriyah al-Ammah, Hal. 251.

<sup>53</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *loc. cit.*



masing-masing, tak berhak membelanjakannya dengan bebas? Dalam hal ini ulama mufassirin, menjelaskan bahwa huruf “lam”, huruf jar yang terdapat pada kelompok pertama, yaitu fuqara, masakin, amilin dan mu'allaf, mengandung arti bagian zakat yang diterima mereka menjadi miliknya penuh, tidak dapat ditarik kembali apabila sudah berada di bawah kekuasaannya, mereka berhak membelanjakan sesuai dengan kebutuhannya.

Sebaliknya kelompok kedua, yaitu riqab, garimin, sabilillah dan ibnu sabil tidak memiliki terhadap bagian zakat yang diterima. Riqab hanya menerima untuk mengentaskan dirinya dari perbudakan, garimin terbatas hanya untuk mengembalikan hutangnya, sabilillah terbatas hanya untuk biaya jihadnya dan ibnu sabil terbatas hanya untuk ongkos perjalanannya.<sup>54</sup> Alasannya, perubahan dari huruf jar “lam” pada kelompok pertama menjadi huruf jar “fi” pada kelompok kedua, menandakan bahwa huruf jar pada kelompok pertama berfungsi untuk pemilikan, sedangkan huruf jar “fi” tidak menunjukkan pemilikan, melainkan penunjukan tempat, artinya bagian zakat yang diterima pada kelompok kedua itu hanya terbatas pada posisi dan tempatnya masing-masing. Dengan demikian mereka diberi zakat sekedar sesuai dengan kehendak mereka.<sup>55</sup> Dalam pada itu Rasyid Rida mengklasifikasikan bagian zakat menjadi :

<sup>54</sup> Muhammad Abdul Mu'in Jaml, Tanpa Tahun, *Tafsir al Farid li al'Quran al-Majid*, Jilid II, Dar al-Kitab al-jadid, Hal. 1648.

<sup>55</sup> At-Tabari, Jilid VI, *op.cit.*, Hal. 111.

- a. Milik individu, dan
- b. Untuk kemaslahatan umum.<sup>56</sup>

Sedikit berbeda dengan pengelompokan tersebut di atas dalam Al-Qur'an dan tafsirnya membagi dua klasifikasi :

- a. Menerima zakat langsung menjadi milik pribadi yaitu fakir, miskin, amil, garim, mu'alaf dan musafir.
- b. Menerima untuk kepentingan umum bisa lewat yayasan kemudian membeli budak untuk dientaskan, dan sabilillah, yaitu segala kepentingan agama yang bersifat umum.

Dengan demikian zakat itu bertujuan untuk kemaslahatan individual dan untuk kemaslahatan umum. Dengan kata lain, Abu Ja'far mengatakan bahwa Allah mensyari'atkan zakat berfungsi ganda, pertama untuk memperkuat barisan kaum muslimin dan kedua untuk menolong dan memperkuat Islam.<sup>57</sup>

Para mufassir sepakat, bahwa zakat harus diberikan hanya kepada delapan golongan sebagaimana tersebut dalam at-Taubah : 60, namun mengenai pemerataan para mufassir cenderung melihat kenyataan yang ada. Menurut Al-Qasimi, bisa saja zakat itu hanya dibagikan kepada satu golongan dengan argumentasi :

- a. Surat al-Baqarah 271

Menunjukkan, bahwa zakat itu bisa saja hanya diberikan kepada fakir miskin. Dengan demikian at-Taubah : 60 itu hanya menjelaskan stratifikasi golongan yang berhak menerima zakat.

<sup>56</sup> Muhammad Rasyid Rida, Tanpa Tahun, at-Fatawa, Kairo: Dar asy-Syuruq, Hal. 586.

<sup>57</sup> At-Tabari, *op.cit.*, Hal. 113.

- b. Berdasarkan Hadis dari Mu'az bin Jabal :

*Allah telah mewajibkan pada mereka zakat harta benda mereka, ambilah zakat dari orang-orang kaya mereka dan kembalikan harta itu untuk penghidupan orang-orang miskin mereka.*<sup>58</sup>

- c. Pada peristiwa Salmah Ibnu Sahra, di mana Rasulullah pernah memberikan zakat khusus kepadanya.
- d. Mulai dari masa sahabat tidak ada pendapat yang menentang kebolehan zakat diberikan kepada satu golongan, ini dapat dinilai sebagai *ijma'*, terhadap kebolehan zakat diberikan kepada satu golongan saja.
- e. Perluasan arti term delapan golongan adalah dimaksudkan untuk menutup hillah hukum yang memperbolehkan zakat diberikan kepada selain delapan golongan.<sup>59</sup> Senada dengan pandangan ini, Rasyid Rida menjelaskan susunan delapan golongan itu untuk menjelaskan urutan yang lebih berhak. Huruf ataf di sana tidak berfungsi untuk tertib, maka fakir miskin lebih berhak sesuai dengan al-Baqarah : 271 tersebut di atas, itulah sebabnya zakat tidak harus dibagi rata kepada delapan golongan.<sup>60</sup> Golongan salaf dan khalaf diantaranya Umar, Khudaifah, Mahram tentang kebolehan zakat diberikan kepada salah satu golongan, dinilai Ibn Kasir mencerminkan pendapat yang mewakili umumnya teoritisi hukum Islam, dalam pada itu disebutkan delapan golongan itu dimaksudkan sebagai penjelasan kepada siapa

<sup>58</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Tanpa Tahun, *Matan Al-Bukhari*, Jilid I, Isa Bab Halabi, Hal. 242.

<sup>59</sup> Muhammad Jamaluddin Al-Qasimy, Tanpa Tahun, *Mahasin At Ta'wil*, jilid VIII, Hal. 3182.

<sup>60</sup> Rasyid Rida, Jilid 10 Awal, Hal. 594.

saja zakat itu diberikan, kebutuhan yang ada yang mendesak untuk segera diatasi.<sup>61</sup> Alasan lain dikemukakan oleh At-Tabaari, bahwa Allah tidak mesyari'atkan pembagian zakat kepada delapan golongan itu untuk dibagi sama rata antar tiap golongan, melainkan ketentuan yang ada itu menunjukkan bahwa zakat tidak diberikan kepada orang yang tidak termasuk salah satu golongan.<sup>62</sup> Allah mencukupkan zakat hanya diberikan kepada delapan golongan itu, pada hakekatnya sudah mengangkut seluruh kebutuhan kesejahteraan masyarakat.<sup>63</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Hukum Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Surakarta**

#### **a. Manajemen BAZ dan LAZ Yayasan Solo Peduli di Kota Surakarta**

Keberadaan BAZ Kota Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

<sup>61</sup> Ibnu Kasir, Jilid 2, *op.cit.*, Hal. 364.

<sup>62</sup> Al-Tobari, Juz VI, *op.cit.*, Hal. 112.

<sup>63</sup> Al-Qasimy, *op.cit.*, Hal. 3184.

Sesuai dengan Hasil penelitian diatas, maka fokus pembahasan penulis adalah:

- Badan Amil Zakat (BAZ) Departemen Agama Kota Surakarta yang merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- Para pihak yang terkait dengan tesis yang penulis susun

#### 1) **Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Surakarta**

Walaupun BAZ Kota Surakarta dibentuk oleh pemerintah, namun sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari departemen agama (ex-officio). Dengan demikian masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ Kota Surakarta sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat dan lolos seleksi.

Fungsi dari masing-masing struktur di BAZ Kota Surakarta adalah :

- Dewan pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- Komisi Pengawas memiliki fungsi pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana.

- Badan pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

BAZ Kota Surakarta mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan :

- Segera melaksanakan program kerja yang telah dibuat.
- Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
- Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diedit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir.
- Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surakarta.
- Merencanakan kegiatan tahunan.
- Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing.

Jika para pengelola BAZ Kota Surakarta ini tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut diatas, maka keberadaannya dapat ditinjau ulang. Mekanisme peninjauan ulang ini dilakukan dengan berbagai tahapan :

- Diberikan peringatan tertulis oleh pemerintah yang membentuknya sebanyak maksimal tiga kali

- Jika peringatan telah diberikan sebanyak tiga kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan BAZ tersebut ditinjau ulang serta pemerintah dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus baru, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

## **2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli Kota Surakarta**

Persyaratan data muzakki dan mustahik serta program kerja sebaiknya berdasarkan hasil survei agar mencerminkan kondisi lapangan. Sedangkan neraca atau laporan posisi keuangan diperlukan sebagai bukti bahwa LAZ telah mempunyai sistem pembukuan yang baik. Sedangkan surat pernyataan bersedia untuk diaudit agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

Setelah mendapat pengukuhan, LAZ Yayasan Solo Peduli Kota Surakarta memiliki kewajiban sebagai berikut :

- Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat
- Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan
- Mempublikasikan laporan keuangan di media massa
- Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Jika sebuah LAZ tidak lagi memenuhi persyaratan pengukuhan dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana diatas, maka pengukuhan nya dapat ditinjau ulang bahkan sampai

dicabut. Mekanisme peninjauan ulang terhadap LAZ dilakukan dengan memberikan peringatan tertulis sampai 3 (tiga) kali. Bila telah tiga kali peringatan tertulis tidak ada perbaikan, maka akan dilakukan pencabutan pengukuhan.

Pencabutan pengukuhan tersebut akan mengakibatkan :

- Hilangnya hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari pemerintah, disini adalah Pemerintah kota Surakarta.
- Tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkannya sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- Tidak dapat melakukan dana zakat.

Aturan-aturan seperti diuraikan diatas diberlakukan agar pengelolaan dana-dana zakat, infaq, shadaqah, dan lainnya, baik oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang sepenuhnya diprakarsai oleh masyarakat, dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Tuntutan profesionalitas mengharuskan organisasi pengelola zakat dikelola secara penuh dan full time. Mereka yang sehari-hari mengurus organisasi pengelola zakat ini dinamakan Amil Zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa amil zakat adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi-profesi lain. Mereka inilah yang berhak atas bagian zakat (asnaf amilin).



**b. Karakteristik BAZ Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli Kota Surakarta**

Organisasi pengelola zakat harus mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

- Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.
- Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.

Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam dikarenakan dana-dana yang menjadi sumber utama OPZ telah ada aturannya dalam Al Quran dan Hadist.

**c. Konsep Manajemen dan Pelaporan Keuangan BAZ Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta**

Peran yang demikian besar, yang diemban oleh BAZ Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli Kota Surakarta, tidak mungkin tercapai tanpa adanya profesionalitas dalam pengelolaannya. Salah satu wujud profesionalitas adalah adanya manajemen yang sehat dalam segala sisi, baik itu sumber daya manusia, perencanaan strategis, operasional, maupun keuangan. Ungkapan “Kebenaran tanpa penafaan (Manajemen) akan dikalahkan oleh kebathilan yang tertata rapi” dari sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, adalah ungkapan yang sangat tepat terkait dengan masalah ini. Dari ungkapan ini dapat diambil pelajaran bahwa untuk tidak dikalahkan

yang berarti mengalahkan bukan seimbang oleh lembaga-lembaga kebatilan, organisasi pengelola zakat harus memiliki manajemen yang baik dan kuat. Dalam bab ini dibahas khusus mengenai manajemen keuangan yang mencakup pengertian, ruang lingkup, arti penting, perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pengendalian keuangan.

Dalam pengertian konvensional (organisasi bisnis) manajemen keuangan adalah semua aktifitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.<sup>64</sup> Manajemen keuangan dalam pengertian ini dapat dipahami sebagai usaha memperoleh dana dengan biaya yang murah pada saat kita memerlukan dana dan usaha menempatkan dana dengan hasil yang tinggi pada saat kita memiliki dana. Dengan demikian, baik tidaknya manajemen keuangan yang dilakukan suatu lembaga diukur dari seberapa kecil biaya yang dikeluarkan dan atau seberapa besar hasil yang diperoleh.

Manajemen keuangan dalam organisasi pengelola zakat tidak diukur semata-mata dari efisiensi dan efektifitas melainkan diukur juga dari sejauh mana kesesuaian dengan syari'ah. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan manajemen keuangan dalam organisasi pengelola zakat tidak persis sama dengan pengertian manajemen keuangan konvensional. Pengertian manajemen keuangan dalam organisasi

---

<sup>64</sup> Sutrisno, 2000, *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Penerbit Ekonosia Yogyakarta, Cet. Pertama.

pengelola zakat adalah perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dana untuk memenuhi ketentuan syar'i dan pembatasan dari donatur serta terwujudnya efisiensi dan efektifitas dana.

Dari pengertian di atas terkandung makna sebagai berikut :

- 1) Organisasi pengelola zakat harus merencanakan berapa dana yang diharapkan dapat dihimpun dan disalurkan untuk satu periode.
- 2) Organisasi pengelola zakat harus dapat menyalurkan dana sesuai ketentuan syar'i dan pembatasan dari donatur apabila ada permintaan/syarat yang telah disepakati pada saat dana diterima.
- 3) Organisasi pengelola zakat harus membuat skala prioritas dalam penyaluran dana sehingga dana yang terbatas dapat memberikan arti yang banyak (*multiplayer effect*) dalam pemberdayaan masyarakat.
- 4) Organisasi pengelola zakat harus memperhatikan *cost* dan *benefit* yang diperoleh sehingga terjadi efisiensi dalam pengelolaan dan penyaluran dana.

Dalam realitas saat ini, masih sedikit sekali organisasi pengelola zakat yang memahami dan melakukan manajemen keuangan. Yang banyak sekarang, organisasi pengelola zakat berjalan apa adanya. Tidak ada target berapa dana yang diharapkan terhimpun, berapa jiwa atau keluarga atau badan usaha yang ditargetkan sebagai muzakki, berapa jiwa atau keluarga yang akan menerima dana zakat, baik secara rutin maupun insidentil, dan berapa jumlah amil *full time* beserta jumlah fee-nya yang harus dibayar. Kenyataan ini perlu kita

ubah. Organisasi pengelola zakat sebagai pengemban misi lembaga keuangan syariah dan pemberdayaan masyarakat harus melakukan manajemen terhadap keuangannya sehingga kepercayaan muzakki kepada lembaga/badan amil zakat akan semakin besar dan peningkatan kesejahteraan di kalangan ummat menjadi suatu keniscayaan.

**d. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan BAZ Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta**

Organisasi pengelola zakat dalam mengelola keuangannya harus melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- 1) Membuat perencanaan atau menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) atau *bugeting* yang meliputi berapa dana yang diharapkan terhimpun beserta sumber dan strategi memperolehnya, berapa jumlah dana yang akan disalurkan dan jumlah orang atau lembaga yang akan menerimanya, serta saldo minimum yang harus tersedia sebagai cadangan untuk paling tidak setiap bulannya.
- 2) Membuat panduan berupa kebijakan umum dan petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan dana yang akan dilaksanakan di lembaga. Panduan ini harus mencakup penghimpunan, penyaluran, dan saldo dana.

- 3) Melakukan pengendalian dalam perhimpunan, penyaluran, dan saldo dana. Dengan pengendalian yang memadai diharapkan syari'ah terlaksana dengan baik, pembatasan dari muzakki/donatur terpenuhi, dan terwujudnya efisiensi dan efektifitas dana.

Selain merupakan tuntutan yang harus dilakukan, manajemen keuangan bagi organisasi pengelola zakat memiliki arti penting sebagai berikut:

- 1) Dana dikelola sesuai syari'ah.
- 2) Pertanggungjawaban kepada muzakki dan masyarakat pada umumnya dapat diberikan.
- 3) Penggunaan dana lebih tepat guna dan berdaya guna.
- 4) Kebutuhan dana dapat terantisipasi sejak dini.
- 5) Keamanan dana relatif terjamin.

**c. Perencanaan Keuangan BAZ Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta**

Untuk pengelola zakat BAZ Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli, anggaran yang paling penting terkait dengan pengelolaan keuangan adalah anggaran kas. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tugas pokok pengelola zakat ditinjau dari aliran dana, seperti diuraikan diatas, adalah penghimpun dan penyalur dana. Dana ini umumnya dalam bentuk kas. Sehingga dapat dikatakan tugas pokok pengelola zakat adalah menghimpun dan menyalurkan kas. Selain itu, walaupun tugas penghimpun dan tugas penyalur menjadi tanggung

jawab dua bagian yang berbeda, namun setiap bagian dalam organisasi pengelola zakat memerlukan kas.

Agar kas dapat disediakan dengan baik dan tepat pada saat diperlukan, maka perlu perencanaan kas yang berisi proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas. Proyeksi posisi kas yang berupa penerimaan dan pengeluaran kas pada saat tertentu di masa yang akan datang disebut sebagai anggaran kas atau cash budget.<sup>65</sup>

Pada dasarnya anggaran kas pengelola zakat dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu anggaran perhimpunan dan anggaran penyaluran. Anggaran penghimpunan yaitu proyeksi jumlah kas yang akan diterima yang berasal dari zakat, infaq-shodaqoh, dan sumber dana lainnya. Adapun anggaran penyaluran adalah estimasi penyaluran dana untuk para mustahiq dalam berbagai bentuk program serta biaya operasional pengelola zakat.

Penyusunan anggaran kas dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga metode berikut :

1) A priori

Adalah penyusunan anggaran dengan menetapkan proyeksi penghimpunan terlebih dahulu dan kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan penyaluran.

2) A posteriori

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

Adalah penyusunan anggaran dengan cara menetapkan estimasi penyaluran terlebih dahulu baru setelah itu ditetapkan target penghimpunan dengan mengacu pada estimasi penyaluran yang telah ditetapkan.

### 3) Pragmatis

Adalah penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman-pengalaman periode sebelumnya.

Adapun langkah-langkah dalam penyusunan anggaran kas adalah sebagai berikut :

#### 1) Anggaran penghimpunan

- a) Klasifikasi jenis sumber dana yang akan dihimpun (misal: zakat, infaq-shodaqoh, dan wakaf).
- b) Tetapkan estimasi dari masing-masing sumber dana berdasarkan data tahun lalu atau target penyaluran.
- c) Tetapkan nilai anggaran penghimpunan.

#### 2) Anggaran penyaluran

- a) Klasifikasi jenis penyaluran berdasarkan asnaf atau program.
- b) Tetapkan estimasi masing-masing asnaf atau program berdasarkan realitas asnaf/program tahun lalu atau berdasarkan target penghimpunan.
- c) Tetapkan nilai anggaran penyaluran. Anggaran penghimpunan dan penyaluran ini umumnya dibuat untuk periode satu tahun dan dirinci untuk masing-masing bulan.

Anggaran penghimpunan dan penyaluran ini umumnya dibuat untuk periode satu tahun dan dirinci untuk masing-masing bulan.

**f. Pengelolaan Keuangan BAZ Surakarta dan LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta**

Pengelolaan keuangan harus diwujudkan dalam suatu panduan baik berupa kebijakan umum maupun pedoman teknis. Panduan merupakan acuan atau standar yang digunakan dalam menerima, mencatat, menyimpan, menyalurkan, dan mempertanggungjawabkan dana. Panduan ini meliputi penghimpunan, penyaluran, dan saldo dana.

**1) Penghimpunan Dana**

Karakteristik sumber dan pembatasan-pembatasan seperti dikemukakan dalam hasil penelitian di atas harus menjadi pertimbangan para pengelola zakat. Oleh karena itu, organisasi pengelola zakat harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sesuai dengan kemampuan untuk memenuhi pembatasan yang melekat pada dana yang akan diterimanya. Sehubungan dengan pemahaman atas karakteristik sumber dan pembatasan-pembatasan ini, maka ada organisasi pengelola zakat yang tidak menghimpun zakat fitrah dan yang lainnya tidak menghimpun zakat dan infaq yang ada persyaratan tertentu. Kebijakan ini diambil



disebabkan mereka tidak mungkin memenuhi pembatasan yang ada.

Selain jenis dana, panduan yang harus dibuat terkait dengan penghimpunan adalah cara menerima dana. Penentuan cara penerimaan dana akan berpengaruh signifikan terhadap efektifitas penghimpunan dana. Penentuan cara penerimaan dana juga akan berpengaruh terhadap biaya dalam menghimpun dana karena setiap cara penerimaan dana membutuhkan sarana/alat dan pengendalian yang berbeda.

Ada tiga cara dana diterima; melalui rekening di bank, counter, atau “jemput bola”, dan khusus pegawai dari DEPAG Surakarta melalui pemotongan gaji yang dilakukan bendahara gaji.<sup>66</sup> Termasuk dalam cara dana diterima adalah pilihan tepat dari masing-masing cara tersebut. Artinya di bank mana membuka rekening, di lokasi mana membuka counter, atau wilayah mana saja yang akan dilayani dengan “jemput bola” merupakan bagian dari cara dana diterima. Organisasi pengelola zakat dapat saja memilih salah satu, dua, atau menggunakan tiga cara sekaligus. Pemilihan cara penerimaan dana harus disesuaikan dengan tempat kedudukan organisasi dan target muzakki/dermawan guna kemudahan akses dari keduanya.

---

<sup>66</sup> Nasiruddin (Ketua Garabim DEPAG Surakarta), Wawancara Pribadi, Surakarta, 12 Oktober 2004.

## 2) Dana Pengelola

Disini dasar perhitungan secukupnya digunakan apabila bagian amil dari zakat diambil sesuai kebutuhan. Konsekuensi dari penggunaan dasar perhitungan ini adalah:

- a) Pengelola harus dapat memberikan batasan yang jelas atas maksud “secukupnya” dan disusun dalam anggaran tahunan.
- b) Pengelola tidak mempunyai kekurangan atau kelebihan dana pengelola.
- c) Secukupnya untuk bagian amil dari zakat tidak melebihi  $\frac{1}{8}$  bagian atau 12,5% dari zakat yang diterima.

Pada dasarnya dana pengelola digunakan untuk keseluruhan biaya operasional organisasi yang mencakup antara lain:

- a) Gaji/upah.
- b) Inventaris.
- c) Biaya sosialisasi/publikasi.
- d) Biaya perjalanan.
- e) Biaya umum dan administrasi.

Operasional yang besar menuntut dana pengelola besar. Oleh karena itu, untuk organisasi yang baru berdiri yang belum dapat menghimpun dana dalam jumlah yang cukup perlu disediakan dana pengelola secara khusus oleh para pendiri organisasi (misalnya untuk keperluan operasional enam bulan

pertama). Sehingga para pengurus dapat berkonsentrasi untuk pengembangan organisasi.

### 3) Bunga Bank

Bunga bank dapat digunakan untuk membangun fasilitas/sarana umum bukan sarana ibadah. Dalam membangun fasilitas/sarana umum tersebut bunga bank tidak digunakan untuk membayar upah tukang, melainkan untuk pembelian bahan baku atau material.

Pencatatan bunga bank harus dilakukan sendiri, terpisah dari dana lain. Pencatatan seperti ini hanya dapat dilakukan manakala organisasi pengelola zakat menggunakan akuntansi dana (*fund accounting*) dalam sistem akuntansinya.

### g. Ruang Lingkup Bidang Sasaran

Dalam menentukan bidang sasaran perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1) Kebutuhan riil para penerima dana

Penetapan bidang sasaran harus sesuai dengan kebutuhan riil para penerima dana yang ada di wilayah kerja pengelola zakat masing-masing. Pengguliran program dalam bidang sasaran yang sesuai kebutuhan penerima dana akan menumbuhkan rasa memiliki pada diri mereka terhadap program tersebut. Istilah yang tepat dalam hal

ini adalah diwujudkannya sikap bottom-up dan bukannya top-down.

2) Skala prioritas permasalahan

Kebutuhan riil para penerima sangat mungkin tidak terbatas. Jika terjadi hal demikian, maka sudah seharusnya dibuat skala prioritas dalam permasalahan yang ada. Sehingga, walaupun memerlukan waktu yang panjang karena bertahap namun ada penyelesaian masalah yang jelas dilakukan.

3) Kemampuan sumber dana dan sumber daya manusia

Sebagaimana diuraikan diatas pemilihan bidang sasaran sangat terkait dengan tersedianya sumber dana dan sumber daya manusia. Keterbatasan dalam dua sumber ini hanya dapat diatasi dengan adanya sinergi dan aliansi strategis antara organisasi-organisasi pengelola zakat yang ada di wilayah yang sama atau dengan organisasi pengelola zakat yang cakupan wilayah kerjanya lebih luas.

**h. Bentuk dan sifat penyaluran**

Penyaluran dalam dua bentuk diatas umumnya disertai dengan sifat penyaluran yang berbeda. Untuk bantuan sesaat sifat penyaluran idealnya adalah hibah. Adapun untuk pemberdayaan, dana yang disalurkan tidak identik dengan pinjaman. Ada tiga sifat penyaluran dana dalam pemberdayaan; hibah, dana bergulir-qordhul hasan, dan

pembiayaan. Tiga sifat penyaluran ini harus kita bedakan pemberlakuannya antara dana zakat dengan dana bukan zakat.

Untuk penyaluran dana bukan zakat penyaluran berupa hibah, dana bergulir-qordhul hasan, dan pembiayaan dapat dilakukan. Sedangkan untuk dana zakat ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Hibah, zakat pada asalnya (asholah-nya) harus diberikan berupa hibah. Artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahiq setelah penyerahan zakat.
- 2) Dana bergulir-qordhul hasan, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir (pinjaman) oleh pengelola kepada mustahiq dengan catatan harus qordhul hasan. Artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahiq kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama persis dengan jumlah yang dipinjamkan.
- 3) Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahiq tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan. Artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shohibulmaal* dengan *mudhorib* dalam penyaluran zakat.

#### **i. Prosedur Pengeluaran Dana**

Prosedur pengeluaran dana yang baku umumnya melibatkan pihak-pihak berikut :

- 1) Pengguna dana, yaitu pihak yang berhak mengajukan permintaan pengeluaran dana.
- 2) Verifikator dan otorisator, yaitu pihak yang berhak memverifikasi dan menyetujui pengeluaran dana. Verifikator dan otorisator ini dalam organisasi yang besar melibatkan dua atau lebih orang secara berjenjang.
- 3) Kasir, yaitu pihak yang bertindak sebagai juru bayar.

Panduan mengenai penerima dana, ruang lingkup bidang sasaran, serta sifat dan bentuk penyaluran akan menjadi kriteria dan merupakan bagian dari prosedur pengeluaran dana.

#### **j. Pertanggungjawaban Pengeluaran Dana**

Dalam masalah zakat ada sisi-sisi yang bersifat pasti (qath'i) yang tidak menerima interpretasi baru, misalnya hukum wajib zakat, dan macam barang atau biji-bijian yang secara langsung ditunjuk oleh hadist. Tetapi dalam masalah operasionalnya dalam rangka pengembangan amwal alzakawiyah (obyek zakat), tetap menerima kemungkinan ijtihad baru sesuai zaman yang ada, macam amwal yang ditunjuk oleh hadist Nabi Muhammad nilainya sebagai sampel. Para ahli hukum Islam (fuqaha) menyebutkan al-hasru fih idafi, yaitu pembatasan yang bersifat additional, yaitu dikaitkan dengan apa yang ada pada waktu dan lingkungan serta menurut kebiasaannya sebagai makan pokok. Demikian juga siapa individunya yang berhak menerima zakat yang tersebut dalam delapan golongan itu bukan suatu

penafsiran mati, tetapi tetap konteks dengan duruf yang ada. Disini diperlukan ijtihad baru untuk menampakkan formulasi baru menuju pengembangan zakat yang kontekstual.

Di sisi lain pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasul Muhammad dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada penerima zakat (*al-ashaf al-tsamaniyah*). Untuk melestarikan pelaksanaan seperti itu, Khalifah Abu Bakar terpaksa mengambil tindakan keras karena adanya sementara pembangkangan-pembangkangan yang menolak menyerahkan zakatnya kepada para petugas yang dikirim khalifah. Berkat ketegasan tindakannya, cara pelaksanaan zakat seperti semula dapat dipertahankan. Baru pada zaman Khalifah Utsmanlah diadakan suatu kelonggaran dengan membebaskan para pembayar zakat untuk melaksanakan penyerahan zakat kepada para penerima zakat, yaitu dalam dua jenis zakat: zakat logam mulia (*zakat al-naqdain*) dan zakat perniagaan (*zakat al-tijarah*).

Pada zaman kemerdekaan sekarang ini, umat Islam Indonesia berupaya melalui saluran ketentuan-ketentuan kenegaraan yang berlaku, berupaya meningkatkan pelaksanaan zakat dengan memperjuangkan adanya undang-undang zakat, sebagaimana tercatat dalam sejarah parlemen/DPR pada waktu lalu. Namun hal itu belum berhasil. Terkecuali beberapa langkah yang dapat dicatat, seperti

dikeluarkannya beberapa peraturan oleh menteri agama sejak tahun 1950-an dan seterusnya. Kesiadaan menangani urusan pengumpulan zakat, dan kemudian beberapa pemerintah daerah telah pula membuat dan melaksanakan peraturan-peraturan daerah tentang pelaksanaan pemungutan atau pembagian zakat di daerahnya masing-masing. Disamping itu, dapat pula kita melihat bahwa sejak lama organisasi-organisasi Islam, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat lokal, telah mencoba menangani secara terbatas urusan pelaksanaan zakat melalui lembaganya masing-masing.

Pada era reformasi, pemerintahan sekarang telah berhasil menetapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan didukung dengan keputusan menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 tersebut.

#### **k. Pengendalian Keuangan**

Pengendalian keuangan yang baik dalam suatu organisasi dapat diwujudkan melalui eksisi dan sehatnya unsur-unsur sebagai berikut:

##### **1) Unit atau orang penanggung jawab keuangan**

Dalam organisasi pengelola zakat, baik besar maupun kecil, harus ada unit atau orang tertentu yang menjadi penanggungjawab dalam pengelolaan keuangan. Adanya unit atau orang tertentu ini sebagai pemisahan fungsi antara amil yang satu dengan amil yang lainnya, unit yang satu dengan unit yang lainnya, atau antara amil yang satu dengan yang lainnya dalam satu unit. Tidak boleh terjadi setiap



orang bertindak sebagai bendahara. Artinya semua bertindak sebagai penerima, pencatat, dan yang mengeluarkan uang. Uang masuk dan keluar hanya dilakukan melalui satu pintu.

## 2) Anggaran

Anggaran merupakan alat pengendalian. Anggaran dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau alat pembanding dalam mengevaluasi kegiatan.

## 3) Kebijakan

Kebijakan yang jelas (misalnya otorisasi pengeluaran) dapat menghindarkan pengeluaran/penggunaan dana oleh pihak-pihak yang tidak berkompeten.

## 4) Pelaporan

Pelaporan dan publikasi merupakan sarana pengendalian keuangan yang melibatkan bukan hanya atasan melainkan para muzakki dan seluruh lapisan masyarakat.

## 5) Pencatatan

Dengan pencatatan maka setiap transaksi keuangan dapat ditelusuri.

## 6) Prosedur

Setiap penerimaan atau pengeluaran harus melalui prosedur untuk menghindari penerimaan atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

## 7) Personalia

Pengelola yang amanah dan profesional merupakan unsur utama dalam pengendalian. Sebaik apapun unsur-unsur yang lain tidak banyak berarti tanpa pengelola yang salimah dan berakhlak mulia.

## 8) Internal Audit

Internal audit dapat menghindarkan penyimpangan-penyimpangan karena kelalaian ataupun kesengajaan baik terkait dengan syari'ah maupun etika umum yang berlaku di masyarakat.

## 2. Reinterpretasi Zakat dan Distribusi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi masyarakat

Apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad termasuk penanganan zakat, lebih merupakan keteladanan yang sangat baik untuk dijadikan sumber inspirasi bagaimana tujuan etis dari konsep zakat, yang berupa kesejahteraan masyarakat itu diimplementasikan dalam kehidupan nyata pada setiap zaman yang mengalami proses kemajuan.

Dalam Al-Qur'an, Al-Ahzab : 21

*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*<sup>67</sup>

Juga Allah berfirman dalam Surat Al-Ambiya : 107 :

*Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta alam.*<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, 1984/1985, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, yayasan penyelenggara penterjemah Al-Quran, Jakarta. Hal. 670.

<sup>68</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit.*, Hal. 508.

Dengan demikian prinsip relativitas dan kontekstualitas syari'at sangat jelas. Diakui secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah : 48

*Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.<sup>69</sup>*

Dalam Al-Hajj : 67 Allah menegaskan :

*Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari'at tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syari'at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus.<sup>70</sup>*

Dengan demikian, masing-masing selaku komunitas yang berbeda, Allah mencanangkan syari'at dan metode yang berbeda. Oleh karenanya, janganlah hendaknya lantaran kerangka pemahaman keagamaan yang dogmatis-formalitas, prinsip kontekstualitas yang jelas itu menjadi kabur dan dikaburkan. Akibatnya, apa yang sebenarnya relatif, dan seperti dinamis, distatiskan. Syari'at yang berarti jalan (Wasilah) untuk mencapai tujuan, telah diberi derajat kemutlakan seperti halnya tujuan (gayah), bahkan banyak terjadi wasilah itu dihayati sebagai tujuan itu sendiri.

Penafsiran kedelapan asnaf harus disesuaikan dan memadai dengan kondisi sosial kita sekarang.

---

<sup>69</sup> *Ibid*, Hal. 168.

<sup>70</sup> *Ibid*, Hal. 522.

a. Fakir Miskin

Jumhur ulama sepakat, bahwa fakir miskin itu sama saja. Dalam artian, mereka sama-sama tidak dapat memenuhi kebutuhannya.<sup>71</sup> Dengan demikian keduanya dianggap satu kata karena perbedaannya memang tidak prinsipil. Keduanya adalah kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi, ialah kemiskinan absolute. Kemiskinan absolute diartikan suatu keadaan dimana tingkat pendapatan dari seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok: sandang, pangan, papan, pendidikan, perumahan, dan kesehatan. Dimensi ini terlihat dari jumlah penduduk yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan (poverty line): 850/870 per kapita per tahun; 1900 gram kalori dan 40 gram protein per orang per hari; 240 kg beras per kapita per tahun.<sup>72</sup>

Umumnya Fuqaha menetapkan kebutuhan pokok hanya pada tiga hal, pangan, sandang dan papan, dalam perhitungan yang semula kuantitatif. Pangan asal kenyang. Sandang asal tertutup, dan papan asal bisa untuk berlindung.<sup>73</sup> Sayyid Sabiq mengatakan, kebutuhan pokok itu meliputi : pangan, sandang, papan, kendaraan, dan alat kerja.<sup>74</sup>

Dengan demikian, untuk konteks sekarang ini, konsep kebutuhan pokok seperti ini perlu penyesuaian. Bukan saja jumlahnya,

<sup>71</sup> Yusuf al-Qardawy, 1975, *Muskilah al-I'iqar*, Maktabah Wahbah, Hal. 92.

<sup>72</sup> Hudiyanto, 1993, *Sejarah Kemiskinan di Indonesia*, dalam Said Tuhuleley, *Permasalahan Abad XXI Sebuah Agenda*, Yogyakarta : Sipres, Hal. 75.

<sup>73</sup> Al-Qardawy, *Fiqhus Zakah*, Jilid II, Hal. 548.

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid I, Hal. 324.

tetapi peningkatan mutu juga sama penting, sehingga kebutuhan pokok agar manusia hidup secara wajar menurut Masdar meliputi :

- 1) Pangan dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar.
- 2) Sandang yang dapat menutupi aurat dan melindungi gangguan cuaca.
- 3) Papan yang dapat memenuhi kebutuhan berlindung dan membina kehidupan keluarga secara layak.
- 4) Kesehatan yang memungkinkan kesembuhan dari penyakit yang dideritanya.
- 5) Pendidikan yang memungkinkan pihak yang bersangkutan mengembangkan potensi dasarnya selaku manusia : kognitif, efektif dan psikomotorik.

Dengan demikian, sesuai dengan konteks kehidupan sosial ekonomi kita sekarang, distribusi dana zakat untuk sektor fakir-miskin ini bisa mencakup hal-hal tersebut di atas.

Kadar yang diberikan fakir dan miskin ada dua bentuk :

- 1) Mereka yang mempunyai pekerjaan.
- 2) Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan.

Pada kelompok pertama, mereka diberi zakat untuk pekerjaannya atau sarana meningkatkan pekerjaannya, baik yang nilainya kecil maupun besar, diukur menurut kebutuhan umum sejauh mana pekerjaan itu bisa mendapatkan keuntungan. Kebutuhan itu akan

berbeda sesuai dengan kondisi pekerjaannya, tempat, waktu dan kondisi seseorang.<sup>75</sup>

Imam An-Nawawi berkata : “Sekelompok kawan-kawan kami telah memberikan gambaran dalam masalah itu sebagai berikut; bagi penjual sayuran diberi antara 5 sampai 10 dirham, dan orang yang pekerjaannya menjual batu permata umpamanya, diberi 10.000 dirham, jika memang tidak akan cukup bila diberi kurang dari itu.

Bagi pedagang, penjaja kue, penjual obat, tukang penukar uang (money changer) mereka diberi sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi penjahit, tukang kayu, penatu, tukang jagal dan ahli-ahli ketrampilan lainnya, mereka diberi peralatan sesuai dengan kebutuhannya. Dan bagi para penggarap tanah diberi modal untuk membeli sebidang tanah atau sebagainya yang dapat menghasilkan cukup untuk selamanya.<sup>76</sup>

Adapun pada kelompok kedua, yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, mereka diberi sesuai dengan kebutuhannya, anak dan keluarganya untuk tempat tinggal, makan dan kendaraan dalam masa satu tahun. Ada yang mengatakan diberinya sesuai dengan batasan umur secara umum.

Barangkali pendapat ini atas dasar perkataan Umar Ibn Khatthab ra sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *ibid.*

kitabul amwal : “Jika kamu sekalian memberikan sesuatu, maka cukupkanlah”.<sup>77</sup>

b. Amil

Amil adalah para pekerja yang telah diserahi oleh penguasa atau penggantinya untuk mengambil harta zakat, mengumpulkan, menjaga dan memindah-mindahkannya. Sehingga termasuk orang yang memberi minum dan menggembalanya, jika zakat itu berupa ternak. Begitu pula, petugas keamanan, sekretaris, petugas penimbang, tukang hitung dan perangkat lainnya yang dibutuhkan untuk pengumpulan dan pembagian zakat.<sup>78</sup>

Mereka itu diberi zakat walaupun kaya, sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang Islam.

Dari Bisyr bin Sa'id bahwa ibn Sa'di Al-Maliky berkata : “Umar pernah mempekerjakanku dalam pembagian shadaqah, maka setelah saya selesai pekerjaannya dan saya sampaikan kepadanya, ia memerintahkan agar saya mengambil imbalan dari pekerjaan itu. Maka saya katakan : “Pekerjaan ini hanya untuk Allah”. Umar pun menjawab : “Ambillah apa yang telah diberikan-Nya kepadamu, sesungguhnya dahulu saya pernah menjadi amil di masa Rasulullah, maka beliau pun memberikan bagian dari pekerjaanku, saya ketika itu juga menjawab

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

seperti jawabanmu, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadaku : “Apakah kamu diberi sesuatu tanpa meminta, maka makanlah atau dishadaqahkan” (Muttafaq alaih).<sup>79</sup>

Dalam kitab Nailul-authar : “Hadist tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan para petugas pembagi zakat itu merupakan sebab untuk mendapatkan imbalan, sebagaimana halnya sifat kefakiran dan kemiskinan. Jika pekerjaan itu merupakan sebab, maka kaidah syar’i menetapkan bahwa yang diambilnya merupakan upah sebagai imbalan baginya. Karena itu ashhabus-Syafi’i mengatakan : “Berdasarkan ini, maka mereka berhak untuk mendapatkan upah selayaknya”.<sup>80</sup>

Apa yang mereka ambil dari harta zakat adalah dari nilainya harta yang dikumpulkan, atau yang diberikannya sebagai upah yang telah ditentukan bukan melihat banyak sedikitnya harta yang didupatkannya.<sup>81</sup>

Sebagian ahli fiqih memperbolehkan memberikan zakat kepada para hakim atau sepadanannya, diqiyaskan dengan amil, karena keduanya sama- sama memberikan manfaat kepada ummat Islam secara umum. Ibn Rusyd mengatakan : “Orang-orang yang memperbolehkan zakat diberikan kepada amil, sekalipun ia kaya, mereka telah memperbolehkan pula bagi para hakim atau sepadanannya, yaitu orang-orang yang memberikan manfaat kepada ummat Islam secara umum. Sedang orang yang tidak membenarkan

---

<sup>79</sup> Al-Qardawy, *Op.Cit.*,

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid*



pengqiyasan tersebut, hanya keberatan dibolehkannya diberikan kepada orang kaya”.

Yang terpenting disebutkan di sini adalah kemungkinan secara syar’i maupun secara logika untuk mengembangkan pengelolaan masalah zakat, dan pembagiannya, karena pengembangan kehidupan berikut unsur-unsurnya, dan semakin banyak, besar dan macam-macam kekayaan yang ada.

Dan sudah seharusnya mencari bentuk pengelolaan yang baik dan lebih kuat, bisa menghantarkan sasaran-sasaran yang dikehendaki dengan lebih sempurna, yaitu memperoleh zakat dari orang-orang yang berkewajiban dan membagi-bagikannya kepada yang berhak dengan adil, tidak mengurangi atau melebihkan.

Untuk memudahkan pelaksanaan, perlu diusulkan untuk dibuatkan jadwal (sistem komputerisasi) atau karena sering terjadi kelengahan maka perlu disusun daftar pemasukan atau semacamnya, sehingga petugas dengan mudah mencari mana yang harus dikeluarkan, tanpa susah payah dalam mencarinya dan lebih efisien, tidak hanya disibukkan oleh perhitungan yang banyak mengandung kekeliruan.

Di samping itu, perlu ada petugas khusus, untuk menyampaikannya, ini penting agar tidak hanya menarik saja, tetapi zakatnyapun bisa sampai kepada yang berhak. Dan akan lebih baik lagi

bila setiap kelompok dari kelompok penerima zakat yang delapan ini mempunyai petugas sendiri-sendiri.

Dan jika perlu dibentuk petugas pengawas, yang kerjanya mengawasi dan melaporkan orang yang berlaku aniaya, baik yang mempunyai harta atau lainnya, memutuskannya dengan adil untuk kepentingan orang yang bersedekah itu sendiri maupun bagi yang berhak menerimanya.

Dan sudah barang tentu yayasan tersebut memerlukan biaya untuk pengaturannya, kesejahteraan petugas, biaya kantor seperti kertas dan kebutuhan-kebutuhan kantor lainnya.

Maka dapat dikatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut diambilkan dari bagian zakat milik amil sebagaimana disebut dalam ayat shadaqah.

#### c. Muallaf

Dalam Fiqh konvensional, muallaf diberikan zakat sekedar untuk membujuk hatinya agar mantap imannya. Namun untuk konteks sekarang ini, bagian zakat untuk muallaf pun perlu disediakan, hanya saja bukan bertujuan untuk membujuk seseorang masuk dalam Islam, melainkan untuk membujuk orang-orang, anggota masyarakat yang karena satu dan lain hal terperosok ke jalan yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaannya. Dengan dana zakat diharapkan mereka bersedia kembali ke jalan yang benar sesuai dengan fitrahnya yang

cenderung kepada kebenaran. Dalam pada itu muallaf untuk konteks kemasyarakatan kita sekarang sasarannya adalah:

- 1) Usaha menyadarkan kembali orang-orang yang terperosok ke dalam tindak asusila dan atau kejahatan lain/kriminal.
- 2) Biaya rehabilitasi mental atas orang-orang/anak-anak yang diakibatkan oleh misalnya penyalahgunaan narkoba dan yang sejenisnya.
- 3) Pengembangan masyarakat atau suku-suku terasing.
- 4) Usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan yang lain.<sup>82</sup>

Bagian muallaf merupakan kemukjizatan syari'at yang abadi sepanjang masa untuk agama ini. Ketika berdirinya negara Islam pada masa Nabi Muhammad bagian ini sangat dibutuhkan untuk menjinakkan hati yang kotor agar lenyap kotorannya, jiwanya menjadi tenang, kekhawatirannya terendam dan bisa untuk membantu orang-orang yang bersama mereka ketika dalam kesulitan.

Sesungguhnya negara yang berdirinya masih relatif muda, dalam tempo dekat akan bermunculan nada-nada yang mengajak untuk memburukkan kondisinya yang baik itu, memberitakan dengan jelek sehingga manusia yang berada di sekitarnya tidak akan percaya kepadanya. Maka akan diperintahkannya menghimpun semua kekuatan dari timur sampai ke barat untuk melawannya, dan sekiranya dikerahkan niscaya akan mampu untuk menghancurkannya.

---

<sup>82</sup> Masdar F. Mas'udi, 1993, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus, Hal. 126-134.

Bukankah dalam hal ini ada kewajiban untuk memberikan kesan positif di hati manusia, dengan melakukan berbagai bentuk kegiatan yang mempunyai unsur kesamaan, umpamanya diberikan kepada para pengelola surat kabar/mass media, agen-agen berita dan petugas-petugas penyiaran, agar menyebarluaskan ke berbagai penjuru dunia akan dampak positif negaranya, tujuan dan kelebihanannya agar manusia menjadi simpati terhadap negara dan agamanya.

Bukankah jika bagian mu'allaf diberikan untuk mereka dan seprofesinya berarti salah satu siasat untuk kemaslahatan ummat Islam dan sekaligus menghindari perbuatan-perbuatan jahat mereka?

Tidaklah bagian ini pada masa Islam atau permulaan negara Islam diberikan kecuali untuk menimbulkan rasa cinta bagi sebagian manusia terhadap Islam dan meredam perbuatan-perbuatan jahat orang-orang lain?

#### d. Riqab

Dalam kitab-kitab fiqh konvensional mengartikan riqab adalah orang-orang dengan status budak (*Mukatab*).<sup>83</sup> Mereka diberi dana untuk melepaskan diri dari perbudakan.<sup>84</sup> Untuk masa sekarang manusia dengan status budak belian seperti ini sudah tidak ada lagi diketemukan dan memang Islam sendiri menghapus sistem perbudakan. Paling yang ada sekarang adalah pramuwisma (PRT). Dalam pada itu, jika kita menengok makna yang lebih dalam, arti riqab

<sup>83</sup> Wahbah al-Zuhaely, Tanpa Tahun, Zakah, Hal. 273.

<sup>84</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, Hal. 331.

secara jelas menunjuk pada gugusan manusia yang tertindas dan tereksplorasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural. Berbeda dengan istilah fakir-miskin yang lebih merujuk pada manusia yang menderita secara sosial ekonomi, maka riqab merujuk pada orang/masyarakat yang menderita secara budaya, dan terutama politis. Bila persoalan yang dihadapi pihak pertama lebih menjurus pada bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup, maka persoalan pokok yang dihadapi pihak riqab adalah bagaimana ia atau mereka bisa mengatur (memilih dan menentukan) arah dan cara hidupnya.

Sejalan dengan pengertian ini, kategori riqab akan berarti usaha pemerdekaan orang/kelompok orang yang sedang dalam keadaan tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidup (nasibnya) sendiri. Dalam konteks individu, dana zakat ini bisa ditasarufkan untuk :

- 1) Mengentaskan buruh-buruh rendahan dan buruh-buruh kasar dari belenggu majikan yang menjeratnya.
- 2) Mengusahakan pembebasan orang-orang tertentu yang dihukum/dipenjara hanya lantaran menggunakan hak dasarnya untuk berpendapat atau memilih. Sementara dalam bentuknya yang struktural, dana riqab ini bisa berarti dana untuk proses penyadaran dan pembebasan masyarakat tertindas berkaitan dengan hak-hak

dasar mereka sebagai manusia, baik dalam dimensi individual maupun sosialnya.<sup>85</sup>

Pengarang kitab *Kasyaful qana'* mengatakan : “Dan diperbolehkan harta zakat untuk membebaskan tawanan muslim yang berada di pihak orang kafir. Yang demikian itu berarti telah melepaskan dari belenggu penawanan seperti halnya melepaskan hamba sahaya dari perbudakan, dan termasuk perbuatan menjunjung tinggi nilai-nilai agama”.

Al-Ustadz Mahmud Syaltut ra memperbolehkan bagian hamba sahaya dipergunakan untuk membantu para pejuang dalam rangka mencapai kemerdekaan bangsanya. Dikatakan dalam kitab *Fatawa* halaman 101-102 : “Yang paling terkenal dalam memberikan bagian ini adalah membeli hamba sahaya kemudian dimerdekakannya, atau membantu meringankan mereka dalam proses kemerdekaannya yang diserahkan kepada pemiliknya. Sejak Islam memotivasi untuk memerdekakan manusia, maka bagian dari kelompok ini telah mampu menghapuskan perbudakan sebagaimana yang diperintahkan Islam. Hanya saja untuk saat ini, bagian itu perlu disalurkan untuk kemerdekaan manusia yang lebih mendesak, yaitu kemerdekaan bangsa dalam melindungi pikiran, harta benda, kekuasaan dan kemerdekaan negaranya. Kemerdekaan dalam pengertian pertama hanya bersifat individu dan negara akan tetap tegak. Sedang

---

<sup>85</sup> Masdar F., *op.cit.*, Hal. 155-156.

kemerdekaan dalam arti kedua menyangkut kemerdekaan bangsa dan umat secara umum dan menyeluruh, di mana lebih penting dan berhak diselamatkan terlebih dahulu. Mengangkat kerendahan martabat bangsa itu tidak cukup dengan harta zakat saja, tetapi juga dengan jiwa”.

e. Garim

Dalam kitab-kitab tafsir tersebut di atas, garim dibagi menjadi dua macam, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk kepentingan orang lain. Dengan demikian, terbatas pada pengertian perorangan. Nampaknya untuk saat ini di samping dana zakat untuk membayar hutang orang-orang yang pailit, ada alasan juga untuk usaha peningkatan management orang-orang yang melakukan usaha dengan modal pinjaman. Jadi, selain didistribusikan untuk kepentingan kuratif, membayar hutang seseorang yang jatuh pailit, bisa juga dana zakat untuk keperluan yang bersifat preventif, menyiapkan/melatih orang (pengusaha) agar tidak mudah jatuh pailit.<sup>86</sup>

Di samping itu, melalui garim yang berhutang untuk kemaslahatan umum dalam konteks kehidupan perekonomian saat ini, dana zakat selayaknya bisa diberikan untuk menanggung/mengurangi beban hutang yang diderita oleh masyarakat atau negara. Maka sangat

---

<sup>86</sup> *Ibid*, Hal. 157.

beralasan kiranya dana zakat dimanfaatkan untuk membayar hutang desa atau negara miskin.<sup>87</sup>

Jika ayat zakat itu diamati, maka akan ditemukan bahwa kelompok penerima zakat yang delapan itu bisa dibagi menjadi dua bagian: *pertama*: Kelompok orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil dan mu'allaf, maka didahului dengan huruf jar lam, *Kedua* : Didahului dengan huruf jar lam menunjukkan makna dharfiyyah (menempati). Di sini dapat kita rasakan bahwa dalam kelompok kedua, tidak ada unsur memiliki tetapi hanya mempunyai hak, karena itu diberikan kepada mereka atas segi kemanfaatan.

Orang yang berkewajiban zakat, jika menutup hutang orang yang mempunyai hutang, maka akan bermanfaat baginya. Dan jika kebetulan orang yang mengugurkan hutang itu orang yang menghutangkan, maka akan bermanfaat terhadap kewajiban zakatnya dan tanggungan hutang pun sudah bebas. Demikian pula setiap perbuatan yang semacam itu.

Yang terpenting untuk disebut di sini, adalah bahwa sebagian fuqaha' ada yang mendahulukan membayar harta zakat untuk membayar hutang orang yang berhutang dari pada untuk diberikan kepada orang fakir.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*



Terdapat dalam sebagian kitab Hanafiyyah : *"Orang yang berhutang itu didahulukan diberi harta zakat daripada orang fakir."*

Sependapat dengan pendapat Hanafiyyah, Allah SWT tentu lebih tahu karena menunjukkan adanya hikmah yang menakjubkan, ketentuan yang sangat teliti, memuliakan manusia dan menjaga sifat kemanusiaan maupun sifat keadaannya.

Hutang itu menimbulkan kesusahan, kesedihan dan sifat rendah diri yang melebihi kesusahan orang fakir. Orang yang mempunyai hutang, di siang harinya makan tidak enak dan di malam harinya tidur tidak nyenyak. Hal yang demikian itu disebabkan oleh bayang-bayang hutangnya yang selalu membayangi setiap saat.

Sesungguhnya agama Islam ini tidak mewajibkan bagi orang yang berhutang untuk menjual rumah yang dihuninya guna membayar hutangnya sebagaimana undang-undang jahiliyyah mengaturnya. Tetapi Islam menetapkan bahwa rumah itu dibiarkan untuk dihuni bersama keluarganya, sedang bagi hakim diwajibkan memberikan harta zakat guna membayar hutangnya, menghilangkan kesusahan dan kesedihannya agar mereka hidup mulia, bisa merasakan kemuliaan sebagai manusia seperti apa yang dikehendaki oleh Allah.

Sebagian ulama sekarang telah memperbolehkan memberikan hutang yang baik dengan harta dari zakat, yaitu hutang yang tidak mengandung unsur riba. Kebolehan itu atas dasar penyamaan dibolehkannya meminjamkan kepada orang yang mempunyai hutang.

Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah : Al-Ustadz M. Abu Zahrah, Abd. Wahhab Khalaf, Abdurrahman Hasan. Mereka berargumentasi bila hutang yang baik saja diberi harta zakat, maka tentunya akan lebih diperbolehkan bila diberikan untuk menghutangi dengan bebas unsur riba, kemudian dikembalikan ke baitul mal.

DR. Yusuf Qardhawi dalam kitab zakatnya cenderung berpendapat demikian, dituliskan sebagai berikut : “Saya berkeyakinan bahwa qiyas yang benar dan maksud umum dalam ajaran Islam adalah memperbolehkan kepada kita untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkannya dari bagian gharim. Tetapi harus diatur dengan sebaik-baiknya dan dikeluarkan sehingga dengan itu zakat bisa dibagikan dengan praktis dan menerangi riba serta menghapuskan segala bentuk bunga ribawi.”<sup>88</sup>

Prof. DR. Muhammad Humaidullah (Haiderabat) guru besar universitas Istambul, Paris dan lain-lainnya, telah disebutkan oleh Yusuf Qardhawi bahwa mereka telah memperbolehkan harta zakat untuk menghutangkan yang bebas dari riba.<sup>89</sup>

#### f. Sabilillah

Secara harfiah sabilillah berarti jalan Allah. Kitab-kitab fiqh beranjak dari realitas yang terjadi pada zaman Rasulullah, sabilillah

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

diartikan sebagai tentara yang berperang melawan orang-orang kafir.<sup>90</sup>

Pengertian semacam ini adalah pengertian sezaman, tetapi tetap bertahan pada pengertian harfiah akan segera nampak kurang relevan untuk banyak duruf. Mengapa Rasulullah memberikan arti jalan Allah dengan tentara yang berperang melawan orang-orang kafir, adalah karena pada durufnya jalan Allah pada waktu itu sedang dihadang secara opensif di sana-sini oleh kekuatan jalan kekufuran. Siapakah mereka, ialah orang-orang yang memusuhi Rasulullah dan umatnya. Maka barang siapa yang berjuang menegakkan jalan Allah dengan kesediaan berperang melawan orang-orang yang memusuhinya, mereka adalah sabilillah. Dalam pada itu, sesuai dengan perkembangan budaya ketika itu, perlawanan terhadap kekufuran tiada lain adalah dalam bentuk “angkat pedang di medan pertempuran”, perlawanan fisik melawan orang-orang kafir.

Secara kontemporer keadaan sudah berubah lebih kompleks, tidak cukup sabilillah diartikan secara harfiah, yakni sabilillah adalah *sabil al-khair* yang jalan kebaikan. Mahmud Syaltut mengartikan sabilillah dengan arti luas, yaitu segala bentuk penjagaan terhadap eksistensi umat, baik yang bersifat materi maupun non-materi dan syi'arnya bisa dirasakan sehingga melebihi umat yang lain serta kebutuhannya bisa terpenuhi dari dirinya sendiri. Beliau mengungkapkan, “Saya tidak pernah mendapatkan arti sabilillah di

---

<sup>90</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *op.cit.*, Hal. 874.

dalam Al-Qur'an selain arti kebajikan secara umum, kebajikan yang merata, termasuk dalam ayat pendayagunaan zakat.<sup>91</sup> Banyak ulama yang sejalan dengan pendapat Mahmud Syaltut, antara lain : Muhammad 'Abduh,<sup>92</sup> Sayyid Qutub,<sup>93</sup> Mahmud Abu Su'ud,<sup>94</sup> Abu Fatah Tabarrah,<sup>95</sup> dan Abu Bakar Al-Jazariry.<sup>96</sup>

Sedangkan Yusuf Al-Qardawy, meskipun cara pengungkapannya berbeda, tetapi intinya sama. Beliau menyatakan, tidak ada perluasan arti sabilillah untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Begitu pula tidak terlalu sempit pengertiannya, hanya untuk jihad dalam arti bala-tentara saja. Perang hanya sebagian dari bentuk jihad. Jihad itu bisa dilakukan dengan ilmu, lisan dan tulisan. Dan kadangkala bisa dilakukan melalui bentuk pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan kekuatan balatentara. Usaha untuk menegakkan hukum Islam ini juga termasuk jihad. Semua bentuk jihad memerlukan dana yang diambil dari zakat.<sup>97</sup>

Dengan melihat berbagai pendapat pakar fiqh klasik maupun kontemporer, Muhammad Abdul Qadir menyimpulkan, bahwa tidak melihat adanya nash, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits

<sup>91</sup> Mahmud Syaltut. 1968, *Al-Islam 'Aqidah Wa syari'ah*, Kairo : Dar Asy-Syuruq, Hal. 124.

<sup>92</sup> Muhammad Rasyid Rida, Tanpa Tahun, *Al-Fatawa*, Kairo : Dar Asy-Syuruq, Hal. 102.

<sup>93</sup> Sayyid Qutub, 1958, *Al-adalah Al-Ijtima'iyah Fi al-Islam*, Kairo : Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, Hal. 135.

<sup>94</sup> Mahmud Abu Su'ud, 1968, *Khutut Ra'isah Fi al-Iqtisad al-Islam*, Kuwait : Al-Manar al-Islamiah, Hal. 17.

<sup>95</sup> Abul Fatah Tabarrah, Tanpa Tahun, *Ruhuddin Al-Islam*, Hal. 328.

<sup>96</sup> Abu Bakar Al-Jazairi, Tanpa Tahun, *Minhaj Al-Muslim*, Saudi Arabia : Ad Da'wah Bi al-Madinah Munawwarah, Hal. 272.

<sup>97</sup> Yusuf Al-Qadawiy, *op.cit.*, Hal. 668-669.

yang melarang sebagian dari bagian sabilillah digunakan untuk kepentingan umum, yaitu tegaknya agama dan negara, seperti membangun rumah sakit, panti asuhan anak jompo, pesantren/madrasah, perpustakaan, membantu organisasi sosial untuk kepentingan kemanusiaan, mendirikan yayasan sosial untuk kepentingan negara dan masyarakat, membangun jembatan, membuka jalan-jalan dan pelayanannya, menjaga keamanan jalan-jalan yang dilalui untuk berhaji, melengkapi sarana air minum, dan begitu pula untuk kepentingan berjihad, seperti untuk membeli senjata berbagai bentuk, baik udara, laut maupun darat; membangun pabrik senjata; bandaran-bandaran perang; pabrik kapal perang; pangkalan-pangkalan tentara sebagai tempat untuk mendeteksi musuh-musuh serta untuk membeli segala kebutuhan perlengkapan kekuatan dan pemotretan dan lain-lainnya.<sup>98</sup> Masdar F. menulis secara rinci untuk:

- 1) Menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintahan (*Al-Hukumah*) yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, baik jajaran legislatif (*syuriah*) maupun eksekutif (*tanfiziyah*).
- 2) Melindungi keamanan warga negara dari kekuatan-kekuatan destruktif yang melawan hak-hak kemanusiaan dan warga negara.
- 3) Menegakkan keadilan (*yudikatif*) menyangkut polisi, jaksa, hakim, pembela dan berikut perangkat administrasinya.

---

<sup>98</sup> Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Tanpa Tahun, *Infiaqul zakah fil-mashalih al-Ammah.*, Terjemahan Oleh Said Aqil al Munawar, Kajian Pendayagunaan Zakat, Semarang, Bina Utama, Hal. 52-53.

- 4) Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum: jalan, sarana transportasi/komunikasi dan sebagainya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
- 5) Meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya untuk membangun peradaban di muka bumi seperti program pengembangan filsafat, ilmu dan teknologi.
- 6) Usaha-usaha lain yang secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan manusia.<sup>99</sup>

g. Ibnu Sabil

Para fuqaha mengartikan Ibnu Sabil (anak jalanan) dengan musafir yang kehabisan bekal.<sup>100</sup> Bepergian jauh dan kehabisan bekal dalam perjalanan ini terdapat di zaman orang masih berjalan kaki atau berkendara hewan, menempuh waktu yang sangat lama. Kadangkala belum tiba ke tempat tujuan bekal telah habis. Pada zaman sekarang, orang menempuh jalan ribuan kilometer dan bermil-mil jauhnya ditempuh dalam waktu yang singkat. Terkadang hanya ditempuh dalam waktu beberapa jam, seharusnya orang tidak kehabisan bekal di perjalanan meskipun dengan jarak sangat jauh. Kalaupun ada yang kehabisan bekal adalah karena sebab yang lain.<sup>101</sup> Dalam pada itu, meskipun pengertian sempit tersebut masih tetap relevan, namun

<sup>99</sup> Masdar F., *op.cit.*, Hal. 160-161

<sup>100</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, Hal. 334.

<sup>101</sup> Djamaluddin Ahmad Al-Buny, 1983, *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya : Bina Ilmu, Hal. 188.

mengingat dalam abad teknologi sekarang, di mana hubungan lalu lintas dan komunikasi lancar, reinterpretasi sesuai dengan duruf yang ada yang sudah begitu kompleks, amat diperlukan. Maka dana zakat yang dialokasikan kepada Ibnu Sabil bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan para pengungsi, baik karena alasan politik, maupun karena lingkungan alam, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lainnya.<sup>102</sup> Dalam buku *Pedoman Zakat* ditambahkan secara rinci untuk :

- 1) Mengirim mahasiswa ke luar negeri,
- 2) Untuk ekspidisi.
- 3) Pengiriman utusan ke konperensi-konperensi.
- 4) Untuk perbaikan jalan umum atau untuk lancarnya lalu lintas pendidikan atau pemeliharaan anak yatim.<sup>103</sup>

Sejalan dengan tujuan zakat adalah untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana tersebut di atas, maka timbul persoalan apakah dana zakat harus dialokasikan secara merata pada delapan sektor itu? Dalam hal ini memang Imam Syafi'i berpendirian demikian.<sup>104</sup> Menurut Abu Zahrah dengan mengutip Jumhur Fuqaha', bahwa amil sepenuhnya berhak untuk mengelola dan menasarufkannya sesuai dengan pandangannya mana yang harus didahulukan dan diutamakan agar dapat segera terwujud

<sup>102</sup> Masdar F., *op.cit.*, Hal. 162.

<sup>103</sup> Syukri Ghazali, dkk., 1984/1985, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Hal. 91.

<sup>104</sup> Abu Zahrah, Tanpa Tahun, *Fi Al-Mujtama' al-Islami*, Kairo : Dar al Fikr al-Araby, Hal. 103.

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, apabila ternyata Desa/Negara bagi wajib zakat sudah tidak ada lagi asnaf yang perlu diberi dana zakat atau masih ada sisa setelah dibagikan kepada asnaf yang ada, sangat mungkin dana zakat dipindahkan ke Desa/Negara lain dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.<sup>105</sup>

Al-Ustadz Muhammad Rasyid Ridha ra cenderung orang yang terbuang/hilang termasuk dalam kelompok *ibnu sabil*. Dikatakannya dalam *Hasyiyah* juz dua dari tafsirnya dalam memperdekat penafsiran *ibnu sabil*.<sup>106</sup> Mereka itu lebih dekat untuk dimasukkan dalam kelompok *ibnu sabil*.

Beliau telah memperpanjang pembahasan tersebut pada juz lima, dikatakannya “Orang yang terbuang itu lebih tepat dimasukkan dalam kelompok *ibnu sabil*. Para cendekiawan sekarang cenderung bahwa ini adalah makna yang akan dicapai. Dan lafalnya tersebut mencakup orang yang terbuang, apalagi dalam persoalan berbuat kebaikan tentu akan mencakup yang lainnya. Orang yang terbuang itu lebih utama dan lebih penting untuk menempatkan perhatian daripada anak yatim. Sedang para ahli tafsir melupakan keterangan ini karena langkanya orang yang terbuang saat itu. Sedang para musafir sesudahnya hanya mengutip pendapat sebelumnya. Karena pada umumnya di kalangan mereka telah membatasi kemerdekaan dalam pemahaman agar *ijtihad* yang mereka lakukan tetap berada pada pendapat tanpa harus mengunci pintu dan

---

<sup>105</sup> *Ibid*, Hal. 103-104.

<sup>106</sup> *Ibid*.



menyelewengkan pemilik pendapat serta mereka rela dikatakan kebodohnya. Karena orang yang tidak merdeka dalam memahami sesuatu tidaklah mereka disebut orang alim, sebagaimana hal ini telah jelas dan menjadi kesepakatan ulama salaf”.<sup>107</sup>

Setelah beliau membicarakan banyak orang yang terlantar di masa sekarang ini, dan mendapat bantuan dari orang Eropa, maka beliau mengatakan : “Kami adalah manusia yang lebih berhak untuk memelihara orang yang terlantar dan semua bentuk kebajikan serta perbuatan baik lainnya”.<sup>108</sup>

Setiap orang yang terpisah dari harta kekayaannya, walaupun dalam satu daerah, disamakan dengan ibnu sabil, karena keduanya sama-sama membutuhkan.<sup>109</sup>

Atas dasar ini maka bagi orang yang bermukim di suatu daerah kemudian hartanya habis atau hilang di daerah tersebut dan tidak mampu mendapatkan atau mempergunakan hartanya, maka baginya diperbolehkan mengambil bagian harta zakat sekedar untuk memenuhi kebutuhan sampai ia dapat kembali memanfaatkan hartanya.

Dengan menegakkan prinsip kontekstualitas ini bukan berarti setiap bentuk syari’at wajib diubah untuk setiap duruf yang berbeda, mengingat dalam setiap paket syari’at ada bagian yang bersifat primer, ada yang bersifat sekunder dan ada juga yang bersifat tersier. Atau dengan kata lain, ada syari’at yang bersifat strategis, di samping ada yang hanya

---

<sup>107</sup> *ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *ibid.*

bersifat taktis. Syari'at strategis apabila ia menggariskan kebijaksanaan pokok bagaimana suatu tujuan dicapai, dan disebut taktis apabila ia merupakan penjabaran operasional teknis bagaimana kebijaksanaan pokok itu diimplementasikan dalam praktek.

Suatu unsur syari'at yang bersifat strategis dan primer dengan tetap menerima kemungkinan perubahan memiliki tingkat kesesuaian yang lebih tinggi dalam menghadapi duruf, ketimbang yang bersifat taktis dan sekunder, apalagi yang hanya tersier. Parameter kesesuaian bukanlah terletak pada selera individual, dan bukan pula bunyi harfiah dari syari'at itu, melainkan terletak pada jiwa atau ruhnya syari'at, yakni kemaslahatan hidup manusia. Dalam hal ini, asy-Syatibi, sebagaimana halnya izzuddin bin Abdissalam menulis.<sup>110</sup>

Berangkat dari paradigma yang semacam ini, orientasi keberagaman akan dihayati berbeda dengan yang terjadi selama ini. Melalui paradigma ortodoksi, misi keberagaman dihayati lebih pada usaha menegakkan tafsir pemahaman (teologis) yang paling sesuai dengan bunyi ajaran. Sementara dengan paradigma ortopraksi, yang perlu dikembangkan di masa datang, tugas keberagaman seharusnya lebih dihayati sebagai usaha mewujudkan kemaslahatan hidup, yang notabene merupakan inti ajaran Islam. Dengan menekankan ortopraksi bukan berarti mengingkari segi formalitas atau legalitas syari'at. Ketentuan formal dan legal, bagaimanapun harus menjadi acuan tingkah laku masyarakat. Segala

---

<sup>110</sup> Abi Ishak Ibrahim ibn Musa Al-Lahimiyyi Al-Garnati, Asy-Syatibi, Tanpa Tahun, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam*, Jilid II, Beirut: Dar Al-Fikr, Hal. 2.

persoalan yang terjadi dalam masyarakat harus diletakkan pada ketentuan formal-legal yang berlaku dan sah. Akan tetapi pada waktu yang sama hendaklah disadari, bahwa patokan formal haruslah selalu tunduk pada cita kemaslahatan yang hidup dalam nurani masyarakat. Ini berarti, bahwa ia harus selalu terbuka untuk diubah atau diperbaharui sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.<sup>111</sup> Dengan demikian, bila ternyata cara pendistribusian zakat kepada yang berhak yang selama ini masih banyak terikat dengan paradigma ortodoksi, yang masih berorientasi pada kebutuhan konsumtif jangka pendek, perlu diubah menuju kebutuhan produktif sehingga lebih mendekatkan kepada kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Memang, kesejahteraan masyarakat menuju keadilan sosial inilah tujuan pokok disyariatkannya zakat.

Sebagaimana disinggung di atas, zakat yang dicanangkan oleh Allah dan diatur sedemikian rupa oleh utusan-Nya, terdiri dari beberapa unsur tasyri' dengan derajat yang berbeda-beda. Ada yang bersifat strategis/ primer dan karena itu potensial bisa diterapkan untuk banyak duruf, dan ada pula yang bersifat taktis, sekunder atau bahkan tersier, yang karena itu mungkin hanya cocok untuk suatu kondisi sosial tertentu. Syari'at strategis itu meliputi :

- a. Berkaitan dengan fungsi zakat sebagai sarana vital bagi tercapainya keadilan sosial, dengan tugas ditetapkan bahwa zakat merupakan kewajiban asasi yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Setiap orang yang

---

<sup>111</sup> Masdar F. Mas'udi, *Op.Cit.*, Hal. 126-134.

menapai tingkat sosial perekonomian tertentu wajib menunaikannya bukan atas dasar kapan ia suka, tapi kalau perlu bisa dengan paksa, sebagaimana disinggung dalam Surat At-Taubah : 103 tersebut di atas. Rasulullah sendiri menetapkan sebagai salah satu rukun Islam yang lima dalam urusan mendahului puasa dan haji. Dengan fungsi zakat untuk mensucikan, berarti tanpa zakat kesucian batin seorang muslim (berkaitan dengan nafsu menguasai materi) tidak akan dapat diperoleh. Ini bukan berarti sadaqah dan infaq tidak punya arti bagi proses pensucian diri, tapi bernilai sebagai suplemen atau nafilah.

- b. Berkaitan dengan obyek yang dikenakan zakat, Rasulullah menetapkan atas: jiwa dan semua jenis harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat di mana zakat ditetapkan. Zakat jiwa disebut zakat fitrah dan zakat harta benda disebut zakat maal. Berdasarkan syari'at yang bersifat primer ini, sesuai dengan masyarakat Madinah, Rasulullah menetapkan syari'at sekunder mengenai jenis-jenis kekayaan yang dikenai zakat meliputi : hasil pertanian (zuru'), hasil kebun (samar), ternak (mawasyi), hasil tambang (ma'dan) dan harta temuan (rikaz) atau lebih dikenal dengan harta karun. Dari ketentuan syari'at sekunder ini ditetapkan pula aturan tersier berupa rincian dari masing-masing kategori tadi.<sup>112</sup>

Sudah barang tentu untuk konteks kehidupan perekonomian dewasa ini yang lebih banyak bertumpu pada sektor industri dan jasa, ketimbang pada pertanian dan perkebunan yang tradisional, banyak jenis

---

<sup>112</sup> Adil Rosyad Ganim, 1985, *Daliluz-Zakah, Dar Al-Mujtama 'Lin-Nasr wat Tauzi'*. Hal. 11.

kekayaan dan rinciannya yang sangat menonjol dan bahkan menjadi komoditi ekspor, dalam aturan sekunder dan lebih-lebih yang tersier sama sekali belum pernah disinggung oleh Rasulullah. Misalnya dalam hal jenis kekayaan sebagai ketentuan sekunder di sana tidak terdapat kendaraan dan rumah mewah; dalam rincian tijarah masih terbatas pada jual beli barang, belum mencakup jual beli jasa (profesi); kategori ternak belum memasukkan ternak unggas atau ikan tawar; dalam kategori hasil pertanian belum mencakup; semangka, melon, kenyang, bawang merah/ putih, dan lain-lainnya; kategori hasil perkebunan belum dimasukkan; rambutan, kelengkeng, petai dan lain-lainnya; kategori alat pembayaran masih terbatas pada uang emas dan perak. Demikian juga dalam kategori barang tambang, belum dimasukkan minyak bumi, timah, permata dan sebagainya. Persoalannya cukup sederhana, karena jenis atau rincian kekayaan-kekayaan itu pada masyarakat Nabi, empat belas abad yang lampau belum berkembang, bahkan mungkin belum ada dalam realitas.

Bukan berarti, kalau Nabi tidak membicarakannya, lalu kekayaan-kekayaan tadi harus disimpulkan tidak terkena zakat. Bisa saja orang mengambil alih hukum satu hektar sawah bila ditanam padi dan hasilnya memenuhi batas ketentuan zakat akan terkena wajib zakat, maka untuk menghindari zakat, orang itu menanam selain padi, misalnya melon, semangka, bawang yang tidak terkena zakat. Atau kalau punya kebun luas satu hektar ditanami tanaman yang tidak terkena zakat, misalnya cengkeh, kelengkeng atau rambutan. Di sini

kita bisa mengambil dasar hukum qiyas atau maslahah mursalah atau yang lainnya yang notabene oleh Ulama Ushul sebagai sumber hukum. Dalam pada itu kita berasumsi, kalau saja sudah ditemukan dan berlaku lazim dalam masyarakat Nabi pada waktu itu, maka tentu akan juga dikenakan wajib zakat hal-hal tersebut di atas. Apa yang dilakukan oleh para fuqaha masa lalu dalam mengatur rincian masing-masing kategori kekayaan yang terkena zakat, meski merupakan masukan yang sangat berharga, namun tentunya tidak boleh membelenggu dan mematikan kreatifitas kita dalam merealisasikan cita kemasyarakatan yang relevan dengan keadaan duruf kita saat ini. Di sini diperlukan pembukaan pintu ijtihad dan kesanggupan memasuki pintu tersebut.

Menurut ijtihad Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, perlu adanya perluasan dalam masalah harta yang harus dizakati, tidak hanya terpaku dengan harta-harta yang telah disebutkan para ulama kita maupun para ahli fiqih terdahulu yang telah berbeda pendapat tentang perluasan ini. Kita sangat maklum, bahwa banyak hal yang di masa dulu tidak ada atau tidak mempunyai nilai ekonomis, namun sekarang tidaklah demikian. Banyak harta yang mempunyai nilai tinggi dan pekerjaan yang banyak memberikan penghasilan. Itu semua bisa dikembalikan pada keumuman firman Allah Q.S. 9 : 103

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi)*

*ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dan Q.S 70 : 24 – 25 tersebut di atas

*...dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), ...*

Keumuman kata *amwal* itu mencakup berbagai harta, antara lain yang keluar dari bumi, seperti tanaman, buah-buahan dan biji-bijian, atau yang berada dalam bumi seperti tambang emas, perak dan jenis tambang lainnya, atau yang berada di permukaannya, seperti batubara, atau yang hidup di atasnya, seperti binatang ternak dan sejenisnya, atau harta berupa emas simpanan atau perak atau apa saja yang diperdagangkan, begitu pula uang kertas, saham, obligasi dan lain-lainnya yang menurut pandangan ahli syari'at yang bijaksana mempunyai nilai.<sup>113</sup> Senada dengan pendapat ini, hasil seminar perekonomian Islam di Universitas Yordania 1983 yang kemudian membentuk lajnah yang diketuai Mushtafa Ahmad Az-Zarqa, pada point ketujuh hasil seminar memberikan perhatian penuh terhadap hukum-hukum fiqh yang telah disampaikan para pembahas berkenaan dengan materi-materi baru yang dibicarakan, seperti zakat batu-batuan yang diambil dari jurang-jurang untuk membangun, memperbaiki jalan-jalan dan lain-lain sebagainya.

---

<sup>113</sup> Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Op.Cit.*, Hal. 8.

Zakat bangunan-bangunan yang disewakan, seperti kapal terbang, kapal laut, alat-alat untuk menggali, mengangkat memindahkan dan sebagainya.<sup>114</sup> Hasbi dengan mengambil ilat wajib zakat ialah bahwa harta itu harta yang berkembang dan subur dalam fiqh disebut *An-Namau* baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan qiyas beliau menyimpulkan semua harta yang tidak bergerak dapat dikenakan zakat dari hasil yang diperoleh dari padanya. Terhadap harta yang bergerak zakatnya dikenakan atas pokok hartanya, dan terhadap benda-benda yang tidak bergerak, zakatnya diambil dari penghasilannya. Pungutan zakat yang dikenai atas penghasilan lebih besar, sedangkan yang dikenakan atas pokok lebih kecil jumlahnya.<sup>115</sup> Yusuf Al-Qardawy dengan kembali pada Q.S. 9 : 103 dan Q.S. 70 : 24-25, memandang juga bahwa segala harta yang memenuhi kriteria wajib zakat harus dikeluarkan zakatnya.<sup>116</sup>

Bila kembali kepada Imam Madzhab : Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Ahmad, nampak bahwa Imam Maliki lebih menekankan kepada umumnya ayat Q.S. 9 : 103 dan Q.S. 70 : 24-25, sehingga segala maal yang memenuhi kriteria wajib zakat dapat dikenakan zakat, dan dari Imam yang lain pun ada kemungkinan untuk mengembangkan kategori harta yang wajib dizakati dengan menggunakan qiyas.<sup>117</sup>

<sup>114</sup> *Ibid*, Hal. 60.

<sup>115</sup> T.M. Hasbi Assh-Shiddieqie, 1969, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, Yogyakarta: Matahari Masa, Hal. 22-23.

<sup>116</sup> Yusuf Al-Qardawwy, 1969, *Fiqhuz Zakah*, Jilid I, Beirut : Dar Al-Irsyad, Hal. 124.

<sup>117</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, Hal. 286-230.



- c. Menyangkut besar-kecilnya tarif atau kadar zakat secara absolut yang harus dibayar oleh masyarakat, Rasulullah menetapkan hal itu ditentukan oleh berat ringannya tantangan keadilan dan kesejahteraan yang dihadapi. Sesuai dengan prinsip yang primer atau strategis ini, Rasulullah menetapkan tarif zakat sebagai aturan sekunder antara 2,5% dan 10%. Ada satu jenis kekayaan yang dikenakan tarif tinggi, 20% karena perolehannya yang tanpa upaya, yaitu rikaz atau karun. Rasulullah telah menetapkan atas harta pertanian taripnya lebih tinggi dari yang dikenakan atas kekayaan niaga. Hasil pertanian dikenakan tarip 5-10%, sementara hasil niaga hanya 2,5%. Apakah tarip-tarip itu harus dilaksanakan secara absolut? Dalam hal ini Hasbi Ash-Shiddieqie mengatakan, namun demikian, karena ketentuan nisab ini dinashkan sendiri oleh syara', bukan ditetapkan oleh ijtihad para mujtahid, maka tak dapatlah kita menggunakan qiyas dalam hal ini. Jelasnya nisab harta yang dikenakan pungutan zakat tidak dapat berubah menurut perkembangan masa dan perkembangan keperluan hidup.<sup>118</sup>

Namun demikian, bila kita telusuri latar belakang kenapa Nabi menetapkan demikian, akan terlihat bahwa penduduk Madinah, atas siapa tarip itu dikenakan adalah masyarakat yang secara ekonomis lebih banyak bertumpu pada olah pertanian. Kalaupun ada usaha perdagangan, hanyalah melibatkan kelompok kecil saja dan belum terlalu berkembang. Berbeda dengan yang terjadi di Mekkah, di mana

---

<sup>118</sup> Hasbi Ash-Shiddieqie, *op.cit.*, Hal. 42.

arus utama perekonomian justru pada perdagangan, bahkan tidak jarang yang sangat kapitalis, misalnya perdagangan uang dengan bunga yang mencekik. Dalam pada itu, persoalan ketidakadilan sosial di Mekkah dan Madinah pun berbeda pijakannya. Di Mekkah lebih bertumpu pada kesenjangan ekonomi antara pemilik modal (kapitalis) dan kelas buruh (proletar), sedangkan di Madinah bertumpu pada kesenjangan ekonomi antara kelas pemilik tanah pertanian yang luas dengan kelas buruh tani yang tidak bertanah. Oleh sebab itu, dapat dimengerti, apabila Rasulullah mengenakan tarip zakat hasil pertanian lebih tinggi 5-10% dibanding yang dikenakan atas jenis kekayaan lain berkisar 2,5%. Kalau saja konsep ini dicanangkan pada waktu Rasulullah di Mekkah atau di lingkungan masyarakat kota mana saja yang kapitalis, kemungkinan besar tarip ini akan dibalik. Bukan petani, tapi kelompok pedagang dan pemilik modal yang kapitalis itulah yang dikenakan tarip zakat tinggi. Atau sistem kapitalis itu yang dirubah. Inilah sebabnya, Masdar mengatakan, tarip yang ditentukan oleh Rasulullah tersebut tidak ada halangan untuk diperbesar. Kalau perlu, sistem zakat progressif pun bisa diterapkan.<sup>119</sup> Senada dengan pendapat ini, Amien Rais menjabarkan pekerjaan tani jelas merupakan pekerjaan yang berat, setidaknya-tidaknya secara fisik. Di samping itu petani harus langsung membayar zakat begitu panen selesai, sesuai dengan Q.S. 6 : 141 :

*Dan tunaikan haknya (zakatnya) di hari memetik hasilnya.*

---

<sup>119</sup> Masdar F. Mas'udi, *op.cit.*, Hal. 139.

Namun demikian, mengapa zakat maal menunggu haul (setahun)? Ternyata, tiga buah hadis tentang haul adalah da'if semuanya, berdasarkan informasi seorang ahli hadis. Barangkali kita perlu mepinjau soal haul ini. Bila petani yang bekerja keras membayar zakat 5-10% langsung dibayarkan pada waktu panen (kalau setahun dua kali panen sama dengan 20%, dan kalau setahun panen tiga kali sama dengan 15-30%), cukupkah kira-kira 2,5% bagi profesi modern yang lebih gampang memperoleh uang? Kita memungut zakat terhadap profesi-profesi modern lebih dari 2,5%, semua ini demi kehidupan sosial yang lebih sehat, agar jarak antara yang kaya dan yang miskin tidak semakin menganga lebar.<sup>120</sup> Dalam pada itu, tarip 2,5% atau zakat *anwal* yang dirumuskan oleh para fuqaha berdasarkan beberapa hadis, lebih merupakan hukum yang berdasarkan ijtihad.<sup>121</sup>

- d. Hubungan dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, Rasulullah menetapkan bahwa pelaksanaan zakat harus melalui amil, yang secara struktural memiliki kewenangan untuk menegakkan kesejahteraan dan cita keadilan bersama. Pihak ketiga itu adalah Imam atau pemerintah yang efektif dan memiliki komitmen pada kemaslahatan hidup warganya tanpa pilih kasih. Mengingat perkembangan kehidupan berikut unsur-unsurnya, dan semakin banyak, besar dan macam-macam kekayaan yang ada, rasanya perlu dibentuk yayasan/badan

<sup>120</sup> Amien Rais, 1987, *Cakrawala Islam : Antara Cinta dan Fakta*, Bandung : Mizan, Hal. 58-61.

<sup>121</sup> *Ibid.*

yang khusus mengelola ZIS yang terkoordinasi dari pusat sampai ke bawah.<sup>122</sup>

Dengan lembaga amil yang memiliki kewenangan formal, bukan saja pihak-pihak yang menolak membayar zakat bisa dipaksa, melainkan dalam distribusinya pun dapat difungsikan secara nyata sebagai upaya membangun tata kehidupan sosial yang lebih adil buat semuanya dari sudut struktural.

Dari sudut kultural, dengan melewati lembaga amil, kemungkinan terjadi hubungan patronase antara muzakki daan mustahik bisa dihindari atau dikurangi. Tanpa lewat amil, boleh jadi seseorang yang kaya dengan antusias mengeluarkan bantuannya pada si miskin dengan dalih untuk menolongnya. Akan tetapi bila dilihat dari hubungan seperti itu, yang dalam istilah sosiologi disebut hubungan pertukaran tak seimbang, yang terjadi adalah hubungan patronase yang eksploratif oleh pihak si kaya sebagai pemberi budi atas si miskin sebagai yang berhutang budi. Tentu saja dalam pola hubungan semacam ini, keadilan sosial yang mengandalkan prinsip keseimbangan akan sulit bisa diwujudkan.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Muhammad Abdul Qadir, *op.cit.*, Hal. 7.

<sup>123</sup> Masdar F. Mas'udi, *op.cit.*, Hal. 145-146.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Hukum Pengelolaan Zakat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kota Surakarta akan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat manakala ia dapat memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana berikut: (i) memacu pertumbuhan dan sekaligus pemerataan ekonomi; (ii) berdimensi langsung dengan kepentingan masyarakat; (iii) memegang teguh prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi; dan (iv) memanfaatkan sumber daya secara adil, transparan, dan produktif.
2. Dalam melaksanakan reinterprestasi bukan berarti setiap bentuk syari'at wajib diubah untuk setiap zaman yang berbeda. Setiap syari'at ada bagian yang bersifat strategis yang menggariskan kebijakan pokok sebagaimana suatu tujuan dicapai. Dan ada yang bersifat taktis apabila ia merupakan penjabaran operasional bagaimana kebijakan pokok tadi diimplementasikan dalam praktek. Penulis memandang bahwa obyek zakat dan delapan golongan penerima zakat bersifat strategis, sedangkan menyangkut siapa saja yang dimaksud bersifat taktis dan ada unsur fleksibilitas.

## B. SARAN-SARAN

1. Organisasi pengelola zakat dapat berkiprah dalam seluruh aspek yang ada dengan adanya hukum pengelolaan zakat. Namun dengan keterbatasan sumber dana dan sumber daya manusia yang dimiliki harus ada skala prioritas. Dengan keterbatasan sumber dana dan sumber daya maka harus menekankan efektifitas dana dan fokus kerja, sehingga peran zakat dalam kehidupan ummat dapat dirasakan masyarakat.
2. Penafsiran dogmatis-formalistis menyangkut obyek zakat dan distribusinya menjadikan daya guna zakat belum bisa mengangkat perekonomian rakyat dan negara. Maka haruslah lebih dahulu disadari bahwa pada prinsipnya tidak ada kelembagaan (Fiqh) yang bersifat absolut, dan apriori berlaku untuk segala kondisi. Sebagai metoda, cara bagaimana tujuan itu tercapai, syari'at mestilah bersifat dinamis dalam satu keadaan, waktu, dan tempat tertentu, tidaklah otomatis cocok untuk mencapai tujuan yang sama dalam kondisi yang berbeda. Demikian berlaku bukan hanya untuk syari'at yang dirumuskan oleh manusia, melainkan juga pada syari'at yang ditawarkan oleh Tuhan sebagai ekspresi rahmat-Nya yang berlimpah kepada manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Azhari Samudra, *Perpajakan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustakatama, Jakarta.
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Tanpa Tahun, *Matan Al-Bukhari*, Jilid I, Isa Bab Halabi.
- Abi Ishak Ibrahim ibn Musa Al-Lahimiyyi Al-Garnati, Asy-Syatibi, Tanpa Tahun, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam*, Jilid II, Beirut : Dar Al-Fikr.
- Abu Bakar Al-Jazairy, Tanpa Tahun, *Minhaj Al-Muslim*, Saudi Arabia : Ad Da'wah Bi al-Madinah Munawwarah.
- Abu Zahrah, Tanpa Tahun, *Fi Al-Mujtama' al-Islami*, Kairo : Dar al Fikr al-Araby.
- Abul Fatah Tabarah, Tanpa Tahun, *Ruhuddin Al-Islam*.
- Adil Rosyad Ganim, 1985, *Daliluz-Zakah*, Dar Al-Mujtama 'Lin-Nasr wat Tauzi'.
- Alherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Amien Rais, 1987, *Cakrawala Islam : Antara Cinta dan Fakta*, Bandung : Mizan.
- Aminata, 1990, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Pustaka Prima, Surakarta.
- Andi Mustari Pide, 1999, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media, Jakarta.
- Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Ateng Syarifudin, 1988, *Pengaturan Koordinasi Pemerintah Di Daerah*, Tarsito, Bandung.
- Bachrawi Sanusi, 2000, *Sistem Ekonomi (Suatu Pengantar)*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bambang Cokro, 1995, *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern- Industrial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bank Indonesia, 1991, *Pedoman Kredit Usaha Kecil*, Jakarta.

- Bintoro Cokro Amijoyo, 1988, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Bohari, 1993, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Clarence L. Barnhart dan Robert K. Barnhart (ed), 1988, *The world Book Dictionary Volume Two L-Z*, World Book Inc, Chicago.
- David B. Guralnik, (Gen. Ed), 1975, *Webster's New World Dictionary*, Oxford and IBH Publishing Co, New Delhi.
- Djamaluddin Ahmad Al-Buny, 1983, *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Dumairy, 1999, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Faisal Sanafiah, 1990, *Penelitian kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, Cet I.
- Gunawan Sumodiningrat, 1999, *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif*, Impac Wahana Cipta, Jakarta.
- H. Martin Hutabarat dkk, 1996, *Hukum dan Politik Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- H.B.Soetopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta.
- Hadari Nawawi, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hafiddudin, *Kedaulatan Rakyat*, 9 September 2001.
- Henry Niholson, 1993, *Sistem Administrasi Negara Baru*, LP3ES, Jakarta.
- Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, 2001, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Institut Manajemen Zakat, Jakarta.
- Hertifah Sjaifudian dkk, 1995, *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, Akatiga, Bandung.
- Hudiyanto, 1993, *Sejarah Kemiskinan di Indonesia*, dalam Said Tuhuleley (ed), *Permasalahan Abad XXI Sebuah Agenda*, Yogyakarta : Sipres.
- John Martin, 1985, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Terjemahan Aris Munandar, Rajawali Press Jakarta.



- Komaruddin, 1984, *Kamus Riset*, Angkasa, Bandung.
- Kwik Kian Gie, 1996, *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 1999, *Ekonomi Indonesia Dalam Krisis dan Transisi Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, dalam Esmi Warrassih, 1995, *Peranan Kultur Hukum Dalam Penegakan Hukum*, (Masalah-masalah Hukum) Semarang, Undip.
- Longman, *Longman Dictionary of English Language and culture*, Longman Group UKlimited, Harlow.
- M. Yahya Harahap, 1994, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Mahmud Abu Su'ud, 1968, *Khutut Ra'isah Fi al-Iqtisad al-Islam*, Kuwait : Al-Manar al-Islamiah.
- Mahmud Syaltut, 1968, *Al-Islam 'Aqidah Wa syari'ah*, Kairo : Dar Asy-Syuruq.
- Masdar F. Mas'udi, 1993, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Max Boli Sabon, *Ilmu Negara*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Merriam Webster's, 1998, *Merriam webster's collegiate dictionary*; Merriam webster's Incorporated, Springfield-Massachussetts.
- Muamalah Center BMT Jawa Tengah, *Pedoman Kerja Pengelola Baitul Maal wat Tamwil Balai usaha Mandiri Terpadu*, tanpa Penerbit dan tanpa tahun.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- , *Mempercepat Perwujudan Keadilan Sosial Melalui Sistem Kredit Pedesaan*, Dalam Kredit Pedesaan di Indonesia, BPFE, Yogyakarta.
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Tanpa Tahun, *Infagus Zakah Fil Mashalih Al-'Ammah*, alih bahasa Aqil Husein Al-Munawar, Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat, Semarang: Bina Utama.
- Muhammad Daud Ali, 1988, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Muhammad Djuminana, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Jawad Muhgiyah, 1969, *al-Tafsir al-Kasif*, Jilid 4 Mesir: Dar al-Qolam li al-Malayin.

- Muhammad Rasyid Rida, Tanpa Tahun, *At-Fatawa*, Kairo : Dar Asy-Syuruq.
- Muhammad Ryaas Rasyid, 1997, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Orde Baru*, Anggota IKAPI Jakarta.
- Muhammad, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhtasar Ibnu Yahya Muhammad Ibn Sumadiah at-Tajuby, 1970, *Tafsir at-Tahari*, Mesir : Al-Hai'ah al-Muriyah al-Ammah.
- Mustafa al-Maragi, 1970, *Tafsir al-Maragi*, Jilid 4, Mesir : Mustofa Bab al-Halabi.
- Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Salim, 1996, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta.
- Pinbuk, *Pedoman Penelitian Tingkat Kesehatan BMT*, Muamalah Center BMT Jawa Tengah, Tanpa Tahun.
- R.H. Soemitro, 1984, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Riwu Kaho, 1987, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Tarsito, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.
- S. Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- , 1986, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Angkasa, Bandung.
- , 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sayyid Qutub, 1958, *Al-adalah Al-Ijtima'iyah Fi al-Islam*, Kairo : Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah.
- Sayyid Sabiq, Tanpa Tahun, *Fiqhus Sunnah*, Jilid I, Semarang : Toha Putra.
- Soeharto Prawirokusumo, 1995, *Peranan BUMN dalam Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil*, BPHN Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- , 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press.

- Soetrisno P.H, 1994, "*Sekelumit tentang Sistem Ekonomi Pancasila Ditinjau dari Segi Sosio-Kultural*" dalam Mubyarto dan Boediono (Ed), *Ekonomi Pancasila*, BPFE, Yogyakarta.
- Solly Lubis, 2000, *Hukum dan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Sumitro Djojohadikusumo, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- , 1989, *Kredit Rakyat di Masa Depresi*, LP3ES, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1973, *Metodologi Riset*, Yayasan penerbit Psikologi UGM, Yogyakarta.
- , 2000, *Metodologi Research*, Penerbit Andi, Yogyakarta, Jilid I.
- Sutrisno, 2000, *Manajemen Keuangan; Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Penerbit Ekonosia Yogyakarta, Cet. Pertama.
- Syukri Ghazali, dkk., 1984/1985, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- T.M. Hasbi Assh-Shiddieqie, 1969, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, Yogyakarta: Matahari Masa.
- Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, 1999, *Pedoman Zakat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Thoha Miftah, 1983, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, C.V. Rajawali, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tom Gunadi, Tanpa Tahun, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Angkasa, Bandung.
- Triyanto Suseno Widodo, 1990, *Indikator Ekonomi*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- William Morris (Ed), 1981, *The American Heritage Dictionary of the English Language*, Houghton Mifflin Company, Boston.
- Winardi, 1984, *Pengantar Sistem-Sistem Ekonomi*, Alumni, Bandung.

Yozar Anwar, 1990, *Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan*, Bina Rena  
Pariwara, Jakarta.

Yusuf Al-Qardawy, 1969, *Fiqhuz Zakah*, Jilid I, Beirut : Dar Al-Irsyad.

-----, 1975, *Muskilah al-Faqr*, Maktabah Wahbah.

Zudan Arif F, 1997, *Hukum Ekonomi*, Abditama, Surabaya.